



UNIVERSITAS INDONESIA

**UPAYA ANDEAN COMMUNITY DALAM MENGHADAPI
SMALL ARMS TRAFFICKING TAHUN 2003-2008:
STUDI KASUS KOLOMBIA**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana**

Hamzah Anas

0905080113

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
PENGKAJIAN STRATEGIS
DEPOK**

JUNI 2009

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.



Nama : Hamzah Anas
NPM : 0905080113
Tanda Tangan :
Tanggal : 15 Juni 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Hamzah Anas

NPM : 0905080113

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul Laporan Magang : Upaya Andean Community Dalam Menghadapi
Small Arms Trafficking Tahun 2003-2008: Studi
Kasus Kolombia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Andi Widjajanto, M.Sc, M.S (.....)

Penguji : Edy Prasetyono, Ph.D. (.....)

Ketua Sidang : Nurani Chandrawati, M.Si (.....)

Sekretaris Sidang : Senia Febrica, M.Sc (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 7 Juli 2009

Kata Pengantar

Persoalan penyelundupan senjata kecil (*small arms Trafficking*) menjadi ancaman keamanan terbesar bagi negara-negara yang berada di kawasan Andean khususnya Kolombia. Senjata-senjata ini digunakan untuk melindungi perdagangan ilegal narkoba di kawasan tersebut. Senjata kecil dengan sifatnya yang begitu mudah untuk dibawa dan digunakan menjadi penyebab tingginya angka kekerasan bersenjata yang mengakibatkan jatuhnya banyak korban jiwa. Sifatnya yang lintas batas membuat persoalan ini sulit untuk diselesaikan tanpa adanya kerjasama dengan negara sekitar. Untuk itu negara-negara di kawasan Andean sepakat untuk membentuk suatu komunitas yang disebut dengan Andean Community.

Skripsi dibuat dengan tujuan untuk melihat bagaimana upaya Andean Community dalam mengatasi penyelundupan senjata kecil di kawasan tersebut. Dengan meneliti Dokumen Decision 552 sebagai bentuk kebijakan Andean Community, skripsi ini dapat menjadi suatu parameter bagaimana seharusnya kebijakan yang tepat dalam mengatasi SAT dengan mengedepankan kerjasama dan integrasi dalam suatu kawasan.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan studi keamanan dalam hubungan internasional khususnya dalam kaitannya dengan ancaman non-konvensional seperti penyelundupan senjata kecil, Terima kasih.

Depok, 15 Juni 2009

Penulis

Ucapan Terima Kasih

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan petunjukNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Upaya Andean Community Dalam Menghadapi Small Arms Trafficking Tahun 2003-2008: Studi Kasus Kolombia. Penyusunan Skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Pembuatan Skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, sebab tanpa dukungan tersebut skripsi ini akan sulit untuk diselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih dengan tulus kepada :

1. Allah SWT, karena tanpa izin-Nya, Penulis tidak akan mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Ayah dan Mama yang selalu mendorong, mendukung, dan pengorbanan yang besar agar penulis bisa menyelesaikan studinya. Terima kasih, jasa ayah mama tidak akan pernah terbalas.
3. Mas Andi Widjajanto M.Sc, M.S., selaku dosen pembimbing magang yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing penulis menyelesaikan laporan magang Saya sangat bangga bisa menjadi siswa bimbingannya.
4. Mas Edy Prasetyono, selaku dosen Penguji yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk menguji skripsi penulis. Terima Kasih atas kritik dan sarannya.
5. Yeni Yuniarti, penyemangat, yang selalu memotivasi. Menjadi tempat bertanya, bercerita, dan mengadu dalam penyusunan skripsi ini. *Sans toi, je ne peux pas finir mon travail, je t'aime.*
6. Eki Rahmadian, sahabat yang selalu mendukung dan memahami.
7. Warung Sate Gajah tempat menyusun, diskusi, tempat belajar, tempat merefresh. Luki, Heri, Mul, terimakasih selalu mau membantu dan menunggu.

8. Sahabat di HI'05 yang sangat saya cintai, Gera, Baskoro, Dimas, Bambang, Mario, Anggi, Desca, Ical, Hans, Pandu, Ainan, Beril, Ayu, Ucan, Yasin, Nety, Vira, Pipit, Fika, Yudha, Pane Listi ,Ranee, Via, dan Daniel. terimakasih untuk kebersamaan yang tidak ternilai harganya, bersama kalian, saya belajar betapa berharganya arti sebuah persahabatan.
9. Keluarga PSDM BEM Fisip Riska, Nindy, Angga, Tya, Hanna, Dytha, Afra, Mamas, Surya, Ika, Ami, Rudy, Cipok. Terima kasih buat dukungan yang begitu besar, persahabatan yang begitu manis, dan kekeluargaan yang begitu hangat.

Skripsi ini bukan suatu karya yang sempurna, mengingat kesempurnaan hanya milik Allah S.W.T dan kekurangan ada pada diri penulis karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar penulis bisa melakukannya lebih baik lagi di kemudian hari. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Depok, 15 Juni 2009

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hamzah Anas
NPM : 0905080113
Program Studi : Pengkajian Strategis
Departemen : Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive-Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Upaya Andean Community Dalam Menghadapi Small Arms Trafficking
Tahun 2003-2008: Studi Kasus Kolombia**

beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 15 Juni 2009

Yang menyatakan

(Hamzah Anas)

ABSTRAK

Nama : Hamzah Anas
Program studi : Hubungan Internasional
Judul : Upaya Andean Community Dalam Menghadapi Small Arms Trafficking Tahun 2003-2008: Studi Kasus Kolombia

Skripsi ini membahas mengenai peran Andean Community dalam mengatasi persoalan *Small Arms Trafficking* di kawasan Andean. Salah satu instrumen yang digunakan oleh Andean Community adalah *Decision 552: Andean Plan to Prevent, Combat and Eradicate Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in all its Aspects*. Dengan menggunakan Sepuluh saran mengatasi SAT menurut Rachel Stohl sebagai pembanding dan menggunakan kasus yang terjadi di Kolombia, penulis akan meneliti apakah decision 552 ini dapat menjadi suatu instrumen yang tepat untuk menyelesaikan persoalan SAT dengan tetap menjaga integrasi di Kawasan Andean. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan analisa dokumen.

Kata kunci :

Small Arms Trafficking, Kawasan Andean, Decision 552

ABSTRACT

Name : Hamzah Anas
Study Program : *International Relations*
Title : *Andean Community's effort in Struggling the Small Arms Trafficking from 2003-3008: Case Study Colombia.*

The focus of this study is about the Andean Community's effort to struggle the Small Arms Trafficking in Andean Region. One of the Instruments is the Decision 552: Andean Plan to Prevent, Combat and Eradicate Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in all its Aspects. Using the Rachel Stohl's ten ways of eradicating the small Arms trafficking as a comparative and Colombia's cases, the author will analyze whether Decision 552 can be a best instrument to solve the problem of Small Arms Trafficking without disturbing the Andean region integration. This is a Qualitative approach study with document analysis.

Key words:
Small Arms Trafficking, Andean Region, Decision 552

DAFTAR ISI

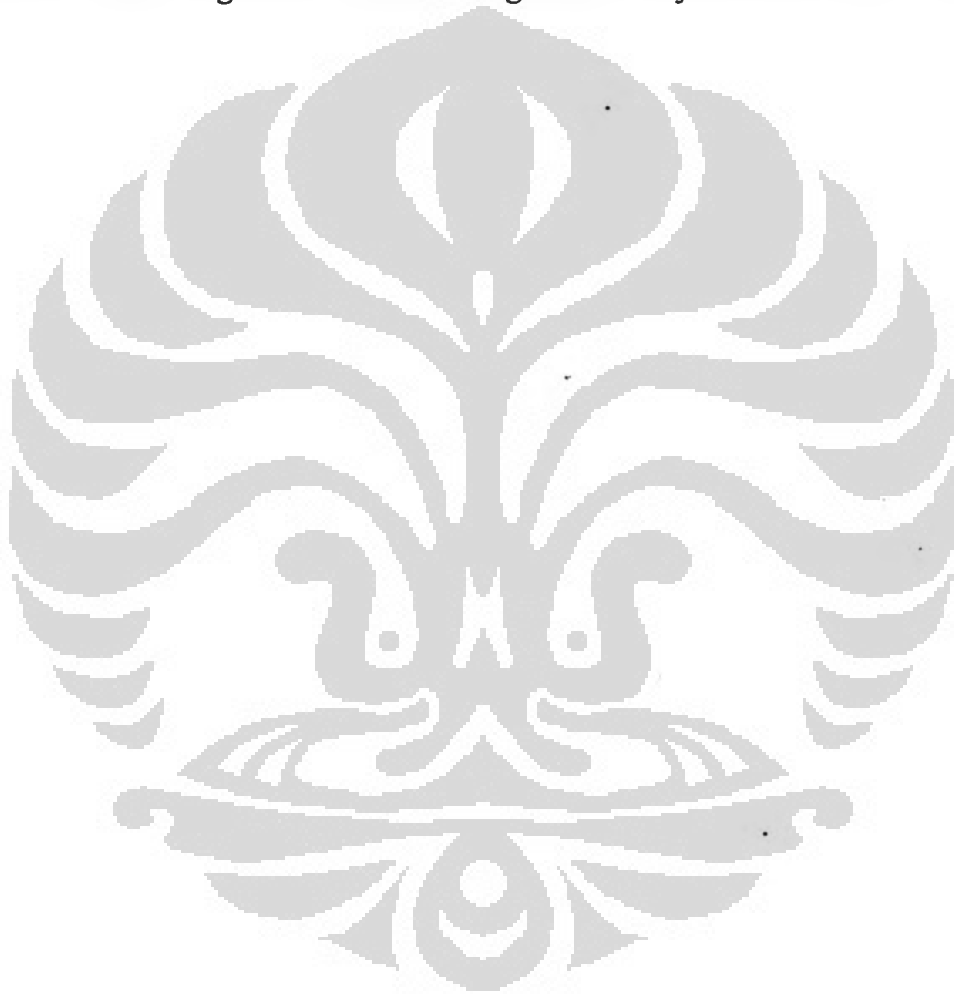
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan permasalahan	6
1.3 Kerangka Konsep.....	6
1.3.1. Konsep Integrasi	7
1.3.2. Konsep Rezim Internasional.....	9
1.3.3. Konsep <i>Small Arms Trafficking</i>	11
1.4 Formasi Konsep	14
1.5 Tinjauan Pustaka.....	16
1.6 Pengumpulan Data.....	19
1.7 Analisis Data.....	19
1.8 Rencana Pembabakan Skripsi.....	20
1.9 Tujuan dan Signifikansi Penelitian	20
2. UPAYA ANDEAN COMMUNITY DALAM MENGHENTIKAN SAT DI AMERIKA LATIN.....	22
2.1 <i>Small Arms Trafficking</i> di Amerika Latin.....	22
2.1.1 Dinamika <i>Small Arms Trafficking</i> di Amerika Latin.....	23
2.1.2 Dinamika <i>Small Arms Trafficking</i> di Kolombia	27
2.2 Proses Terbentuknya Decision 552 Andean Community	33
3. IMPLEMENTASI DECISION 552 DALAM MENGHENTIKAN SAT..49	
3.1 Analisa Hubungan Decision 552 dengan Sepuluh Saran Rachel Stohl..	51
3.2 Realitas Implementasi Decision 552.....	66
3.2.1 Kekerasan Bersenjata Pasca Decision 552	66
3.2.2 <i>Small Arms Trafficking</i> Pasca Decision 552.....	71
3.2.3 Manajemen Kontrol Senjata di Kolombia	74
3.3 Kategorisasi	78
4. PENUTUP.....	81
4.1 Kesimpulan	81
4.2 Saran	84
DAFTAR REFERENSI.....	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Formasi Konsep	14
Tabel 2.1 Keterlibatan Senjata Dalam Kasus Penyerangan Tahun 2005	32
Tabel 2.2 Perbandingan Kasus Amerika Latin dan Kolombia	40
Tabel 3.2 Peraturan Penandaan Senjata di Kolombia	66
Tabel 3.3 Angka Pembunuhan dan Kematian Terkait Dengan Konflik Senjata 1999-2005.....	68
Tabel 3.4 Senjata Yang Digunakan Dalam Aksi Kriminal Januari-April Tahun 2005	69
Tabel 3.5 Operasi Utama Menumpas SAT 1997-2003	72
Tabel 3.6 Tipe dan Jumlah Senjata Yang Disita dari Kelompok Pemberontak 2004-2005	73
Tabel 3.7 Institusi Pemerintah Kolombia Dalam Menghentikan SAT di Kolombia	75
Tabel 3.8 Kategorisasi 1	79
Tabel 3.9 Kategorisasi 2	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 <i>Timeline</i> Kebijakan Kontrol Senjata.....	35
Grafik 3.1 Penggunaan Senjata Kecil Dalam Kasus Pembunuhan 1999-2005 ..	68
Grafik 3.2 Evolusi Tingkat Kematian di Kolombia 1960-2005	71
Grafik 3.3 Jumlah Senjata Yang berhasil Disita oleh Pemerintah 2000-2005 ...	74
Gambar 3.4 Struktur Organisasi Otorisasi Pengawasan Senjata di Kolombia ...	76



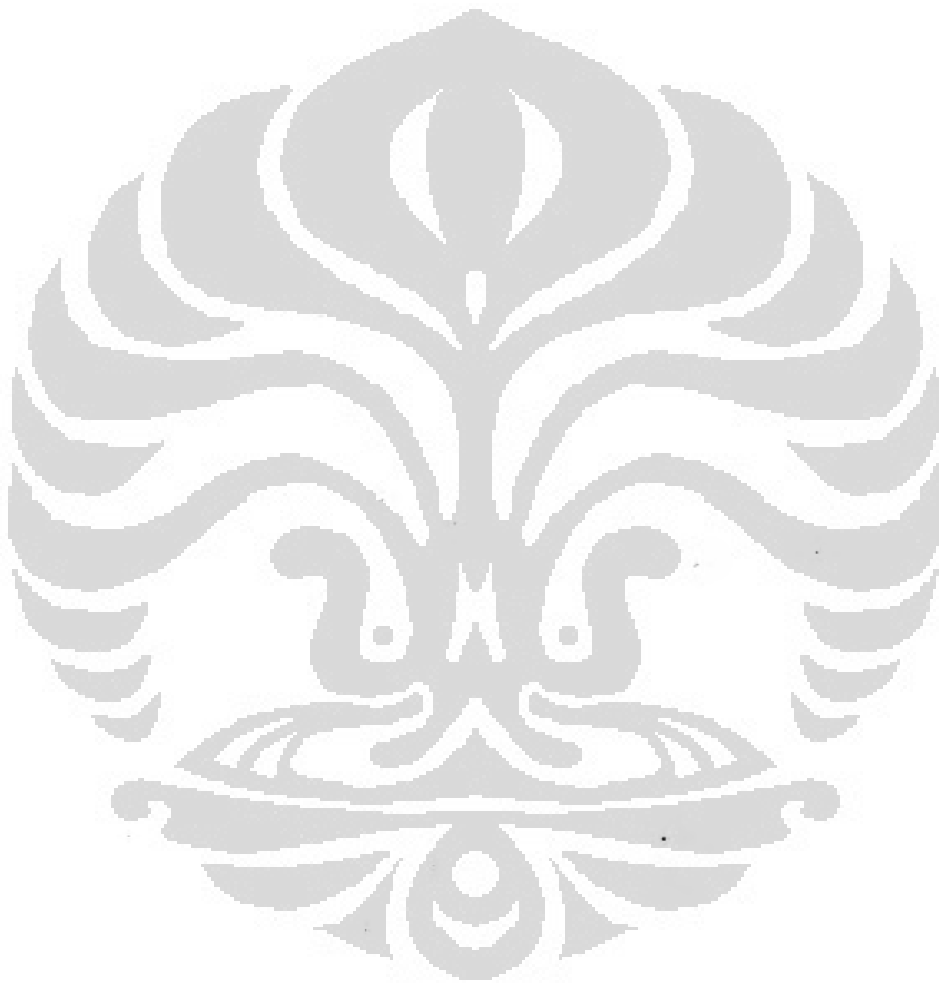
DAFTAR SINGKATAN

ALALCA	: <i>Asociasion LatinoAmericana de Libro Comercio</i>
AUC	: <i>Autodefensas Unidas de Colombia</i>
CAN	: <i>Comunidad Andeana</i>
CEPAL	: <i>Comision Economica para America Latina</i>
CICAD	: <i>Inter-American Drug Abuse Control Commission</i>
CIFTA	: <i>The Inier-American Convention Againts the Illicit Manufacturing of and Trafficking in firearms, Ammunition, Explosives and Other Materials</i>
CTI	: <i>Technical Investigation Unit of the Prosecutor office</i>
DAS	: <i>Administrative Department of Security</i>
DCCA	: <i>Department of Control of Arms, Ammunition and Explosive Trade</i>
ECLA	: <i>Economic Commision for Latin America</i>
ELN	: <i>Ejército de Liberación Nacional</i>
EPL	: <i>Popular Liberation Army</i>
FARC	: <i>Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia</i>
GIAT	: <i>Interinstitution anti-terrorist Analysis Group</i>
Indumil	: <i>Industria Militar</i>
OAS	: <i>The Organization of American States</i>
SAT	: <i>Small Arms Trafficking</i>
UNODC	: <i>United Nation Office on Drugs and Crime</i>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : *Decision 552: Andean Plan to Prevent, Combat and Eradicate Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in all its Aspects*

Lampiran 2 : Perbandingan Peraturan Legislatif dan Undang-undang Kolombia



BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perhatian studi hubungan internasional telah memasuki babak baru khususnya dalam kajian studi keamanan. Babak baru tersebut meliputi pergeseran jenis ancaman yang sebelumnya lebih didominasi oleh ancaman yang bersifat konvensional seperti agresi, invasi dan deklarasi perang dari negara lain menjadi ancaman non-konvensional. Chalk mengklasifikasikan ancaman non-konvensional sebagai *grey area phenomenon*, dimana isu-isu yang tergolong kedalam isu keamanan non-konvensional merupakan isu non-keamanan, hanya saja ia memiliki dimensi *violence* didalamnya. Isu tersebut meliputi pelanggaran hak asasi manusia, terorisme, Penyelundupan senjata, penyelundupan narkoba, *woman and child trafficking*, dan pembajakan. Ancaman non-konvensional secara skala memang tidak sebesar ancaman perang. Namun, dari segi dampak yang ditimbulkan, ancaman non-konvensional dapat sangat mengganggu stabilitas politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Beragamnya bentuk ancaman non-konvensional serta potensi untuk dilakukan secara lintas batas negara membuat persoalan keamanan ini sulit untuk diselesaikan tanpa menjalin kerjasama dengan negara yang berbatasan langsung atau negara lain dalam satu kawasan.¹

Setelah berakhirnya Perang Dingin, komunitas internasional mulai melibatkan diri dalam upaya menciptakan keamanan melalui penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, terhadap harkat dan martabat manusia, serta mendorong terciptanya keseimbangan sosial dan ekonomi melalui pengembangan manusia secara berkesinambungan. Kemunculan komunitas internasional sebagai salah satu pemecah persoalan dengan kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki telah menjauhkan asumsi realis yang melihat bahwa negara sebagai satu-satunya aktor utama dalam menyelesaikan perselisihan. Konsep keamanan tradisional tidak lagi mampu memberikan solusi yang ampuh untuk menghadapi tantangan permasalahan keamanan saat ini yang lebih

¹ Peter Chalk, *Grey Area Phenomena in Southeast Asia*, (Australia: Australian National University, 1997) Hlm.6

didominasi oleh konflik dalam negeri dan instabilitas kawasan pasca perang dingin, efektifitas pemikiran realis dalam menyelesaikan permasalahan keamanan suatu negara kembali dipertanyakan. Dahulu, negara berada pada suatu keadaan dimana perang menjadi suatu bentuk instrumen kebijakan yang paling efektif. Saat ini kita menyimak mayoritas negara-negara di dunia khususnya negara kawasan lebih berfokus kepada upaya peningkatan stabilitas kawasan dengan menggunakan pendekatan kerjasama ketimbang memilih langkah ofensif melalui jalan perang, invasi atau penggunaan instrumen militer dalam skala besar dalam menanggapi suatu ancaman keamanan baik berupa ancaman tradisional maupun non-tradisional.

Kawasan Amerika Latin merupakan salah satu kawasan yang memiliki persoalan keamanan non-tradisional yaitu berupa ancaman penyelundupan senjata kecil (*small arms trafficking*). Kawasan ini merupakan wilayah yang paling tinggi angka kematian akibat penggunaan jenis senjata kecil dan ringan di dunia. Terhitung sebesar 42% dari total angka kematian dunia akibat jenis senjata kecil dan ringan terjadi di kawasan ini.² Salah satu negara yang memiliki tingkat penyelundupan senjata kecil yang tinggi di kawasan ini adalah Kolombia.

Senjata-senjata yang dimiliki oleh para kelompok pemberontak di Kolombia mayoritas berasal dari pasar gelap internasional. Karakter dari pola penyelundupan senjata ke Kolombia adalah dengan menyelundupkannya dalam jumlah yang sedikit namun dengan frekuensi pengiriman yang tinggi. Para penyelundup menggunakan semua moda transportasi dan jalur yang bervariasi untuk menyelundupkan senjata. Para penyelundup sangat diuntungkan dengan posisi geografis Kolombia yang unik. Kolombia merupakan jembatan penghubungan antara Amerika Tengah dan Amerika Utara, dan memiliki pantai yang luas di wilayah Laut Karibia dan Samudera Pasifik serta berbatasan langsung dengan Venezuela, Ekuador, Panama, Brazil, dan Peru. Penyelundupan senjata umumnya dilakukan melalui jalur darat, melewati lima batas negara, terutama batas Kolombia-Venezuela dan Kolombia-Ekuador. Jalur kedua adalah melalui jalur laut yaitu melalui Laut Karibia dan Samudera Pasifik. Jalur ketiga

² Ilona Szabo de Carvalho, "SALW Epidemics in Latin America- A Challenge to human Security," diakses dari <http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd57/szabo2.pdf> pada tanggal 06 September 2008 Pukul 14.00 WIB.

melalui jalur udara dengan estimasi sekitar 50% penyelundupan senjata via udara adalah melalui perbatasan Kolombia-Brazil-Peru-Ekuador.

Jalur Kolombia-Panama merupakan jalur utama masuknya senjata ilegal ke Kolombia baik melalui jalur darat maupun laut yang berasal dari AS, Eropa, Asia, maupun Timur Tengah. Jalur El Salvador Honduras, Nicaragua, Costa Rica dan Panama menyumbang sekitar 36% dari total senjata yang ada di Kolombia.

Berbeda dengan Panama, arus perlintasan orang dan barang di perbatasan Kolombia-Ekuador lebih bersifat dinamis dan konstan. Hal ini disebabkan oleh tersedianya akses jalan tol dan akses-kses darat di perbatasan sepanjang 586 km. Jalur ini merupakan jalur perdagangan resmi, Namun rentan akan munculnya perdagangan ilegal. Jalur ini merupakan penyuplai utama kebutuhan bahan peledak kelompok gerilyawan FARC.

Seperti di Ekuador, arus barang dan manusia di perbatasan ini juga bersifat dinamis dan konstan terutama di kawasan utara di sepanjang batas kota Cucuta(Kolombia) dan San Cristobal (Venezuela). Venezuela merupakan negara kedua terpenting dalam hubungan dagang setelah AS. Perbatasan ini memberikan celah yang cukup banyak untuk melakukan penyelundupan karena perbatasan ini merupakan perbatasan terpanjang dengan Kolombia.

Jalur Kolombia-Brazil tidak memungkinkan penggunaan akses darat untuk pertukaran barang atau manusia. Jalur air dan udara menjadi pilihan utama dalam proses arus barang dan manusia baik legal maupun ilegal. Barang-barang ilegal yang masuk ke Kolombia melalui jalur ini berupa senjata, amunisi dan bahan peledak. Jalur Kolombia-Peru menjadi akses masuk senjata-senjata buatan Peru sejenis senjata serbu HK-G3, senapan mesin FN MAG Kaliber 7.62, dan detonator dan peledak elektrik.³

Fenomena penjagaan dan pengawasan barang-barang gelap seperti narkoba dan senjata oleh pihak keamanan menjadi pemandangan sehari-hari di Kolombia. Senjata-senjata selundupan ini telah menjadi ancaman tidak hanya bagi keamanan Kolombia tetapi juga keamanan global. Senjata-senjata tersebut

³ UN Office on Drugs and Crime "Violence, Crime, and Illegal Arms Trafficking in Kolombia," Diakses dari www.unodc.org/pdf/Columbia_Dec06_en.pdf pada tanggal 17 Desember 2008, pukul 21.00 WIB.

mendorong tingginya angka konflik bersenjata di Kolombia yang mengancam rasa aman warganya. Kelompok-kelompok kriminal, gerilyawan sayap kiri, dan paramiliter sayap kanan telah melakukan penyelundupan senilai puluhan juta dolar dalam bentuk senjata ilegal.

Pada dasarnya Kolombia memiliki aturan yang ketat mengenai kepemilikan senjata namun kenyataan di lapangan berbeda. Senjata dengan jenis yang bervariasi dapat dengan mudah ditemukan di pasar gelap dengan harga terjangkau. Setidaknya ada tiga juta senjata ilegal di negara yang terdiri dari 43 juta jiwa. Kebanyakan senjata berasal dari kartel-kartel narkotik dan kelompok pemberontak lain. Senjata-senjata tersebut merupakan hasil dari pertukaran dengan kokain. Menteri pertahanan Kolombia mengatakan bahwa permasalahan senjata dan narkotika tidak hanya menjadi ancaman bagi keamanan Kolombia tetapi juga Amerika Latin dan Amerika Serikat.⁴

Beragamnya aktor yang terlibat dalam persoalan penyelundupan senjata di Kolombia ini tidak memungkinkan persoalan tersebut diselesaikan oleh hanya satu aktor atau pemerintah sendiri melainkan perlunya kerjasama dari negara-negara di kawasan Amerika Latin. Urgensi keterlibatan negara-negara kawasan Amerika Latin sebagai bagian dari *problem solver* dalam persoalan ini juga disebabkan oleh sifat persoalan yang *borderless* sehingga beresiko menyebarkan konflik melintasi batas negara. Meskipun permasalahan di Kolombia tidak selalu disebabkan oleh bermasalahnya negara-negara di kawasan Amerika Latin, namun bisa dipastikan Kolombia telah dipersepsikan sebagai negara yang bermasalah baik di tataran domestik, regional maupun internasional. Dorongan untuk dilakukannya perubahan dalam perlakuan HAM, pelestarian lingkungan, ketidaksiapan untuk mengintegrasikan diri secara seimbang dalam proses globalisasi, pemindahan manusia dengan menggunakan kekerasan, penanggulangan obat terlarang dan senjata ilegal menjadi agenda internasional yang searah dengan agenda yang harus dilakukan oleh pemerintah Kolombia untuk mengatasi persoalan keamanan di negaranya.

⁴ Reese Erlich "Blood, Drugs, and Guns Arms Trafficking Fuels Chaos," Diakses dari http://vps.stanleyfoundation.org/initiatives/un21/resources/securitycheck/illegal_arms.php pada tanggal 3 Maret 2009 pukul 14.00 WIB.

Konflik yang terus menerus terjadi telah memberikan dampak yang bersifat lintas batas sehingga menimbulkan reaksi negara tetangga yang mulai menyuarakan perlunya segera diambil tindakan bersama atas persoalan berkepanjangan yang terjadi dan meluas di Kolombia. Ketidakamanan kawasan yang didorong oleh konflik berkepanjangan telah melahirkan berbagai macam inisiatif. Pemerintah Kolombia telah mengusulkan dibentuknya suatu kerjasama bilateral dan multilateral untuk menyelesaikan permasalahan. Salah satu hasil dari inisiatif yang direalisasikan adalah berdirinya The Andean Community (CAN) yang juga akan menjadi pembahasan utama dalam skripsi ini. CAN merupakan suatu komunitas internasional yang dibentuk oleh empat negara pendiri yaitu Kolombia, Bolivia, Ekuador, dan Peru.

Pertemuan CAN telah menghasilkan suatu pendekatan sistematis bagi kebijakan keamanan Andean yang terformulasi dalam *Lima Declaration* yang diadakan pada bulan November 2001. Pendekatan ini terbentuk dalam suatu kerangka upaya untuk memberantas penyelundupan senjata, beberapa negara berupaya untuk mengurangi anggaran pertahanan, pertukaran informasi intelejen, aksi multilateral, pembangunan dan koordinasi perbatasan. Untuk mendukung program ini sebesar US\$458.8 juta telah disalurkan dari dana bantuan AS untuk membantu negara-negara yang terkena dampak dan sebesar US\$697 juta sudah disetujui oleh kongres untuk program Regional Andean Initiative tahun 2004. Dengan munculnya CAN, Kawasan Amerika Latin memulai suatu pendekatan baru dengan mengedepankan langkah kolektif untuk menyelesaikan persoalan keamanan negara-negara di kawasan Andean pada umumnya dan Kolombia pada khususnya terkait dengan persoalan penyelundupan senjata. Bentuk langkah nyata yang dilakukan oleh CAN terkait dengan isu Penyelundupan senjata adalah dengan disepakatinya *Decision 552: Andean Plan to Prevent, Combat and Eradicate Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in all its Aspects*, sebagai hasil dari pertemuan kesebelas para menteri luar negeri dari negara pendiri CAN pada bulan Juni tahun 2003.

Kompleksitas persoalan penyelundupan senjata yang dihadapi oleh negara-negara Andean pada umumnya dan Kolombia pada khususnya telah menjadi perhatian Andean Community dengan dikeluarkannya *Decision 552*,

namun tanpa memperhatikan implementasinya maka kebijakan tersebut tidak akan mampu mengatasi persoalan penyelundupan senjata. Untuk itu skripsi ini ditujukan untuk melihat bagaimana implementasi dari Decision 552 sebagai salah satu langkah konkrit dari peran Andean Community dalam menghentikan persoalan penyelundupan senjata. Analisa proses, aktor, dan dampak yang dihasilkan dari implementasi kebijakan dengan menggunakan pisau analisa konsep dalam ilmu hubungan internasional akan menunjukkan arah dan tingkat keberhasilan dari kebijakan tersebut.

1.2 Rumusan Permasalahan

Dengan disepakatinya Decision 552, maka arah pergerakan CAN dalam konteks pemberantasan Penyelundupan senjata di kawasan Andean sudah memiliki panduan yang tetap. Tetapi, layaknya suatu kebijakan, proses implementasinya tidak semudah memutuskan kebijakan itu sendiri, oleh karena itu, pertanyaan permasalahan dari skripsi ini adalah **Bagaimana implementasi upaya Andean Community dalam menghentikan Penyelundupan senjata di Kawasan Andean dari tahun 2003-2008: studi kasus Kolombia?** Untuk meneliti upaya Andean Community penulis akan menganalisa dokumen Decisión 552⁵ yang merupakan hasil dari pertemuan menteri luar negeri negara-negara yang tergabung dalam Andean Community dalam menghadapi persoalan Penyelundupan senjata di Kawasan Andean.

1.3 Kerangka Konsep

Skripsi ini dibangun dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sebagaimana dijelaskan oleh Creswell, penelitian kualitatif bersifat induktif dimana penelitian tidak ditujukan untuk membuktikan suatu teori sehingga tidak dibatasi oleh adanya teori. Dalam penelitian kualitatif, teori merupakan hasil dari penelitian yang didapat dari proses pengumpulan informasi/data.⁶ Disisi lain, penggunaan kerangka konsep menurut Miles dan huberman menjelaskan tentang dimensi utama kajian seperti faktor-faktor utama atau variabel dan asumsi awal

⁵ Dokumen Terlampir

⁶ John W. Creswell, *Research Design Qualitative and Quantitative Approach*, (London: Sage Production, 1994) hlmn.93-94.

mengenai hubungan dari kedua-duanya yang dijelaskan dalam bentuk grafik maupun narasi.⁷

Dalam mengkaji permasalahan ini, ada tiga konsep yang muncul yaitu konsep integrasi, konsep rezim internasional dan konsep keamanan non tradisional. Ketiga konsep ini akan dianalisa dan dilakukan formasi konsep untuk menemukan pola implementasi peran Andean Community.

1.3.1 Konsep Integrasi

Integrasi menurut Ernst Haas didefinisikan sebagai suatu proses dimana aktor-aktor politik dari beberapa negara yang berbeda didorong untuk menggeser tingkat loyalitas, perkiraan, dan kegiatan politiknya menuju suatu pusat baru dimana institusi tersebut memiliki proses atau menuntut suatu yurisdiksi yang lebih tinggi dari negara (Haas 1958:16). Pengertian ini luas dan perlu didefinisikan kembali yang meliputi baik proses sosial (pergeseran loyalitas) maupun proses politik (negosiasi dan pembuatan kebijakan mengenai pengembangan institusi politik yang baru yang tingkatannya berada diatas negara anggota atau setidaknya diatas kepentingan negara-negara anggota.⁸

Integrasi sudah sejak lama menjadi aspirasi dari para elit politik negara-negara di kawasan Amerika Latin. Gelombang pertama munculnya inisiatif integrasi dimulai pada tahun 1960-an sebagai suatu usaha untuk mendorong industrialisasi dibawah masa Comision Economica para America Latina (CEPAL, Economic Commission for Latin America, ECLA) dan terinspirasi oleh Traktat Roma yang telah mendorong terbentuknya Komunitas Ekonomi Eropa pada tahun 1958. Usaha integrasi yang pertama kali dilakukan adalah pembentukan *Asociacion LatinoAmericana de Libre Comercio* (ALALCA) semacam kawasan perdagangan bebas Amerika Latin. Organisasi berhasil merangkul 10 negara di Amerika Latin dan Mexico.

⁷ *Ibid.*, hlm. 97

⁸ Thomas Diez dan Antje Wiener, "Introducing the Mosaic of Integration Theory: Its Past, Present and Future," diakses dari <http://www.uni-muenster.de/Politikwissenschaft/Doppeldiplom/docs/IntT.pdf>, pada tanggal 20 Februari 2009 Pukul 20.00 WIB.

Karena frustrasi oleh kemajuan yang sangat terbatas di bawah organisasi ALALCA, negara-negara Andean membentuk Grupo Andino yang merupakan cikal bakal terbentuknya Andean Community dengan negara pendirinya adalah Bolivia, Chile, Kolombia, Ekuador dan Peru dengan Venezuela yang bergabung pada tahun 1973.

Terdapat beberapa klasifikasi dari kajian integrasi sebagaimana digambarkan oleh Deutsch yang berfokus pada kawasan Atlantik Utara sebagai wilayah yang paling kondusif untuk membentuk suatu komunitas. Syarat suatu integritas yang paling sederhana digambarkan oleh Deutsch adalah tidak adanya penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan suatu konflik. Suatu kawasan yang telah memenuhi kriteria ini maka bisa dikatakan telah terintegrasi atau telah terbentuk suatu komunitas keamanan. Syarat terbentuknya suatu komunitas yang erat adalah apabila memenuhi dua kriteria utama yaitu: (1). Kesamaan nilai-nilai utama antara sub-unit komunitas yang penting dalam pembangunan komunitas. (2). Adanya bentuk saling tanggung jawab yang membutuhkan komunikasi yang berkesinambungan diantara anggota komunitas.⁹ Deutsch juga berpendapat bahwa komunitas keamanan sebaiknya diterapkan dalam suatu sekumpulan orang atau kolektif yang terintegrasi pada suatu tujuan bahwa mereka tidak saling berperang satu sama lain¹⁰

Tidak semua wilayah bisa dikategorikan sebagai kawasan yang terintegrasi. Begitu juga tidak semua wilayah terintegrasi didasari oleh pengalaman konflik. Frekuensi konflik memang dijadikan acuan untuk mengklasifikasikan hubungan antar negara-negara Eropa selama tiga abad. Tetapi, keadaan damai negara-negara di kawasan Atlantik Utara juga terbukti mampu menciptakan suatu wilayah yang terintegrasi. Dalam hal ini, Deutsch memberikan suatu ukuran agar suatu wilayah bisa dikatakan terintegrasi. Ukuran tersebut bisa dikatakan sebagai pendekatan kedua dalam mengukur integrasi. Integrasi bisa diukur dengan menggunakan intensitas transaksi. Hal ini ditekankan oleh Deutsch dalam memperhatikan suatu komunitas yang berarti bahwa suatu negara harus

⁹ Karl Deutsch, "Political Community and the North Atlantic Area," (Princeton: Princeton University Press, 1957) Hlm 44-53 dalam Roger W. Cobb/Charles Elder, *International Community: A Regional and Global Study*, (New York: Holt, Rinehart, and Winston, Inc). Hlm. 14

¹⁰ Andrew Hurrell, "An Emerging Security Community in South America," dalam Emanuel Adler dan Michael Barnett, *Security Communities*, (London: Cambridge University Press, 1998) hlm. 260

memberikan respon dengan cepat dan dengan langkah yang variatif terhadap kebutuhan negara lain. Russett berasumsi bahwa transaksi dapat juga berfungsi sebagai alat untuk menentukan kemampuan reaksi suatu negara. Gagasan ini mengira bahwa semua anggota komunitas memiliki dua karakteristik: (1). Setiap anggota komunitas harus memiliki kemampuan untuk bertindak yang bergantung pada kekayaan, sumberdaya alam, birokrasi administrasi yang terjangkau. (2). Tingkat frekuensi komunikasi dengan negara lain dengan berbagai macam indikator seperti perdagangan atau pariwisata.

Pendekatan ketiga melihat aspek yang juga menjadi dasar pembentukan suatu komunitas. Aspek tersebut berfokus kepada sikap dan persepsi kelompok-kelompok berpengaruh yang ada di dalam suatu negara. Menurut E. Haas, cara pandang orang yang memiliki peran penting dalam pembuatan kebijakan akan menentukan berhasil tidaknya upaya integrasi kawasan. Lindberg juga berpendapat bahwa integrasi akan tercapai hanya jika elit pemerintah suatu negara telah memiliki pandangan yang luas dalam menyelesaikan persoalan.

Pendekatan keempat melihat integrasi yang berfokus kepada institusi dari kerjasama tersebut. Fokus ini menekankan pada adanya kekuatan mempengaruhi yang dimiliki oleh organisasi supranasional terhadap negara anggota. Dalam hal ini E. Haas berpendapat bahwa ada suatu derajat otonomi yang harus diberikan kepada sekretariat agar bisa memaksimalkan langkah kerja yang bersifat kolaboratif. Keadaan ini akan mendorong terciptanya kesepakatan-kesepakatan baru yang penting dalam menciptakan suatu kerjasama regional maupun internasional yang damai.

1.3.2 Konsep Rezim Internasional

Rezim merupakan suatu fenomena penting dan meluas dalam ilmu hubungan internasional. Definisi mengenai rezim telah banyak disampaikan oleh banyak akademisi salah satunya adalah seperti yang disampaikan oleh Stephen Krasner. Rezim internasional menurut Krasner didefinisikan sebagai sekumpulan prinsip, norma, aturan dan prosedur pengambilan keputusan baik yang implisit maupun eksplisit dimana harapan-harapan setiap aktor yang terlibat bertemu dalam suatu wilayah yang sudah tersedia dalam hubungan internasional. Kata

sekumpulan menunjukkan bahwa rezim bukan suatu hal yang tunggal melainkan bisa dalam bentuk instrumen yang beragam. Kata implisit dan eksplisit menunjukkan ada dua elemen dimana norma dan prinsip merupakan sesuatu yang implisit sementara aturan dan prosedur merupakan sesuatu yang eksplisit. Prinsip merupakan kepercayaan akan suatu fakta, penyebab, dan kejujuran. Norma adalah standar dari suatu perilaku yang didasarkan pada pemenuhan hak dan kewajiban. Aturan adalah suatu petunjuk atas suatu tindakan. Prosedur pembuatan keputusan adalah suatu rangkaian aksi yang berlaku dalam membuat, menentukan dan mengimplementasi suatu pilihan kolektif.¹¹ Sumber dari suatu keteraturan tidak perlu harus eksplisit untuk bisa diterapkan begitu juga dengan rezim yang tidak harus selalu menjadi formal untuk bisa memiliki pengaruh dalam tindakan yang dilakukan negara.

Rezim internasional bisa dilihat dalam beberapa wilayah isu dalam politik dunia mulai dari pencapaian kesepakatan sampai pada penciptaan struktur hubungan diantara negara-negara atau mulai dari penciptaan prosedural dalam organisasi internasional sampai pada sekumpulan pemahaman yang muncul dari gagasan-gagasan yang tertuang oleh setiap negara. Seiring dengan perkembangannya, Rezim Internasional merupakan alat dimana aktor negara dan non-negara bersama mengatur suatu area kehidupan global yang memiliki konsekuensi lintas batas negara. Sebagai wilayah umum, rezim internasional memiliki karakter yang diturunkan disatu sisi dari kesempatan yang mereka sediakan untuk melakukan dialog, dan disisi lain dari cara mereka mengatur suatu area hubungan internasional dan sifat anarki yang secara tradisional terkait dengan praktek politik global. Rezim internasional terletak pada suatu wilayah publik dimana kepentingan dan identitasnya ditetapkan telah membentuk suatu formasi baru komunitas politik yang bersifat lintas batas untuk masuk dalam suatu wilayah isu politik global.¹²

¹¹ Hidetaka Yoshimatsu, "International Regime, International Society, and Theoretical Relation," diakses dari <http://www.icsead.or.jp/7publication/workingpp/wp1998/98-10.pdf> pada tanggal 22 Februari 2009 pukul 09.00 WIB.

¹² Nayef H. Samhat, "International Regime s and the Prospect to Global Democracy," diakses dari http://diplomacy.shu.edu/journal/new/pdf/VolVINo1/14_Samhat.pdf, pada tanggal 22 Februari 2009 pukul 09.00 WIB.

Negara dianggap sebagai suatu aktor yang penting dan selalu berupaya untuk memaksimalkan kepentingan mereka dalam dunia internasional yang anarkis. Rezim tidak akan berperan pada isu dimana suatu negara mampu secara unilateral menyelesaikan persoalannya, sebaliknya rezim hadir untuk mengatasi suatu dilema persoalan bersama dengan melakukan koordinasi atas perilaku setiap negara. Meskipun negara cenderung terus memaksimalkan upaya mencapai kepentingannya, namun dalam kerangka rezim, mereka menciptakan suatu format untuk mengontrol pemenuhan kepentingan sendiri. Keadaan ini menunjukkan bahwa rezim membantu dalam menciptakan suatu kerjasama meskipun berada dalam sistem dunia yang anarkis.

Instrumen rezim yang formal dan terlihat adalah aturan tertulis yang dikeluarkan dan prosedur pengawasan dalam menimbang dan memutuskan suatu perselisihan. Mekanisme pengawasan dari rezim sering merupakan bentuk instrumen dari keputusan bersama yang bersifat normatif. Instrumen ini bereaksi terhadap perubahan *power, material forces*, dan kepentingan; terhadap perubahan interdependensi dan dinamika penduduk; dan terhadap perubahan pasar. Rezim juga bereaksi atas perubahan tangan-tangan sosial dalam beberapa hal instrumen juga dapat menjadi hasil dari kerangka normatif suatu rezim. Dalam suatu rezim, aktor yang terdefinisikan adalah negara namun batasan ini tidak pernah secara pasti ditetapkan.

1.3.3 Konsep *Small Arms Trafficking*

Small arms trafficking atau penyelundupan senjata kecil adalah salah satu isu keamanan non tradisional yang merupakan fenomena transnasional. Garis pemisah antara perdagangan senjata resmi dengan ilegal terkadang tidak kentara akibat minimnya peraturan internasional yang mengikat secara ketat. Senjata ilegal umumnya merupakan perluasan dari persoalan yang menyangkut eksploitasi sumber daya seperti kayu, berlian, narkoba, dan bahan berharga lain yang menimbulkan konflik dan korupsi. Para makelar senjata ilegal ini dapat melakukan aktifitasnya karena mereka mampu mengelak dari pengawasan senjata negara, embargo senjata internasional, dan mendapatkan perlindungan dari aparat pemerintah.

Rachel Stohl seorang analis senior dari pusat informasi pertahanan menyebutkan sepuluh langkah spesifik yang bisa dilakukan dalam rangka menghentikan aksi penyelundupan senjata ilegal.¹³ Pertama, untuk mencegah jatuhnya senjata tersebut ke tangan terlarang, pemerintah harus menerapkan embargo senjata regional dan internasional. Didalamnya harus terbentuk unit embargo senjata yang bertugas melakukan pengawasan pemenuhan kebutuhan, pengawasan pelaksanaan dan penetapan ukuran sanksi bagi para pelanggar.

Kedua, untuk memastikan kemampuan untuk merunut senjata hingga ke sumbernya, maka harus tercipta suatu sistem bersama baik regional maupun internasional untuk menandai dan menjejaki keberadaan senjata. Dibawah peraturan internasional saat ini, pemerintah menerapkan cara yang berbeda-beda untuk menandai senjatanya. Dengan adanya perjanjian yang baru, diharapkan setiap negara memiliki standar yang sama untuk memudahkan proses identifikasi senjata.

Ketiga, untuk mengakhiri kekebalan hukum para makelar senjata, maka negara harus mengadopsi suatu perjanjian internasional atau sekurang-kurangnya ketetapan bersama terkait dengan praktek makelar senjata. Tidak seragamnya aturan internasional dalam isu ini memungkinkan para makelar berpindah-pindah untuk menghindari jeratan hukum negara tertentu.

Keempat, perlunya dibentuk suatu aturan atau kesepakatan dalam hal kriteria ekspor senjata agar senjata tersebut tidak jatuh ke tangan para pelanggar HAM. Kriteria tertentu yang disepakati internasional dalam mengekspor senjata akan efektif untuk melindungi senjata tersebut jatuh ke pasar gelap.

Kelima, pemerintahan negara khususnya negara-negara eksportir senjata harus memperkuat *end-user regulation* untuk mencegah kehilangan jejak dari keberadaan senjata dan mencegah jatuhnya senjata ke pasar gelap. Keenam, perlunya infrastruktur yang tersistemasi dan terlindungi dengan baik untuk penyimpanan senjata. Banyak negara tidak memiliki sistem penyimpanan senjata yang aman sehingga sering sekali mengalami kebocoran senjata. Disamping itu

¹³Rachel Stohl, "Fighting the Illicit Trafficking of Small Arms", diakses dari <http://www.cdi.org/program/document.cfm?DocumentID=2996> , pada tanggal 9 Februari 2009 pukul 13.00 WIB

perlu juga pemberian pelatihan militer dan penegakan hukum kepada personil untuk mencegah pencurian dan kesalahan dalam memelihara persediaan senjata.

Ketujuh, untuk memastikan bahwa senjata yang tidak terpakai lagi oleh pemerintah tidak jatuh ke tangan pihak yang salah, maka harus ada mekanisme penghancuran senjata kelebihan produksi atau usang. Kedelapan, untuk menangkap dan mengadili para penyelundup senjata, pemerintah dan institusi di tingkat nasional, regional dan internasional harus bekerjasama dan saling bertukar informasi. Seluruh institusi pemerintah meliputi penegak hukum, penjaga keamanan perbatasan, dan petugas bea cukai harus bekerjasama untuk mengidentifikasi dan memusnahkan jalur penyelundupan dan menangkap oknum penyelundupan.

Kesembilan, pemerintah harus memperluas wawasan tentang senjata kepada individu baik militer maupun sipil untuk menghindari upaya penjualan senjata ke pasar gelap. Pemerintah harus secara rajin menghitung jumlah simpanan senjata. Disamping itu, pemilik senjata juga harus segera memberitahukan kepada pihak yang berwenang. Kesepuluh, pada bagian ini yang diperlukan adalah upaya negara dalam menghentikan produksi senjata rakitan yang dilakukan di dalam suatu negeri dan mencegahnya masuk ke pasar gelap.

1.4 Formasi Konsep

Tabel 1.1
Formasi Konsep

Konsep Rezim dan Integrasi	Small Arms Trafficking	Act 1	Act 2	Act 3	Act 4	Act 5	Act 6	Act 7	Act 8	Act 9	Act 10
V1: Kesamaan Nilai & Komunikasi											
V2: Intensitas Interaksi											
V3: Persepsi negara dan Kelompok internal											
V4: Derajat otonomi Institusi											

Keterangan:

Garis axis adalah sepuluh langkah spesifik yang disarankan oleh Rachel Stohl.

Action 1: Embargo senjata regional dan internasional. Didalamnya harus terbentuk unit embargo senjata yang bertugas melakukan pengawasan pemenuhan kebutuhan, pengawasan pelaksanaan dan penetapan ukuran sanksi bagi para pelanggar.

Action 2: menciptakan suatu sistem bersama baik regional maupun internasional untuk menandai dan menjejaki keberadaan senjata. Dengan adanya perjanjian yang baru, diharapkan setiap negara memiliki standar yang sama untuk memudahkan proses identifikasi senjata.

Action 3: mengadopsi suatu perjanjian internasional atau sekurang-kurangnya ketetapan bersama terkait dengan praktek makelar senjata.

Action 4: Membentuk peraturan atau kesepakatan dalam hal kriteria ekspor senjata agar senjata tersebut tidak jatuh ke tangan para pelanggar HAM. Kriteria

tertentu yang disepakati internasional dalam mengekspor senjata akan efektif untuk melindungi senjata tersebut jatuh ke pasar gelap.

Action 5: negara memperkuat pengawasan terhadap pengguna senjata

Action 6: pembentukan infrastruktur yang sistematis dan terlindungi dengan baik untuk penyimpanan senjata dan pemberian pelatihan militer dan penegakan hukum kepada personil.

Action 7: ditetapkannya mekanisme penghancuran senjata kelebihan produksi atau usang.

Action 8: Pemerintah dan institusi di tingkat nasional, regional dan internasional harus bekerjasama dan saling bertukar informasi. Seluruh institusi pemerintah meliputi penegak hukum, penjaga keamanan perbatasan, dan petugas bea cukai harus bekerjasama untuk mengidentifikasi dan memusnahkan jalur penyelundupan dan menangkap oknum penyelundupan.

Action 9: pemerintah harus memperluas wawasan tentang senjata kepada individu baik militer maupun sipil untuk menghindari upaya penjualan senjata ke pasar gelap.

Action 10: menghentikan produksi senjata rakitan.

Penjelasan:

Tabel 1.1 menunjukkan menunjukkan bahwa langkah-langkah spesifik yang disarankan oleh Stohl itu searah dengan konsep rezim dan integrasi. Dalam hal ini setiap aspek normatif dari konsep rezim dan integrasi terwakili dalam bentuk langkah teknis dalam upaya menghentikan aksi penyelundupan senjata. Untuk itu maka penjelasan diatas menghasilkan dua hipotesa:

Hipotesa pertama:

Peran Andean Community dalam mengatasi penyelundupan senjata sangat relevan dengan formasi konsep dimana pada tataran normatif ada nilai-nilai kerjasama yang ingin dibentuk yang mengarah kepada penyelesaian bersama atas persoalan keamanan negara-negara Andean.

Hipotesa kedua:

Pada tataran praktis, upaya yang dilakukan tidak lagi menggunakan pendekatan negara sebagai *unitary actor* melainkan lebih mengedepankan keterlibatan aktor-aktor lain baik negara, maupun institusi regional dan internasional.

1.5 Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai perubahan karakter dan perubahan konteks *small arms trafficking* dijelaskan oleh Kim Cragin dan Bruce Hoffman. Small Arms Trafficking (SAT) merupakan perkembangan isu keamanan internasional. Pola akuisisi senjata, jalur penyelundupan, serta kekerasan yang terjadi di Kolombia menggambarkan bagaimana semua itu terjadi didalam konteks global. SAT kini bisa dilihat sebagai suatu variabel independen seperti halnya pengedaran narkoba atau penyelundupan manusia yang telah berkontribusi terhadap suatu konflik dan berpotensi besar menimbulkan ketidakstabilan.

Selama Perang Dingin SAT telah menjadi *tool* bagi dua negara adidaya AS-Soviet dalam memperebutkan kekuasaan di kawasan. Pengiriman senjata menjadi suatu cara untuk membangun kekuatan pendukung serta dukungan untuk melancarkan agenda perluasan ideologi. Jalur SAT pada masa itu bisa ditelusuri melalui tiga jalur utama yaitu (1). Transfer senjata resmi antar negara (2). *proxy war* (3). Dukungan terhadap kelompok-kelompok perlawanan. Dimasa itu, SAT belum menjadi suatu permasalahan keamanan internasional melainkan merupakan aspek penting bagi keamanan nasional. Pasca PD II, terjadi perubahan konteks SAT yang ditandai oleh tiga faktor berikut: *Pertama*, Baik Amerika Serikat maupun Russia kini tidak lagi mendominasi pasar senjata kecil. Disisi lain, negara-negara Afrika, Asia, dan Amerika Latin yang sebelumnya merupakan

negara penerima bantuan senjata mulai muncul sebagai pemain baru dalam pasar senjata akibat peningkatan jumlah produksi jenis senjata kecil domestik yang kapasitasnya mampu memenuhi kebutuhan dalam dan luar negeri. Kedua, SAT kini menjadi bagian dari perluasan pasar global. Pada *Small Arm Survey* Juli 2001, PBB melaporkan bahwa terdapat lebih dari 600 perusahaan perakitan senjata di seluruh penjuru dunia. Jumlah ini merupakan tiga kali lipat jumlah perusahaan senjata di tahun 1980. Perluasan dan privatisasi pasar senjata ini merupakan komponen dari peningkatan ekonomi global. Kemudahan dalam memperdagangkan senjata serta kesulitan dalam menempuh jalur legal semakin menyuburkan praktek SAT secara ilegal. Ketiga, anggapan yang diberikan oleh organisasi-organisasi non pemerintah, organisasi bantuan internasional, serta para aktivis telah mengkotakkan SAT kedalam permasalahan HAM. Keadaan ini memunculkan argumen yang menyatakan bahwa permasalahan SAT tidak terletak pada ketersediaan senjata melainkan pada kesalahan dalam penggunaan senjata tersebut.

Periode pasca Perang Dingin telah menempatkan SAT ke dalam suatu isu keamanan internasional karena kemudahan akses terhadap senjata memungkinkan aktor non-negara menantang kekuatan dan wewenang negara. Lebih jauh lagi ketika aktor non-negara ini semakin kuat, maka jarang sekali perjuangan dalam merebut kekuasaan tersebut hanya terbatas didalam batas-batas negara umumnya mereka juga akan menyusun kekuatan pendukung di luar batas negara. Hal inilah yang membuat SAT menjadi isu keamanan internasional.

Keadaan ini tentu saja meningkatkan kompleksitas keamanan regional Amerika Latin. Selama bertahun-tahun, langkah militer selalu menjadi pilihan penyelesaian dalam kebijakan luar negeri di negara-negara Amerika Latin. Pada abad 20, kawasan Amerika Latin diwarnai oleh lebih dari 200 kasus dimana negara-negara ini terancam, atau menggunakan kekuatan militer untuk mengancam, atau menjadi subjek dari ancaman yang datang dari negara lain.

Kompleksitas keamanan kawasan Amerika Latin bisa dianalisa dalam tiga bagian penting, yaitu pada sektor internasional, regional dan domestik. Pada sektor internasional pengaruh AS terhadap kawasan ini sangat besar. AS tidak bisa menunjukkan penghormatan terhadap keinginan dari negara-negara di

kawasan Amerika Latin. Bagi AS, Amerika Latin termasuk ke dalam kawasan yang harus di masukkan ke dalam wilayah pengaruh AS. Negara adidaya ini memastikan bahwa tidak ada kekuatan atau pengaruh negara lain di kawasan tersebut. AS tidak akan pernah mengakui adanya kekuatan negara lain di kawasan ini. Setelah doktrin Monroe melalui Hay-Poncefort Treaty, AS merasa berhak untuk mempertahankan kekuasaannya di kawasan tersebut. Kepentingan AS dalam mempertahankan kepentingannya telah menghasilkan keamanan fundamental bagi negara-negara di kawasan Amerika Latin.

Pada level regional, kompleksitas permasalahan di terjadi pada persoalan konflik perbatasan. Banyak persoalan perbatasan yang telah diselesaikan baik dengan langkah diplomatik maupun militer. Bahkan sampai saat ini hampir setiap negara di kawasan Amerika Latin memiliki persoalan perbatasan dengan negara tetangganya. Salah satu permasalahan regional terkait dengan penyebaran senjata kecil di kawasan Amerika Latin adalah hampir setiap perbatasan negara yang berbatasan langsung dengan Kolombia memiliki jalur penyelundupan baik melalui darat, laut dan udara.

Pada level domestik, permasalahan konflik internal telah menggerogoti hampir negara-negara yang ada di kawasan Amerika Latin. Masalah kelompok pemberontak di Kolombia yang dibarengi dengan tingginya angka penyebaran narkotik dan senjata kecil menjadi contoh nyata kompleksitas permasalahan di kawasan Amerika Latin khususnya di level domestik.

Skripsi ini membahas secara khusus bagaimana upaya pemerintah dalam menghentikan persoalan *Small Arms Trafficking* di Kolombia. Tentu saja penyelesaiannya tidak mudah karena kompleksitas permasalahan baik pada tingkat domestik, regional maupun kawasan sebagaimana telah digambarkan diatas. Jatuhnya pilihan pada isu ini adalah karena belum adanya tulisan yang secara khusus berfokus pada masalah penyelundupan senjata kecil, padahal persoalan ini menjadi salah satu akar permasalahan yang mempengaruhi intensitas konflik di negara tersebut.¹⁴

¹⁴ David R. Mares, "Regional Conflict Management in Latin America: Power Complemented by Diplomacy," dalam David A. Lake, *Regional Orders Building Security in a new World*, Pennsylvania: The Pennsylvania University Press, Hlm 196-198.

1.6 Pengumpulan Data

Tahapan pengumpulan data menurut Creswell adalah menetapkan batasan kajian, mengumpulkan informasi melalui observasi, wawancara, dokumen, dan material visual, dan mengkaji informasi. Dalam mengidentifikasi batasan dalam mengumpulkan data, Miles dan Huberman mengelompokkan dalam empat parameter: ¹⁵ (1).*Setting* ; dalam mengerjakan skripsi ini, tempat pengumpulan data adalah perpustakaan UPDHI, Freedom Institute, Kedutaan Besar Kolombia, Lembaga Kajian serta media internet. (2).*The Actors*: sasaran wawancara akan ditujukan kepada para akademisi ahli kajian Amerika, praktisi, dan ekspatriat Kolombia. (3).*The Events*: Para actor akan diinterview mengenai persoalan penyelundupan senjata di Kolombia, Kebijakan Kolombia di perbatasan, Kebijakan arus barang dan manusia dari dan menuju Kolombia, Kebijakan Kolombia tentang produksi, distribusi, pemakaian, penyimpanan serta penghancuran senjata kecil, serta implementasi kebijakan. (4).*the Process*.

1.7. Analisis Data

Proses analisa data akan dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data, proses interpretasi data, penulis akan melakukan proses reduksi dan interpretasi data kemudian data tersebut akan diatur dalam beberapa pola, kategori, dan tema dengan sedapat mungkin menggunakan teori-teori interpretif dari komunitas yang diteliti. Komponen kedua ini sering disebut dengan operasional konsep dimana peneliti berusaha melakukan *re-contextualization* dan *de-contextualization* dilakukan untuk mencari rangkaian gejala yang tidak terkait dan karenanya mengaburkan makna atau gejala utama yang diteliti.

Proses analisa data kemudian dilanjutkan dengan membentuk presentasi-presentasi data yang akan memudahkan pembaca untuk memahami kompleksitas gejala yang diteliti. Presentasi data ini akan dilakukan dengan beragam cara untuk menunjukkan (1). Hubungan antara kategori-kategori yang muncul dari data, (2). Keterkaitan antara teori yang muncul dengan sumber data. Selanjutnya peneliti akan mengidentifikasi prosedur *coding* yang diperlukan untuk mereduksi

¹⁵ *Ibid.*, John W Creswell, hlm 148-149

informasi dalam berbagai tema dan kategori. Prosedur coding ini melibatkan berbagai proses pemilahan informasi, mengembangkan *coding categories*, dan menciptakan kategori, pola dan tema. Selanjutnya penulis akan menyebutkan metode analisa yang akan digunakan dalam melakukan analisa data.¹⁶

1.8 Rencana Pembabakan Skripsi

Skripsi ini akan terbagi dalam empat bab.

Bab 1 merupakan pendahuluan yang akan berisi latar belakang, rumusan permasalahan, kerangka konsep dan metodologi penelitian.

BAB 2 akan membahas tentang upaya Andean Community dalam menghentikan SAT. Bab 2 akan dibagi menjadi dua sub-bab yaitu 2a. pembahasan mengenai penyelundupan senjata kecil di kawasan Amerika Latin. Pada bagian 2b, akan dibahas mengenai proses terbentuknya Decision 552 Andean Community, bagaimana tarik menarik kepentingan antar negara.

Bab 3 berfokus pada implementasi Desicion 552 dalam menghentikan Penyelundupan senjata dilihat dari tataran normatif dan praktis. Pada bab 3 ini akan dilakukan kategorisasi atas temuan data yang dihasilkan dalam proses pengumpulan data

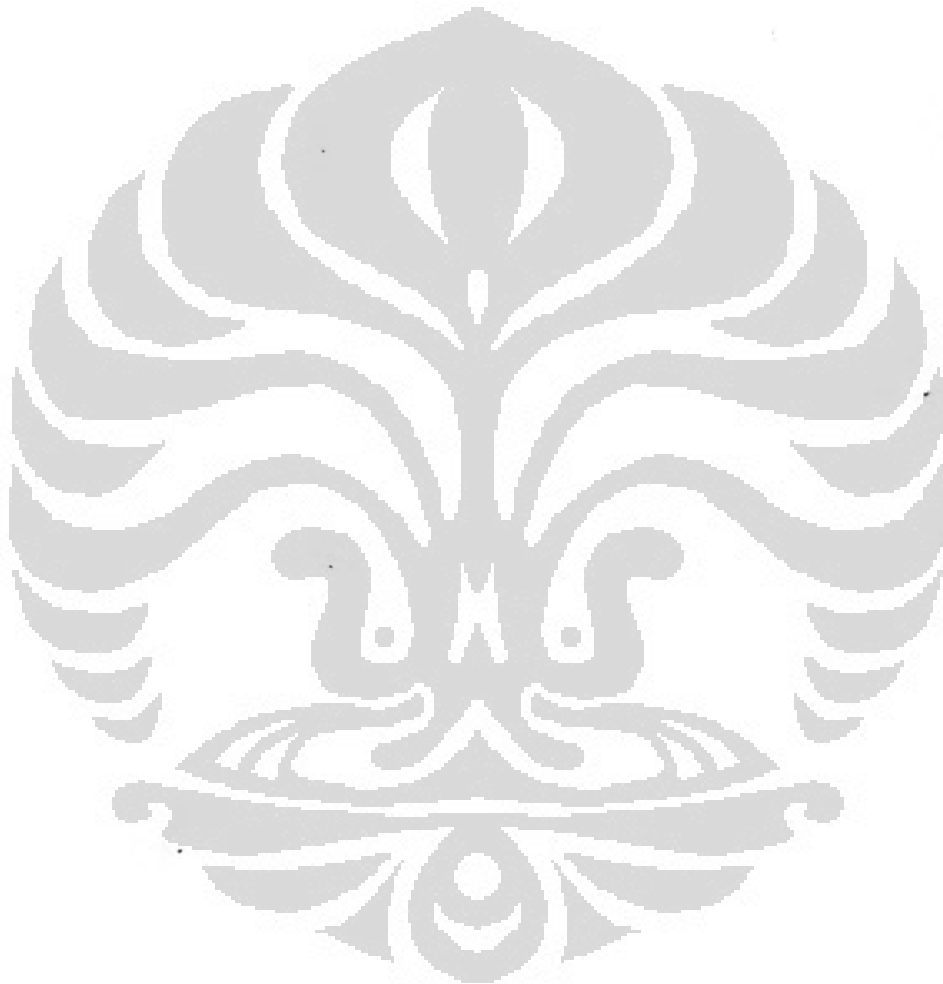
Bab 4 merupakan kesimpulan dan penutup.

1.9 Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan dan implementasi kebijakan sebagai peran Andean Community dalam menghentikan persoalan Penyelundupan senjata yang marak terjadi di kawasan Andean. Dengan melakukan studi kasus di Kolombia sebagai negara yang memiliki angka kasus Penyelundupan senjata yang tinggi, diharapkan mampu mengetahui pengaruh dari Andean Community dalam menghentikan persoalan penyelundupan senjata di Kolombia. Penelitian ini penting karena persoalan penyelundupan senjata di Kolombia merupakan isu yang mengakar dan melibatkan banyak actor baik eksternal maupun internal, baik actor negara maupun non-negara. Permasalahan penyelundupan senjata bukan semata-mata persoalan Kolombia saja. Persoalan ini

¹⁶ Andi Widjajanto, "Analisa Data Menurut Pendekatan Kualitatif," Modul MPS FISIP UI.

juga dihadapi oleh banyak negara khususnya negara yang dilanda konflik internal. Dengan berkaca kepada pengalaman Kolombia, terlepas upaya tersebut berhasil atau tidak, Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi pilihan kebijakan bagi para *policymaker* khususnya dalam menyelesaikan persoalan penyelundupan senjata.



BAB 2

UPAYA ANDEAN COMMUNITY DALAM MENGHENTIKAN SMALL ARMS TRAFFICKING DI AMERIKA LATIN

Bagian bab 2 dalam skripsi ini bertujuan untuk melihat dua hal penting yaitu mengenai dinamika SAT di Amerika Latin dengan membandingkan antara dinamika SAT kawasan dengan dinamika SAT di Kolombia. Tujuan membandingkan kedua tempat tersebut adalah untuk melihat secara lebih mendalam pola yang terbentuk sehingga bisa ditentukan apakah upaya untuk mengatasi SAT di Kawasan dan disatu negara bisa dilakukan dengan menggunakan formulasi kebijakan yang sama yaitu dengan menggunakan Decision 552 Andean Community. Dengan menarik titik persamaan tersebut maka akan bisa menentukan apakah Decision 552 Andean Community sebagai suatu kebijakan yang dibuat dalam kerangka regional bisa juga digunakan untuk tingkat domestik Kolombia. Pengamat urusan Amerika Latin menekankan bahwa ada hubungan yang kuat antara kebijakan domestik dan regional, hal ini menyebabkan tingginya determinan domestik dalam kebijakan luar negeri suatu negara.¹⁷

Pada subbab yang kedua penulis menampilkan *milestone* upaya pemerintah Kolombia pada khususnya dan negara-negara Andean Community pada umumnya dalam mengatasi persoalan SAT di kawasan maupun di dalam negeri sejak tahun 1993 hingga sampai terbentuknya Decision 552 Andean Community. Penulisan bab kedua ini bertujuan untuk menunjukkan tingkat komitmen dari pemerintah negara-negara di Kawasan Amerika Latin dalam mengatasi persoalan SAT dan menunjukkan tingkat kedewasaan dari kebijakan decision 552 itu sendiri.

2.1 Small Arms Trafficking di Amerika Latin

Dalam dinamika SAT di Amerika Latin , bisa dilihat terdapat empat titik persamaan antara permasalahan SAT di kawasan dan di wilayah domestik Kolombia. *Pertama*, Karakter geografis dari kedua kawasan sama-sama

¹⁷Werner J. Feld, *Comparative Regional System*. (New York: Pergamen Press. 1980) Hlm 322

merupakan wilayah yang memiliki banyak celah masuknya senjata ilegal. *Kedua*, Tingginya tingkat peredaran di kedua wilayah sama-sama dipengaruhi oleh kelbihan produksi senjata dan kebocoran industri senjata hingga menyebabkan masuknya senjata-senjata domestik ke pasar gelap. *Ketiga*, pada kedua kawasan sama-sama dipengaruhi oleh kekuatan adidaya AS. Pengaruh kedua negara ini bersifat positif dan negatif. Di satu sisi AS adalah negara yang mendorong pergerakan negara-negara Andean untuk mengambil langkah kolektif dalam menyelesaikan persoalan SAT yang berawal dari permasalahan narkoba. Disisi lain, AS merupakan salah satu pemasok besar senjata ke negara-negara di kawasan Amerika Latin, baik dalam bentuk bantuan militer, maupun senjata yang sengaja dimasukkan secara gelap untuk mendukung salah satu pergerakan senjata yang membawa kepentingan AS. *Keempat*, persoalan SAT dikedua kawasan sama-sama menyentuh aspek keamanan non-tradisional lain seperti pengedaran dan penyelundupan nakotika, kekerasan bersenjata, dan penindasan atas hak asasi manusia. Keempat hal diatas menjadi perhatian penting dalam mengamati dinamikan SAT ditingkat kawasan dan ditingkat domestik.

2.1.1 Dinamika Small Arms Trafficking di Kawasan Amerika Latin

Kekerasan yang disebabkan oleh penggunaan senjata kecil merupakan ancaman yang paling nyata terhadap keamanan penduduk yang tinggal di kawasan Amerika Latin. Setelah beberapa dekade berada pada masa tidak adanya kontrol penyebaran senjata yang beredar sekurang-kurangnya 45 – 80 juta pucuk senjata, kawasan ini dipenuhi oleh peredaran senjata yang digunakan secara bebas oleh individu dan kelompok dengan mayoritas menggunakan pistol, senjata serbu, granat, peluncur granat hingga rudal darat-udara yang bisa dibawa oleh 1-2 orang. Kematian yang diakibatkan oleh kekerasan bersenjata ini mencapai 73.000-90.000 jiwa orang-orang Amerika Latin yang berada pada kisaran umur 15-44 tahun sebagaimana dilaporkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO).¹⁸

¹⁸ Julia Goehsing, "A Multi-Pronged Approach to Transnational Criminal Networks: The Case of Latin America and The Carribean," diakses dari http://interamericanos.itam.mx/working_papers/11GOEHSING.pdf pada tanggal 10 April 2009, Pukul 19.30 WIB.

Senjata kecil mulai memasuki kawasan Amerika Latin saat Perang Dingin tepatnya pada saat terjadi perang sipil di wilayah Amerika Latin pada era 1980-an. Meskipun menggunakan cara dan jalur yang berbeda, namun semuanya memiliki peran sendiri dalam menyebarkan senjata kecil di kawasan Amerika Latin. Selama masa itu juga baik Amerika Serikat maupun Russia telah mempersenjatai negara-negara sekutunya di kawasan Amerika Latin dalam jumlah yang cukup besar. Fakta sejarah ini yang menunjukkan bahwa kedua negara adidaya tersebut turut memiliki tanggung jawab atas persoalan penyebaran senjata di kawasan Amerika Latin. Senjata Uni Soviet yang dilimpahkan ke Kuba telah mencapai Sandinistas di Nicaragua. Dalam merespon hal ini, AS juga mempersenjatai sekutunya dengan senjata. Untuk menutupi keterlibatannya, AS menggunakan senjata yang sama yang diberikan oleh Uni Soviet sehingga tidak terlihat bahwa AS juga turut serta dalam meningkatkan intensitas konflik bersenjata di Kawasan Amerika Latin. Perang AS terhadap narkoba di Kolombia tidak bisa dipisahkan dengan upaya AS untuk memerangi kelompok pemberontak di Kolombia.¹⁹

AS juga menggunakan negara ketiga seperti Israel dalam menyebarkan senjata di kawasan Amerika Latin. Contoh lain seperti Front pembebasan Farabundo Marti Nacional di El Salvador mendapatkan senjata AK-47 dari pihak militer Honduras yang mendapatkan pasokan penuh dari CIA di Nicaragua. Saat ini kebanyakan senjata yang diselundupkan kedalam Amerika Latin berasal dari Amerika Serikat, Eropa dan kawasan-kawasan kecil industri senjata maju. Karena kurangnya transparansi dalam perdagangan senjata internasional, sulit untuk mengetahui bagaimana jenis dan perkiraan dari kuantitas senjata yang diimpor oleh negara-negara di kawasan Amerika Latin.

Menurut data yang didapat dari *Norwegian Initiatives on Small Arms Transfer* pada tahun 2005, Amerika Latin telah secara legal telah mengekspor sekurang-kurangnya \$175 Juta senjata kecil dan ringan beserta amunisi dan suku cadang senjata. Amerika Serikat merupakan pemasok utama masuknya senjata tersebut ke wilayah Amerika Latin. Tercatat senilai 50 juta dolar angka ekspor senjata AS ke Amerika Latin Pemasok besar senjata juga berasal dari negara lain

¹⁹ Arlene B. Tickner, "From Counternarcotics to Counterterrorism in Colombia," *Current History Journal of Contemporary World Affairs*, Vol 102, 2003 Hlm 82

seperti Belgia, Republik Cheko, Jerman, Italia, Russia, Afrika Selatan dan Spanyol.

Data tersebut juga menunjukkan bahwa dari senjata yang masuk dari Amerika Serikat ke Amerika Latin senilai 29 juta Dollar senjata masuk ke negara Kolombia. Meksiko mengimpor senilai 10 juta Dollar senjata yang jumlahnya hampir sebanyak seluruh jumlah senjata kecil yang oleh negara Amerika Tengah dan Karibia. Venezuela juga mencetak rekor pembelian sebanyak 100.000 pucuk senjata AK-47 dengan nilai 4 juta Dollar dari Russia yang juga membeli hak untuk memproduksi senjata tersebut di Venezuela dalam kerangka kerjasama kedua negara.

Di samping besarnya jumlah senjata ilegal yang beredar di kawasan Amerika Latin, Perdagangan senjata selundupan khususnya jenis senjata kecil menjadi proses yang tumbuh subur di kawasan Amerika Latin. Kawasan Amerika Latin merupakan surga bagi para penyelundup senjata. Dengan garis pantai yang panjang, wilayah hutan pegunungan yang luas, perbatasan dengan banyak celah, landasan yang tersembunyi, pemerintah yang korupsi, kurangnya sumberdaya pemerintah dan upaya untuk menyelesaikan persoalan penyelundupan senjata kuatnya pelaku penyelundup senjata yang juga menjadi aktor dalam pengedaran narkoba dan penyelundupan manusia. Perbatasan Paraguay, Brazil, dan Argentina yang juga disebut sebagai "tri-border" menjadi wilayah jalur lintas batas penyelundupan senjata, narkoba dan manusia. Senjata dan narkoba yang diselundupkan melalui jalur ini bernilai \$2-3 miliar setiap tahunnya.²⁰ Jalur ini juga yang menjadi jalur masuk sejumlah besar senjata selundupan yang masuk ke Brazil dan Kolombia, tepatnya berasal dari Iguazu Falls yang merupakan bagian dari "tri-border".²¹ Kolombia merupakan pemasok hampir 90% jumlah narkoba yang beredar di AS dari sebanyak 144.000 hektar ladang Kokain.²²

²⁰Rachel Stohl, "Small Arms in Latin America," diakses dari www.cdi.org/pdfs/Small_Arms_Latin_america.pdf pada tanggal 18 April 2009 pukul 13.00 WIB

²¹ Kim Cragin dan Bruce Hoffman, "Arms Trafficking and Kolombia," diakses dari http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/2005/MR1468.pdf pada tanggal 18 April 2009 pukul 13.00 WIB

²² Michael Shifter, "Latin America's Drug Problem," *Current History Journal of Contemporary World Affairs*, Vol 106, 2007 Hlm 58

Bukti menunjukkan bahwa masuknya sejumlah besar senjata selundupan yang mayoritas digunakan oleh gerilyawan Kolombia masuk ke kawasan Amerika Latin melalui jalur laut yang kemudian diteruskan melalui jalur darat melewati Panama. Perbatasan Amerika Serikat dan Mexico juga merupakan rute utama jalur penyelundupan senjata ke Amerika Latin. Suatu kajian yang diluncurkan oleh Pemerintah Meksiko menyatakan bahwa sebanyak 2000 pucuk senjata melewati perbatasan AS-Meksiko. Seperti halnya di Kolombia, senjata-senjata yang melewati perbatasan Meksiko ini juga turut menyulut perlombaan senjata yang ada diantara kartel-kartel narkoba Meksiko yang menjadi penyebab tewasnya 4000 orang selama 18 bulan. Salah satu hal yang juga menjadi perhatian adalah meluasnya produk domestik yang dan cadangan-cadangan senjata yang dimiliki oleh individu memberikan kontribusi pada banyaknya kepemilikan senjata terlarang di kawasan Amerika Latin.

Produksi domestik sangat penting di Brazil, sekitar 80% dari total senjata senjata ilegal yang beredar di Rio de Janeiro merupakan produksi domestik. Menurut Small Arms Survery yang diambil dari data kepolisian Brazil, dari tahun 1999 sampai tahun 2005, 72% dari senjata ilegal yang disita oleh polisi merupakan buatan domestik. Mayoritas dari senjata ini diproduksi dan dijual secara legal lalu kemudian dialihkan ke pasar gelap dengan cara dijual, diobral maupun di curi.²³ Senjata-senjata rakitan yang bisa ditemukan di Chili, Brazil, Kolombia, Honduras, dan El Salvador turut mendorong perdagangan gelap senjata di kawasan Amerika Latin.

Terlepas dari semua sumber datangnya senjata yang beredar luas di kawasan Amerika Latin. Senjata itu sendiri telah membuat permasalahan kemanusiaan di kawasan Amerika Latin menjadi kompleks. Daya bunuh yang tinggi yang disertai oleh kemudahan untuk mendapatkan dan menggunakannya membuat senjata kecil menjadi perhatian elemen penegak hukum baik pada level negara maupun regional. Pendekatan kerjasama regional bisa menjadi jembatan bagi pendekatan jangka panjang dan jangka pendek untuk persoalan keamanan non-tradisional seperti pembajakan dan penyelundupan.²⁴ Kompleksitas persoalan

²³ *LOc Cit.*, Rachel stohl, hlm 15

²⁴ Derek Johnson dan Mark Valencia, *Piracy in Southeast Asia, Status Issues and Responces*, (Singapore: ISEAS Publication), Hlm. 25

SAT di kawasan ini tidak terlepas dari banyaknya sindikat-sindikatan penyelundup senjata yang berada hampir di setiap negara di kawasan Amerika Latin yang didukung oleh lemahnya daya kontrol pemerintah dan kontur alam kawasan Amerika Latin yang memberikan banyak celah aman bagi para penyelundup dari incaran aparat keamanan.

2.1.2 Dinamika Small Arms Trafficking di Kolombia

Kolombia mengalami dua fase konflik internal sejak tahun 1940an. Fase pertama merupakan konflik antara kelompok liberal dan kelompok konservatif yang berlangsung selama 35 tahun hingga tahun 1950an. Fase kedua adalah konflik yang berlangsung hingga saat ini. Konflik ini dimulai pada tahun 1960 yang ditandai dengan berdirinya dua kelompok gerilyawan. FARC dan ELN yang didirikan pada tahun 1964. kedua-duanya memiliki sejarah panjang keterasingan sosial dan ekonomi yang mengakibatkan jurang pemisah yang luas antara kelompok kaya dan miskin. FARC merupakan gerakan berbasis petani sedangkan ELN mewakili gerakan berbasis mahasiswa, pekerja dan para pendeta katolik. Pada tahun ini juga muncul kelompok gerilya lain seperti M19 dan EPL namun yang masih bertahan hingga saat ini adalah FARC dan ELN. FARC dan ELN terlibat dalam serangkaian konflik-konflik di Kolombia. Konflik internal semakin tidak terelakkan ketika pemerintah Kolombia menyokong kelompok paramiliter sebagai penyeimbang (*counterinsurgency*) terhadap FARC dan ELN. Keterlibatan kelompok paramiliter ini dalam perdagangan narkoba membuat kelompok ini menjadi kuat dan dilegalkan keberadaannya dari tahun 1968-1989.

Faktor lain yang turut mengarahkan konflik internal di Kolombia menjadi konflik bersenjata adalah kelompok kejahatan terorganisir. Kelompok-kelompok ini membentuk suatu jaringan dalam upaya melakukan penyelundupan narkoba dari Kolombia dari mulai produksi, packing, pengiriman, hingga pencucian uang hasil penjualan narkoba dalam hal ini adalah kokain. Untuk melindungi usaha ini, para mafia banyak membutuhkan senjata jenis *small arms*. Senjata-senjata ini didapatkan dari kelompok-kelompok bersenjata dengan melakukan pertukaran dengan kokain. Hubungan antara pengedar narkoba dengan kelompok bersenjata telah mengikis kemampuan pemerintah untuk mencegah terjadinya kekerasan

yang disebabkan oleh penyalahgunaan senjata. Keletihan pemerintah untuk mengatasi persoalan kokain ini membuat persoalan ini semakin dilihat sebagai persoalan militer. Kriminalitas dan kekerasan sosial juga menjadi faktor dalam menentukan besarnya jumlah peredaran senjata di Kolombia. Perasaan tidak aman dan tidak adanya jaminan keamanan dari institusi keamanan pemerintah menyebabkan banyak masyarakat memutuskan untuk membeli senjata sementara orang-orang kaya menyewa jasa pengamanan swasta yang tidak jarang digunakan untuk menghancurkan kelompok sosial lainnya. Data statistic menunjukkan sekitar 20% dari angka pembunuhan sebanyak 25.000-27.000 per tahun terkait dengan konflik internal. 20% disebabkan oleh kelompok kejahatan terorganisir, 70% akibat aksi kejahatan di jalanan dan 70% akibat penggunaan jenis senjata kecil.²⁵

Garis pemisah antara pasar gelap, pasar legal dan pasar abu-abu dalam pasar senjata sangat sulit untuk dipisahkan. Pergerakan senjata yang begitu dinamis di luar Kolombia akan menjadi lebih dinamis ketika memasuki Kolombia.²⁶ Senjata kecil yang masuk dan beredar di Kolombia mayoritas berasal dari pasar gelap di Amerika Tengah. Penyelundupan senjata juga dilakukan oleh kelompok paramiliter AUC. Pada tahun 2001, pemerintah Colombia menemukan kelompok ini melakukan penyelundupan 3000 pucuk AK-47 dan 5 juta amunisi yang dibawa dalam kapal yang membawa bola sepak. Menurut pengakuan Juian Bolivar, ketua negosiator AUC, senjata yang diterima oleh paramiliter AUC awalnya menggunakan senjata buatan sendiri, kemudian menggunakan senjata mesin M60 dan mortar. Senjata-senjata ini didapat dari Amerika Tengah yang merupakan senjata yang dijual oleh AS, dan merupakan senjata yang disuplai oleh Uni Soviet ke Sandinistas di Nicaragua. Beberapa senjata yang berasal dari Amerika Tengah merupakan senjata yang telah melewati tiga perang sebelum sampai ke Colombia. Bagi Profesor Macartan Humphreys, hubungan antara perang dan penyelundupan senjata sangat jelas. Ada oknum yang diuntungkan dalam keadaan ini. Mereka ini yang berupaya untuk mempertahankan konflik. Hal

²⁵ Daniel Garcia-Pena Jaramillo "War, Peace and Light Weapons in Colombia"

Diakses dari http://www.geneva-forum.org/Reports/salw_vol1/19991129.pdf pada tanggal 10 April 2009 pukul 13.00 WIB.

²⁶ *Loc Cit., Kim Cragin*

inilah yang kemudian mendorong pentingnya upaya global untuk memberantas aksi penyelundupan senjata yang bersifat lintas batas negara.

Permasalahan yang terjadi di Kolombia seperti konflik politik semakin menambah persoalan meningkatnya jumlah sumber senjata dan jalur peredaran yang indepeden dari jalur peredaran lainnya. Kolombia merupakan negara yang sangat terbuka bagi jalur penyelundupan senjata. Dari pesisir barat hingga ke barat laut, Kolombia sangat terbuka karena wilayah tersebut merupakan wilayah pantai, sebelah utara hingga ke barat daya, Kolombia dikelilingi negara yang menjadi pemasok dan jalur masuk senjata ilegal ke dalam negeri. Jalur darat melalui kawasan hutan pegunungan menjadi jalur favorit dari para penyelundup karena mereka bisa berlindung dalam medan hutan pegunungan dari pengawasan aparat keamanan Kolombia. Tumpang tindih persoalan antara pasar internal dan eksternal dan interaksi antara keduanya semakin memperparah persoalan penyelundupan senjata di Kolombia.

Menurut hasil laporan RAND, setidaknya ada tiga sumber yang potensial bagi bertambahnya jumlah senjata ilegal yang beredar di Kolombia. Sumber yang pertama adalah pemilik senjata perorangan yang menjual senjatanya kepada setiap orang yang mau membayarnya. Pasar ilegal ditandai dengan adanya transparansi yang dapat secara langsung menghubungkan antara penjual dan pembeli. Di Kolombia, warga negara dapat secara pribadi membeli senjata secara legal. Pihak militer mengeluarkan senjata tersebut berdasarkan permintaan dari seorang individu terlebih lagi ketika adanya ancaman dari kelompok gerilya. Sayangnya, pihak keamanan Kolombia tidak mengawasi penggunaan dari senjata yang keluar dari pihak militer untuk diberikan kepada individu-individu yang menjadi konsumen senjata tersebut. Rendahnya tingkat pengawasan yang dilakukan oleh pihak keamanan ini membuat orang-orang yang tadinya adalah pengguna bisa dengan leluasa menjadi penjual senjata ilegal tersebut.

Selain individu, aparat keamanan juga menjadi salah satu sumber senjata yang berasal dari Kolombia. Para aparat keamanan ini menjual senjata yang didapatnya secara ilegal ke pasar gelap. Meskipun data mengenai korupsi perusahaan penyedia jasa keamanan Kolombia tidak tersedia dalam sumber informasi di Kolombia, tetapi data pemerintah Ekuador menunjukkan setidaknya

ada sekitar 22 perusahaan penyedia jasa keamanan swasta di Kolombia terlibat dalam segenap aksi penyelundupan senjata di Kolombia diantaranya adalah Quito, Turcan, dan Nueva Loja. Penelitian lain menunjukkan bahwa senjata-senjata ilegal yang berasal dari sumber yang legal di Kolombia bukan merupakan senjata yang berasal dari Amerika Tengah maupun *Tri-Border* melainkan merupakan senjata asli dari Kolombia.

Sumber yang kedua beredarnya senjata kecil di Kolombia adalah industri militer dalam negeri. Industria Militar (Indumil) merupakan perusahaan pemerintah yang memproduksi senjata dan amunisi untuk kebutuhan angkatan bersenjata Kolombia. Pihak yang berwenang sering menemukan senjata dan amunisi berlabel Indumil di pasar gelap dan di tempat-tempat persembunyian kelompok pemberontakan. Masuknya senjata-senjata Indumil ke pasar gelap ini karena para pekerja di pabrik senjata tersebut melakukan pencurian senjata beserta amunisinya untuk kemudian dijual ke penadahnya di pasar gelap. Gudang-gudang senjata juga sering menjadi sasaran penyerbuan kelompok-kelompok pemberontak. Pada kenyataannya, sejak tahun 1999, pencurian senjata kecil dari instalasi penyimpanan senjata Indumil sudah terjadi sebanyak 10 kali. Hal ini dilakukan oleh para karyawan, penjaga, aparat militer, dan juga para anggota kelompok FARC, ELN, dan AUC.

Sumber lain senjata kecil yang beredar secara ilegal di Kolombia adalah angkatan bersenjata Kolombia itu sendiri. Indumil memproduksi sebagian besar kebutuhan angkatan bersenjata Kolombia dan selebihnya diimpor dari negara lain. Koran setempat telah melaporkan adanya ketidakteraturan dalam pemenuhan pasokan senjata ke gudang penyimpanan senjata militer Kolombia. Personil militer yang bersimpati kepada kelompok pemberontak diketahui menjadi pemasok kebutuhan senjata dan amunisi bagi para kelompok pemberontak yang diambil dari pasokan senjata militer Kolombia. Sebagai contoh, pada musim gugur 2000, *El espectador* melaporkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh unit-unit penyimpanan senjata militer Kolombia seperti Brigade ke-5 dari Bucaramanga, Brigade ke-4 dari Medellin, Brigadir ke-13 dari Bogota, dan Brigade ke 12 di Florencia. Meskipun laporan ini tidak dapat diverifikasi kebenarannya, namun terdapat sebuah kejadian yang penting untuk

dicatat. peristiwa tersebut adalah pembunuhan seorang letnan dari brigade ke-13 yang dibunuh oleh anggota dari unit yang sama karena diduga terlibat penyelundupan senjata. Pada lain waktu aparat keamanan Kolombia juga pernah memergoki seorang tentara yang menyelundupkan 50 granat dengan menggunakan taksi, diduga granat ini akan dijual ke pasar gelap.²⁷

Dampak dari penyelundupan dan peredaran senjata di Kolombia akan sulit untuk diperkirakan. Meskipun pasokan senjata yang berasal dari dalam Kolombia tidak bisa memenuhi kebutuhan senjata para pemberontak, namun ketersediaan sumber senjata di dalam negeri ini dapat menjadi sumber alternatif yang penting bagi persediaan senjata dalam keadaan tidak bisa mendapatkan pasokan atau selundupan senjata dari negara lain. Disamping itu, jenis senjata yang digunakan oleh angkatan bersenjata Kolombia dengan senjata yang didapatkan oleh para pemberontak memiliki jenis senjata yang sama. Untuk menambah kebutuhan senjata negaranya, Kolombia mengimpor senjata yang berasal lebih dari 24 negara termasuk di dalamnya Iran; bekas Yugoslavia dan Afrika Selatan masing-masing dari seluruh negara tersebut memiliki sejarah sebagai sumber senjata ilegal.

Tingginya daya dukung sumber domestik terhadap keberlangsungan pasokan amunisi senjata yang dimiliki oleh pemberontak adalah karena Indumil memproduksi senjata serbu yang memiliki kaliber 5.56 dan 7.62. Fakta menunjukkan bahwa senjata-senjata yang digunakan oleh para pemberontak FARC dan AUC menggunakan senjata dengan kaliber 5.56 dan 7.62. Artinya adalah bahwa kedua kelompok pemberontak itu dapat mendapatkan pasokan amunisi senjatanya dengan mudah. Karena itu kapanpun pihak berwenang Kolombia menemukan senjata berkaliber 7.62 dalam suatu tempat penimbunan senjata, maka mereka akan menarik kesimpulan bahwa senjata tersebut adalah peninggalan kelompok pemberontak.

Pada akhir tahun 2000, El Pais melaporkan bahwa AUC mulai beralih menggunakan senjata serbu jenis Kalashnikov AKM. Alasan yang paling mendasar penggunaan jenis senjata ini adalah karena jauh lebih mudah mendapatkan amunisinya yang berkaliber 7.62 daripada mendapatkan kaliber yang jauh lebih kecil. Jika laporan ini benar maka akan tampak bahwa AUC akan

²⁷ *Ibid.*, Kim Cragin

semakin mengandalkan pasar gelap untuk mendapatkan kebutuhan senjata karena tekanan militer yang semakin mendesak jalur penyelundupan senjata tradisional. Dengan keadaan ini maka semakin sulit untuk membedakan antara senjata yang dipergunakan untuk para gerilyawan, paramiliter dan angkatan bersenjata pemerintah karena senjata yang dimiliki oleh ketiga kelompok ini merupakan diversifikasi dari jenis senjata yang didapatkan baik secara legal maupun ilegal. Lebih berbahaya lagi saat ini ketiga jenis senjata bisa diperoleh di dalam Kolombia baik melalui jalur gelap maupun resmi.²⁸

Jenis senjata serbu otomatis masih menjadi andalan kelompok-kelompok pemegang senjata. Dengan daya muntahan peluru yang jauh lebih banyak dari revolver namun memiliki kemudahan yang sama dalam hal mobilitas, senjata jenis ini kerap menjadi penyebab banyaknya korban tewas akibat kekerasan bersenjata ataupun aksi penyerbuan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok perlawanan sebagaimana digambarkan dalam data pada tabel berikut:²⁹

Tabel 2.1
Keterlibatan Senjata Dalam Kasus Penyerangan Tahun 2005

Tindak Kriminal		Total	Bersenjata	Keterlibatan Senjata
Pencurian	Penduduk	14.776	1.775	12,01%
	Perniagaan	13.524	2.880	21,30%
	Individu	41.213	10.516	25,52%
	Kendaraan	18.959	7.539	39,76%
	Institusi Keuangan	91	82	90,11%
Pembajakan Tanah		715	686	95,94%
Total		89.278	23.478	26,30%

²⁸UN Office on Drugs and Crime "Violence, Crime, and Illegal Arms Trafficking in Kolombia," Diakses dari www.unodc.org/pdf/Columbia_Dec06_en.pdf pada tanggal 17 Desember 2008, pukul 21.00 WIB.

²⁹ *Ibid.*, UNODC

Sumber: UN Office on Drugs and Crime “*Violence, Crime, and Illegal Arms Trafficking in Kolombia*” Diakses dari www.unodc.org/pdf/Kolombia_Dec06_en.pdf

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa tingkat penggunaan senjata dalam setiap aksi kejahatan di Kolombia masih tinggi. Selama kekerasan bersenjata belum berakhir dan struktur kejahatan masih mengontrol arus peredaran senjata, maka selama itu pula permintaan akan senjata masih akan terus tinggi. Sudah jelas bahwa akan ada suatu hubungan antara intensitas konfrontasi dan perluasan organisasi senjata dan tingkat permintaan senjata. Keadaan taktik dan kondisi operasi yang dilakukan dalam konflik bersenjata akan mempengaruhi aspek kualitatif dari suatu permintaan. Suatu penelitian menunjukkan bahwa orientasi penggunaan senjata kelompok pemberontak kini tidak hanya pada kuantitas tetapi juga pada kualitas. Peningkatan pertahanan udara yang dilakukan oleh pemerintah Kolombia dengan mengoperasikan pesawat-pesawat serang darat, helikopter bersenjata seperti *blackhawk* ternyata diikuti dengan reaksi kelompok pemberontak dengan membeli sistem senjata serang darat udara *portable*. Dengan senjata ini maka sulit bagi kedua jenis pesawat untuk bebas bermanuver kecuali dengan menggunakan pesawat tempur dengan kemampuan menghindari serangan-serangan sistem pertahanan udara para pemberontak. Informasi lain juga didapat dari para anggota pasukan bersenjata, menurut mereka, sniper-sniper FARC terus berupaya menghadang laju militer di hutan bagian selatan dari negeri itu. Beberapa laporan menunjukkan bahwa sniper tersebut menggunakan jenis senjata yang modern dan memiliki tingkat ketepatan yang tinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah harus maksimal mengingat langkah yang dilakukan oleh para kelompok penyelundup dan pengguna senjata semakin menjadi ancaman dengan daya pasok senjata yang tinggi tidak hanya secara kuantitas tetapi juga secara kualitas.

2.2. Proses Terbentuknya Decision 552 Andean Community

Kompleksitas permasalahan SAT di Kolombia yang tidak hanya melibatkan kelompok-kelompok domestik tetapi juga luar negeri menyebabkan persoalan ini tidak bisa diselesaikan oleh aktor tunggal melainkan harus menjalin kerjasama dengan negara-negara di kawasan khususnya yang memiliki kaitan

dengan persoalan keluar masuknya senjata ilegal di perbatasan. Jika SAT adalah sebuah penyakit, maka penyakit tersebut sudah menjalar luas di tubuh Amerika Latin. Pada banyak kasus, senjata-senjata yang berasal dari kawasan konflik turut menjadi penyebab konflik di kawasan lain, hal ini menunjukkan bahwa permasalahan SAT bersifat lintas batas.³⁰ Hal ini menunjukkan bahwa perang melawan SAT tidak hanya menjadi tugas masing-masing negara melainkan menjadi tugas dari kawasan.

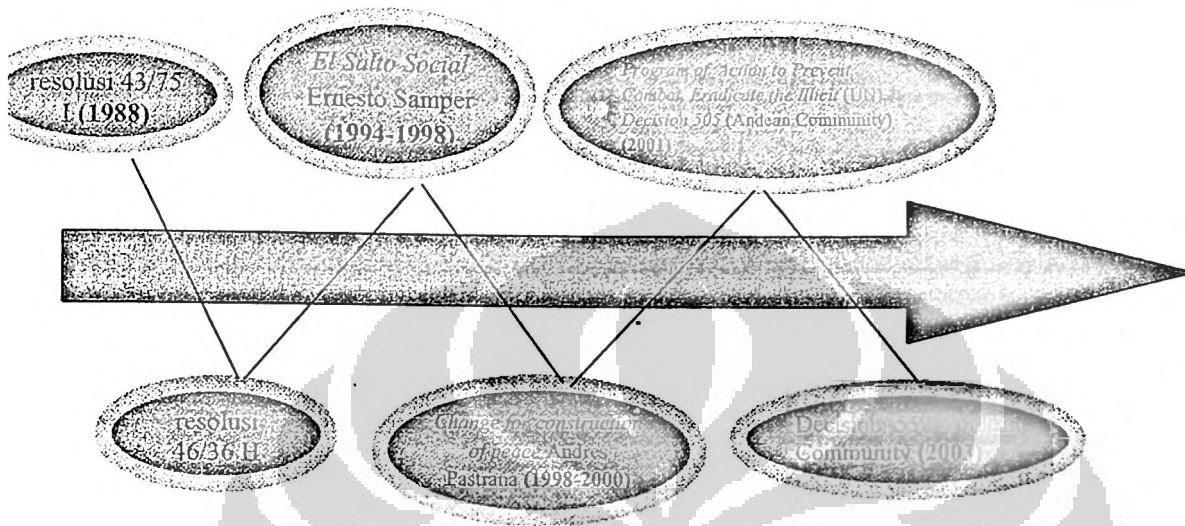
Andean Community merupakan organisasi kawasan yang didirikan oleh empat negara (Kolombia, Bolivia, Ekuador, dan Peru) di kawasan Andean. Kerjasama yang perhatiannya diawali pada aspek ekonomi kini sudah merambah pada sektor keamanan. Kolombia sebagai salah satu pendiri Andean Community mulai menggunakan jalur multilateral melalui organisasi ini untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan SAT yang telah menimbulkan banyaknya korban jiwa bagi negara-negara di kawasan tersebut. Kerjasama ini merupakan suatu hal yang relevan karena semua negara di kawasan Andean menjadi jalur pemasok senjata ilegal di Kolombia.³¹

Peran negara-negara kawasan Andean, khususnya Kolombia dalam mengatasi persoalan SAT di tengah persoalan kompleks lainnya seperti masalah narkoba bisa ditelusuri pada *timeline* kebijakan berikut ini:

³⁰ Rachel Stohl and Rhea Myerscough, "Sub-Saharan Small Arms: The Damage Continues," *Current History Journal of Contemporary World Affairs*, Vol 106, 2007 Hlm 228

³¹ *Loc Cit.*, Julia Goehsing

Gambar 2.1
Timeline Kebijakan Kontrol Senjata



Keterangan:

→ Deklarasi Ayacucho (1974) → resolusi 43/75 I (1988) → resolusi 46/36 H (2001) → *laws regulating arms* (1993) → *El Salto Social Ernesto Samper* (1994-1998) → *Change for construction of peace Andres Pastrana* (1998-2000) → *Program of Action to Prevent, Combat, Eradicate the Illicit* (UN), *Decision 505 The Andean Cooperation Plan for The Control of Illegal Drug and Related offenses* (Andean Community) (2001) → *Decision 552, Andean Plan to Prevent, Combat and Eradicate Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in all its Aspects* (2003)

Pada dasarnya perundang-undangan Kolombia yang mengatur persoalan SAT sudah sejalan dengan agenda internasional. Hal ini disebabkan karena Kolombia berperan aktif dalam setiap kesepakatan dan perjanjian internasional yang berkaitan dengan SAT. Disamping itu, perundang-undangan tersebut mengacu kepada undang-undang tahun 1993 saat belum ada kesepakatan atau perjanjian regional yang diadopsi. Hal ini mendukung posisi Kolombia yang dianggap memiliki pendapat yang penting dalam proses penyelesaian persoalan SAT di kawasan Amerika Latin. Prinsip diplomasi yang dimotori oleh Kolombia dan diterapkan dalam kerjasama negara di kawasan Amerika Latin adalah dengan menciptakan tanggungjawab bersama atas persoalan obat-obatan terlarang dan SAT, dan mendorong kerjasama antar negara.

Universitas Indonesia

Pada hal yang sama pemerintah Kolombia juga mulai menerapkan peraturan yang ketat mengenai penggunaan senjata di dalam negeri oleh kalangan sipil maupun militer. Dalam rencana pembangunan yang dikenal sebagai (El Salto Social) yang didirikan pada masa pemerintahan Ernesto Samper (1994-1998), agenda internasional untuk membicarakan persoalan obat terlarang dan SAT serta bagaimana menghadirkan mata rantai dari pergerakan yang kedua masalah tersebut menjadi prioritas utama untuk segera dilaksanakan.

Dalam rencana pemerintahan Andres Pastrana (1998-2002) yang dikenal sebagai " *Change for construction of peace*" terdapat pasal yang menyatakan perlunya mengukur tindakan pengawasan senjata internasional dengan membentuk suatu prioritas dalam hal komitmen untuk melanjutkan pertemuan di tingkat internasional dan regional terkait dengan pemberantasan pengedaran narkoba dan senjata ilegal.

Masa kepemimpinan Alvaro Uribe juga turut berperan dalam melawan aksi penyelundupan senjata ini. Dalam keyakinannya, Alvaro Uribe mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan pembuatan, pemasaran dan konsumsi narkoba adalah dengan melarang dan melakukan pengawasan senjata.

Dalam konteks internasional, langkah-langkah yang bisa dilihat dalam rangka mengatasi persoalan SAT tercatat dalam lampiran II dalam latar belakang konferensi global pertama tentang Small Arms yang dilaksanakan oleh PBB pada tahun 2001. Hasil utama yang dicapai dari pertemuan itu adalah *Program of Action to Prevent, Combat, Eradicate the Illicit*.³² Program ini menyarankan sembilan hal yang harus dilakukan untuk mengatasi persoalan SAT yaitu: (1). *Strengthening of the legal framework*, (2). *Collection and destruction of firearms* (3). *Disarmaments* (4). *Arms Registration* (5). *Mandatory Character of Ballistic fingerprinting for importers* (6). *Awareness Campaign* (7). *Constant Exchange of Information*. (8). *Establishment of tripartite commission* (9). *participation of civil society*.

Mekanisme kedua yang ditempuh oleh Kolombia melalui jalur internasional adalah melalui Protokol 2001 dalam melawan produksi dan pengedaran senjata, bagian senjata maupun amunisi secara terselubung. Protokol

³² *Op Cit.*, UNODC

yang merupakan tambahan untuk konvensi internasional PBB dalam melawan kejahatan transnasional ini menunjukkan efektifitasnya ketika pada tanggal 3 Juli 2005 beberapa tandatangan dari negara-negara yang diharapkan berhasil didapat. Sampai saat ini sekitar 58 negara telah menandatangani protokol tersebut termasuk didalamnya Rwanda dan Montenegro. Selama Konferensi, Kolombia menunjukkan perannya dengan mengarahkan forum untuk menitikberatkan pada pentingnya memajukan rancangan perundang-undangan dan peraturan yang mengatur tentang senjata kecil dan ringan. Partisipasi aktif dari Kolombia nampak dari presentasi-presentasi yang dilakukan oleh para delegasi dari Kolombia. Salah satu presentasi penting yang dilakukan oleh delegasi Kolombia adalah mengenai dua resolusi penting. Resolusi yang pertama adalah resolusi 43/75 I tahun 1988 yang berjudul Transfer Senjata Internasional yang merupakan aturan pertama yang mengatur tentang transfer senjata yang diadopsi oleh PBB, tujuan utama dari resolusi ini adalah untuk mengatur tatacara pelaksanaan transfer senjata. Resolusi lain adalah A/46/30 1, dalam resolusi ini dikatakan bahwa penting untuk mendaftarkan dan mencatat senjata konvensional yang ditransfer.

Resolusi kedua yang dipresentasikan oleh Kolombia dan Peru pada tahun 1991 adalah Resolusi 46/36 H, Resolusi ini sangat penting karena merupakan petunjuk dalam mengawasi transfer senjata dan juga dimaksudkan bagi penghapusan penyelundupan senjata. Setelah resolusi ini disepakati, Kolombia mempresentasikan Dokumen A/CN sebagai bentuk kontribusi Kolombia bagi diskusi kelompok kerja dalam hal pelucutan senjata. Dokumen tersebut menekankan perlunya memperluas kerjasama, khususnya dalam hal multilateral dan bilateral untuk memfasilitasi pengawasan yang optimal di perbatasan. Besarnya peran Kolombia dalam berbagai forum PBB ini membuat Kolombia berada pada posisi sebagai penyelenggara pembuatan perundang-undangan dan pengawasan senjata PBB, yang inisiatifnya sudah terbentuk sejak tahun 1988 hingga tahun 2001.³³

The Inter-American Convention Againsts the Illicit Manufacturing of and Trafficking in firearms, Ammunition, Explosives and Other Materials (CIFTA) yang digelar oleh OAS merupakan organisasi pertama yang mengikat instrumen-

³³ *Ibid.*, UNODC

instrumen regional yang memiliki perhatian terhadap permasalahan SAT. Konvensi ini terilhami oleh Deklarasi Ayacucho, yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 1974 dan ditandatangani oleh Argentina, Bolivia, Kolombia, Chili, Ekuador, Panama, Peru dan Venezuela. Negara-negara ini pada intinya mendukung penuh segala upaya untuk mendukung penciptaan suatu peraturan yang permanen dalam hal kerjasama dan perdamaian dunia untuk menciptakan pembatasan yang efektif dalam hal kepemilikan senjata, selain itu juga menyerahkan senjata yang berhasil disita untuk keperluan ofensif militer.

Tujuan dari konvensi tersebut adalah untuk menciptakan suatu aturan umum atau standar untuk ekspor dan impor senjata. Selain itu, Konvensi ini juga menciptakan suatu mekanisme untuk memperluas jaringan komunikasi dan kerjasama. Semua ini merupakan upaya yang harus dilakukan untuk memperketat peraturan yang mengatur tentang SAT di Kolombia. Sebagai hasil dari CIFTA, ada tiga instrumen penting yang terbentuk. Pertama adalah *CICAD Model regulations for the control of international movement*. Instrumen kedua adalah *Draft Model Legislation on firearms and Ammunition*, penandaan dan penyaluran senjata. Instrumen yang ketiga adalah Kuesioner yang harus diisi oleh setiap negara anggota OAS. Resolusi mengenai pengedaran senjata jenis SAT yang diprakarsai oleh OAS mendorong negara-negara untuk selalu memberikan informasi dan laporan mengenai penyelundupan senjata ilegal didalam negerinya.

Dalam konteks subregional dalam wilayah Andean, terdapat dua keputusan penting yang sudah dibuat. Keputusan yang pertama adalah *Decision 505 The Andean Cooperation Plan for The Control of Illegal Drug and Related offenses* yang disepakati di Venezuela pada tahun 2001. Keputusan ini merupakan hasil dari kesepakatan yang diadopsi oleh presiden negara-negara anggota Andean Community dalam pertemuan yang diadakan di Cartagena de Indias pada tanggal 17 April 2001.

Keputusan penting yang kedua adalah *Decision 552, Andean Plan to Prevent, Combat and Eradicate Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in all its Aspects*. Keputusan ini dihasilkan di Antioquia, Kolombia pada bulan Juni 2003. Perjanjian ini mengambil elemen CIFTA dan mengaplikasikannya ke kawasan Andean khususnya untuk hal-hal yang berkaitan dengan penguatan bea

cukai dan penjagaan perbatasan. Dalam keputusan ini juga dilakukan perbaikan tindakan yang harus dilakukan terkait dengan komitmen negara-negara anggota untuk membentuk suatu komitmen kerjasama diantara negara-negara anggota Andean Community terkait dengan persolan penyelundupan senjata di Kawasan Andean.

Sebagai hasil dari Decision 552 dan berdasarkan pada undang-undang No. 737 tahun 2002 yang meratifikasi CIFTA, telah dipersiapkan sebuah draft dalam rangka implementasi keputusan 552 dengan mendirikan badan koordinasi nasional untuk mencegah, melawan dan menghapuskan penyelundupan senjata kecil dan ringan dalam semua aspek. Susunan pengurus dari badan ini adalah menteri keadilan dan dalam negeri, menteri luar negeri, menteri pertahanan, menteri perdagangan, industri dan pariwisata, jaksa penuntut umum suatu negara, kemandan agkatan bersenjata, kepala lembaga administrasi pertahanan negara, kepala kepolisian, kepada pajak dan bea cukai, dan kepala industri pertahanan Kolombia.

Tugas utama dari pengurus badan nasional ini adalah untuk merancang dan menjalankan rencana tindakan negara dalam mencegah penyelundupan senjata kecil dan ringan dari segala aspek dan juga untuk memastikan dilaksanakannya kewajiban tersebut dilakukan baik di Wilayah Andean maupun di kawasan lain yang turut menyepakati kesepakatan dan kerjasama.³⁴

³⁴ *Ibid*, UNODC

Tabel 2.2
Perbandingan Kasus Amerika Latin dan Kolombia

No.	Indikasi	Kasus di Kawasan Amerika Latin	Kasus di Kolombia
1.	Pelanggaran <i>Non-traditional Security (NTS)</i>	• Kekerasan akibat penggunaan senjata kecil merupakan ancaman yang paling besar terhadap keamanan penduduk yang tinggal di kawasan Amerika Latin. • Penggunaan secara bebas senjata oleh individu atau kelompok selama beberapa dekade tanpa kontrol mengakibatkan kematian 73.000-90.000 jiwa masyarakat Amerika Latin pada kisaran umur 15-44 tahun sebagaimana dilaporkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO).	• Untuk melindungi usaha kokain, para mafia berusaha melindungi diri mereka dengan senjata. Kelompok ini menjadi salah satu aktor dari penyelundupan senjata dari dan keluar Kolombia. Kelompok tersebut adalah FARC dan ELN. • Data statistic menunjukkan sekitar 20% dari angka pembunuhan sebanyak 25.000-27.000 per tahun terkait dengan konflik internal. 20% disebabkan oleh kelompok kejahatan terorganisir, 70% akibat aksi kejahatan di jalanan dan 70% akibat penggunaan jenis senjata kecil. • Hubungan antara pengedar narkoba dengan kelompok bersenjata telah mengikis kemampuan pemerintah untuk mencegah terjadinya kekerasan yang disebabkan oleh penyalahgunaan senjata.

2.	Proxy war	- Selama terjadi perang sipil era 1980, baik Amerika Serikat maupun Russia telah mempersenjatai negara-negara sekutunya di kawasan Amerika Latin dalam jumlah yang cukup besar. - Senjata Uni Soviet yang dilimpahkan ke Kuba telah mencapai Sandinistas di Nicaragua - Venezuela juga mencetak rekor pembelian sebanyak 100.000 pucuk senjata AK-47 dengan nilai 4 juta Dollar dari Russia yang juga membeli hak untuk memproduksi senjata tersebut - AS juga mempersenjatai sekutunya di Amerika Latin - AS juga menggunakan negara ketiga	- senjata yang diterima oleh paramiliter AUC awalnya menggunakan senjata buatan sendiri, kemudian menggunakan senjata mesin M60 dan mortar. Senjata-senjata ini didapat dari Amerika Tengah yang merupakan senjata yang dijual oleh AS, dan merupakan senjata yang disuplai oleh Uni Soviet ke Sandinistas di Nicaragua. - Senjata kecil yang masuk dan beredar di Kolombia mayoritas berasal dari pasar gelap di Amerika Tengah. Penyelundupan senjata juga dilakukan oleh kelompok paramiliter AUC. Pada tahun 2001, pemerintah Colombia menemukan kelompok ini melakukan penyelundupan 3000 pucuk AK-47 dan 5 juta amunisi yang dibawa dalam kapal yang membawa bola sepak.
----	------------------	--	---

	seperti Israel dalam menyebarkan senjata di kawasan Amerika Latin. • Front pembebasan Farabundo Marti Nacional di El Salvador mendapatkan senjata AK-47 dari pihak militer Honduras yang mendapatkan pasokan penuh dari CIA di Nicaragua. • kebanyakan senjata yang diselundupkan kedalam Amerika Latin berasal dari Amerika Serikat, Eropa dan kawasan-kawasan kecil industri senjata maju. • Amerika Latin telah secara legal telah mengekspor sekurang-kurangnya 175 juta Dollar senjata kecil dan ringan beserta amunisi dan suku cadang senjata. Tercatat senilai 50 juta dolar angka ekspor senjata AS ke Amerika Latin. • Menurut data yang didapat dari	
--	---	--

		<i>Norwegian Initiatives on Small Arms Transfer</i> pada tahun 2005, Amerika Serikat merupakan pemasok utama masuknya senjata tersebut ke wilayah Amerika Latin. berasal dari negara lain seperti Belgia, Republik Cheko, Jerman, Italia, Russia, Afrika Selatan dan Spanyol. • Dari senjata yang masuk dari Amerika Serikat ke Amerika Latin senilai 29 juta Dollar senjata masuk ke negara Kolombia. Meksiko mengimpor senilai 10 juta Dollar dari AS.	
3.	Karakter Geografis	• Kawasan Amerika Latin merupakan surga bagi para penyelundup senjata. Dengan garis pantai yang panjang, wilayah hutan pegunungan yang luas, perbatasan dengan banyak celah,	• Kolombia merupakan negara yang sangat terbuka bagi jalur penyelundupan senjata. Dari pesisir barat hingga ke barat laut, Kolombia sangat terbuka karena wilayah tersebut merupakan wilayah pantai, sebelah utara hingga ke barat daya, Kolombia dikelilingi negara yang

	landasan yang tersembunyi, pemerintah yang korupsi, kurangnya sumberdaya pemerintah dan upaya untuk menyelesaikan persoalan penyelundupan senjata kuatnya pelaku penyelundupan senjata yang juga menjadi aktor dalam pengedaran narkoba dan penyelundupan manusia • Perbatasan Paraguay, Brazil, dan Argentina yang juga disebut sebagai "tri-border" menjadi wilayah jalur lintas batas penyelundupan senjata, narkoba dan manusia terbesar. Senjata dan narkoba yang diselundupkan melalui jalur ini bernilai \$2-3 miliar setiap tahunnya. • Perbatasan Amerika Serikat dan Mexico juga merupakan rute utama jalur penyelundupan senjata ke Amerika Latin. Suatu kajian yang diluncurkan oleh	menjadi pemasok dan jalur masuk senjata ilegal ke dalam negeri. • Jalur darat melalui kawasan hutan pegunungan menjadi jalur favorit dari para penyelundup karena mereka bisa berlingkungan dalam medan hutan pegunungan dari pengawasan aparat keamanan Kolombia. • Kolombia merupakan jembatan penghubungan antara Amerika Tengah dan Amerika Utara, dan memiliki pantai yang luas di wilayah Laut Karibia dan Samudera Pasifik serta berbatasan langsung dengan Venezuela, Ekuador, Panama, Brazil, dan Peru . • Penyelundupan senjata umumnya dilakukan melalui jalur darat, melewati lima batas negara, terutama batas Kolombia-Venezuela dan Kolombia-Ekuador. Jalur kedua adalah melalui jalur laut yaitu melalui Laut Karibia dan Samudera Pasifik. • Melalui jalur udara dengan estimasi sekitar 50% penyelundupan senjata via udara adalah melalui
--	--	--

		Pemerintah Meksiko menyatakan bahwa sebanyak 2000 senjata melewati perbatasan AS-Meksiko.	perbatasan Kolombia-Brazil-Peru-Ekuador.
4.	Kelebihan Produksi (Over Production)	• Sekitar 80% dari total senjata senjata ilegal yang beredar di Rio de Janeiro merupakan produksi domestik. • Senjata-senjata rakitan yang bisa ditemukan di Chili, Brazil, Kolombia, Honduras, dan El Salvador turut mendorong perdagangan gelap senjata di kawasan Amerika Latin.	• Sumber senjata yang pertama adalah pemilik senjata perorangan yang menjual senjatanya kepada setiap orang yang mau membelinya. • Di Kolombia, warga negara dapat secara pribadi membeli senjata secara legal. Pihak militer mengeluarkan senjata tersebut berdasarkan permintaan dari seorang individu terlebih lagi ketika adanya ancaman dari kelompok gerilya. • Aparat keamanan juga menjadi salah satu sumber senjata yang berasal dari Kolombia. Para aparat keamanan ini menjual senjata yang didapatnya secara ilegal ke pasar gelap. • Ada sekitar 22 perusahaan penyedia jasa keamanan

		swasta di Kolombia terlibat dalam segenap aksi penyelundupan senjata di Kolombia diantaranya adalah Quito, Turcan, dan Nueva Loja. • Penelitian lain menunjukkan bahwa senjata-senjata ilegal yang berasal dari sumber yang legal di Kolombia bukan merupakan senjata yang berasal dari Amerika Tengah maupun <i>Tri-Border</i> melainkan merupakan senjata asli dari Kolombia. • Sumber lain beredarnya senjata kecil di Kolombia adalah industri militer dalam negeri. Industria Militar (Indumil) merupakan perusahaan pemerintah yang memproduksi senjata dan amunisi untuk kebutuhan angkatan bersenjata Kolombia. Pihak yang berwenang sering menemukan senjata dan amunisi berlabel Indumil di pasar gelap dan di tempat-tempat persembunyian kelompok pemberontakan. Masuknya senjata-senjata Indumil ke pasar gelap ini karena para pekerja di pabrik senjata tersebut melakukan pencurian senjata beserta amunisinya untuk kemudian dijual ke
--	--	---

		penadahnya di pasar gelap. Gudang-gudang senjata juga sering menjadi sasaran penyerbuan kelompok-kelompok pemberontak. Pada kenyataannya, sejak tahun 1999, pencurian senjata kecil dari instalasi penyimpanan senjata Indumil sudah terjadi sebanyak 10 kali. Hal ini dilakukan oleh para karyawan, penjaga, aparat militer, dan juga para anggota kelompok FARC, ELN, dan AUC. • pada musim gugur 2000, <i>El espectador</i> melaporkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh unit-unit penyimpanan senjata militer Kolombia seperti Brigade ke-5 dari Bucaramanga, Brigade ke-4 dari Medellin, Brigadir ke-13 dari Bogota, dan Brigade ke 12 di Florencia. Meskipun laporan ini tidak dapat diverifikasi kebenarannya, namun terdapat sebuah kejadian yang penting untuk dicatat. Peristiwa tersebut adalah pembunuhan seorang letnan dari brigade ke-13 yang dibunuh oleh anggota dari unit yang sama karena diduga terlibat penyelundupan senjata. Pada lain waktu
--	--	---

		aparat keamanan Kolombia juga pernah memergoki seorang tentara yang menyelundupkan 50 granat dengan menggunakan taksi, diduga granat ini akan dijual ke pasar gelap. • Pada akhir tahun 2000, El Pais melaporkan bahwa AUC mulai beralih menggunakan senjata serbu jenis Kalashnikov AKM. Alasan yang paling mendasar penggunaan jenis senjata ini adalah karena jauh lebih mudah mendapatkan amunisinya yang berkaliber 7.62 daripada mendapatkan kaliber yang jauh lebih kecil karena bisa diperoleh di dalam negeri.
--	--	--

BAB 3

IMPLEMENTASI DECISION 552 DALAM MENGHENTIKAN SMALL ARMS TRAFFICKING.

Dalam membahas Bab 3, pemikiran Rachel Stohl tentang mekanisme yang harus dilakukan oleh institusi negara atau supranasional dalam mengatasi SAT di Amerika Latin pada umumnya dan Kolombia pada khususnya kembali dikedepankan. Andean Community sebagai organisasi yang mengeluarkan Decision 552 merupakan institusi yang mengarahkan kegiatannya menuju kawasan Andean yang terintegrasi yang dimulai pada aspek ekonomi, budaya, hingga ke ranah keamanan. Integrasi Ekonomi juga selaras dengan integrasi politik. Integrasi politik telah menjadi mimpi negarawan-negarawan besar di Amerika Latin.³⁵ Hal inilah yang membuat perlunya untuk menyelaraskan antara upaya Andean Community dalam mengatasi persoalan SAT di Kolombia dengan agenda besar dari Andean Community itu sendiri yaitu integrasi. Hal ini diungkapkan sebagai prinsip dari Decision 552.³⁶

"Complementariness: The Plan contributes to the execution of domestic policies on the subject and the Common Foreign Policy, in order to deepen the process of Andean integration."

Relevansi peran Andean Community dalam hal ini dilihat dalam bentuk Decision 552. Untuk itu maka penulis menganggap bahwa Decision 552 sangat menggambarkan pemikiran dan langkah dari Andean Community. Hal ini penting dikemukakan diawal karena kelak Decision 552 yang akan menjadi objek dari penelitian dalam skripsi ini. Dengan melihat melalui konsep rezim dan integrasi dan menggunakan parameter yang diberikan oleh Rachel Stohl, maka hasil dari analisa Decision 552 adalah gambaran efektifitas peran Andean Community dalam mengatasi persoalan SAT di Amerika Latin dan Kolombia.

³⁵David A. Lake, *Regional Order: Building Security in a New World*, (USA: The Pennsylvania University Press, 1997) Hlm 203.

³⁶ Decision 552, Principles #6

Menurut Rachel Stohl, terdapat 10 hal yang harus dilakukan oleh suatu institusi negara, regional atau internasional untuk menghentikan upaya penyelundupan senjata. Pada bagian analisa ini penulis akan meneliti Decision 552 Andean Community sebagai langkah Komunitas negara-negara di kawasan Andean tersebut dalam menangani persoalan SAT dengan menggunakan 10 cara yang disarankan oleh Rachel Stohl. Setelah diteliti bisa dilihat hasilnya bahwa semua unsur yang ada dalam kesepuluh saran Stohl bisa ditemukan dalam Decision 552. Tabel dibawah ini menunjukkan relevansi antara 10 saran Stohl dengan Decision 552.

Tabel 3.1
Relevansi 10 Saran Stohl dengan Decision 552

No.	Sepuluh Langkah menurut Rachel Stohl	Bagian dalam Decision 552
1.	<i>Action 1</i>	<i>Opening, principles, mechanism (annex I), guidelines in domestic sphere, objectives (annex I).</i>
2.	<i>Action 2</i>	<i>objectives (annex I). guidelines in the subregional Andean sphere,</i>
3.	<i>Action 3</i>	<i>Opening, guidelines in the subregional Andean sphere,</i>
4.	<i>Action 4</i>	<i>Opening, objectives, guidelines in domestic sphere, legislative measures (annex II), operational Plan (legislative measures-execution), Control, Confiscation, Sanctioning, Distribution, Collection and Destruction (execution),</i>
5.	<i>Action 5</i>	<i>guidelines in domestic sphere, Operational and Institutional Strengthening Measures(annex II)</i>
6.	<i>Action 6</i>	<i>Control, Confiscation, Sanctioning, Distribution, Collection and Destruction (execution), Operational and Institutional Strengthening Measures(annex II)</i>
7.	<i>Action 7</i>	<i>Control, Confiscation, Sanctioning, Distribution, Collection and Destruction (execution), guidelines in domestic sphere, Operational and Institutional Strengthening Measures(annex III)</i>

8.	Action 8	<i>guidlines in the subregional Andean sphere, coordinated agenda for action in the subregional cooperation and coordination.</i>
9.	Action 9	<i>modes of action (annex I), guidelines in domestic sphere, Operational and Institutional Strengthening Measures(annex II),</i>
10.	Action 10	<i>legislative measure (annex III), legislative measure (annex III)</i>

3.1. Analisa Hubungan Decision 552 dengan Sepuluh Saran Rachel Stohl

Bagian pertama yang harus dilakukan dalam mengatasi SAT adalah mencegah jatuhnya senjata tersebut ke tangan kelompok atau individu yang tidak memiliki hak untuk memiliki senjata. Dalam hal ini pemerintah harus mendukung embargo regional maupun internasional terhadap kelompok-kelompok yang tidak berwenang. Pemerintah harus memulai langkah untuk berani menindak para pelanggar yang berani melanggar embargo. Organisasi internasional dan regional harus mendirikan suatu badan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap perlakuan pelanggar hukum. Dalam hal ini, Rachel Stohl menekankan pentingnya terbentuk suatu instrumen baik itu institusi yang sudah ada atau bentukan baru maupun dalam bentuk kebijakan atau kerangka kerja terintegrasi yang memiliki derajat otoritas yang tinggi sehingga memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan dan penindakan dalam setiap aspek yang berkaitan dengan proses perpindahan senjata.

Dalam decision 552, indikasi adanya upaya Andean Community dalam mengupayakan terciptanya suatu instrumen yang mampu memberikan pengawasan dan penindakan untuk hal yang berkaitan dengan perpindahan senjata terdapat pada bagian pembukaan yang berbunyi:

"That the Andean Community Member Countries approved the Model Regulations of the Inter-American Drug Abuse Control Commission (CICAD), in order to establish a series of harmonized measures and procedures to supervise and control international trade in firearms, their parts and ammunition, with a view to avoiding illicit trade in those items and their diversion for illegal uses and purposes;"

Pernyataan diatas kemudian dilanjutkan dengan sikap dari Andean Community yang melihat bahwa kompleksitas persoalan penyelundupan senjata

Universitas Indonesia

ilegal harus melibatkan banyak pihak namun tetap terintegrasi dengan meningkatkan kapasitas dari setiap aktor dalam menjalankan aturan dalam hal perpindahan senjata. Dalam Decision 552 pada bagian pembukaan disebutkan sebagai berikut yang kemudian kembali dicetuskan sebagai salah satu sasaran dibentuknya kesepakatan ini:

"That the problem of proliferation of illicit arms may only be resolved extensively, broadly and in an integrated manner by reinforcing the capacity to regulate and comply with all aspects that govern the lawful manufacture, import, export, transfer, sale, brokerage, transport, possession, concealment, usurpation, carrying and use of arms of this kind, as well as establishing cooperative Community mechanisms for this purpose; and,"

Diletakkannya kedua pernyataan tersebut pada bagian pembukaan dari Decision 552 menunjukkan bahwa masing-masing anggota Andean Community menyadari bahwa dalam upaya menyelesaikan permasalahan SAT di Kolombia, hal pertama yang harus dipersiapkan adalah bagaimana mempersiapkan suatu institusi yang memiliki kekuatan dalam menegakkan kebijakan-kebijakan yang bisa memaksa kelompok-kelompok pengguna senjata ilegal tidak bisa lagi menjalankan aktifitas membeli maupun menyelundupkan senjata tersebut. Langkah awal yang disebutkan oleh Stohl untuk menerapkan suatu embargo senjata sangat jelas menunjukkan pentingnya terlebih dahulu membentuk institusi yang kuat yang memiliki pengaruh dalam menghentikan persoalan SAT baik di suatu negara maupun suatu kawasan. Pada Andean Community parameter derajat otoritas dari institusi ini dalam merespon aksi SAT di kawasan Andean sudah jelas disebutkan dalam Decision 552 tepatnya pada bagian *principles* keempat:

"Respect for the domestic jurisdiction of the States: The Plan fully respects territorial sovereignty and integrity, as well as the principle of non-intervention in domestic affairs."

Pada bagian mekanisme juga disebutkan:

"As established in the "Lima Commitment," the High-Level Group on Security and Confidence-Building shall be the executor of Andean Community Security Policy and, in that context, of this Plan."

Kedua substansi Decision 552 diatas menunjukkan bahwa Andean Community telah menyiapkan perangkat otorisasi langkah Andean Community kedepan untuk bisa lebih berperan dalam mengatasi persoalan SAT. Namun penghormatan terhadap hak non-intervensi dan batas teritorial negara menjadi prinsip bagi Andean Community. Terkadang hal ini bisa menjadi hambatan karena dengan menggunakan alasan prinsip non-intervensi, aksi yang melibatkan aparaturnegara bisa terhindar dari jeratan hukum. Untuk itu Andean Community juga membentuk badan koordinasi di setiap negara yang memiliki 6 tugas pokok sebagaimana tercantum dalam Decision 552 yaitu:

1. *"Strengthen or establish mechanisms for national coordination with the corresponding institutional infrastructure that will be responsible for guiding policy, research and monitoring all aspects of the proliferation, control of and illicit trade in small arms and light weapons."*
2. *"Enhance the capacity of the institutions and officials who are responsible for preventing, combating and eradicating the illicit proliferation of small arms and light weapons and improve their equipment and resources in order to obtain concrete results in the medium and long terms."*
3. *"Recommend the adoption, as promptly as possible and whenever appropriate, of the legislative and other measures that are needed to classify as a criminal offense under national law the illicit manufacture, import, export, transfer, sale, brokerage, transport, possession, concealment, usurpation, carrying and use of small arms and light weapons."*
4. *"Prepare and implement, as appropriate, domestic programs for:*
 - a) The responsible handling of legal small arms and light weapons;*
 - b) The voluntary surrender of illicit small arms and light weapons;*
 - c) The identification and destruction by competent national officials of illicit small arms and light weapons and of the surplus inventory of arms and weapons that are obsolete or have been confiscated and are being held by the State, unless they have another officially authorized use, provided that these arms and/or weapons have been duly marked and registered;*
 - d) The creation of citizen consciousness of the proliferation of and illicit trade in small arms and light weapons;*

- e) *The adoption of appropriate national rules or regulations for improving and reinforcing laws that regulate the legal possession by civilians of firearms, ammunition, explosives and other related materials;*
 - f) *The transparent control of transfers of small arms and light weapons by producers, sellers, brokers and other agents, together with their embarkation and transit;*
 - g) *The active involvement of civil society in formulating and implementing a national program of action to address the problem in a comprehensive and sustainable way; and*
 - h) *The consciousness-raising, education and training of public and private actors connected with the implementation of the necessary measures to prevent, combat and eradicate illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects.*
- 1). Promote the signing and entry into effect of binding bilateral or multilateral agreements with neighboring or third countries or accession to such agreements, in order to establish a common system of effective control, including the registration and confiscation of illicit small arms and light weapons in border regions."*

6. "Design and implement proactive policies and measures to create the necessary political, economic, social and cultural conditions for reducing the demand for and illicit use of small arms and light weapons by individuals, groups of individuals or communities."

Dengan tugas tersebut, maka badan koordinasi yang juga merupakan perpanjangan tangan dari Andean Community dapat menjalankan tugasnya menyelesaikan persoalan SAT didalam negara.

Pada bagian kedua, Stohl menekankan pentingnya menciptakan suatu sistem bersama untuk menjejaki keberadaan senjata. Sistem tersebut harus bisa diterapkan di wilayah regional maupun internasional. Setiap negara harus memiliki standar yang sama untuk memudahkan proses identifikasi senjata. Menurut Stohl, masyarakat internasional diharapkan dapat membentuk lembaga dimana senjata dapat didaftarkan secara universal untuk mengidentifikasi senjata kecil dan untuk memverifikasi keresmian dari perdagangan senjata.

Dalam Decision 552, indikasi ini bisa dilihat dari salah satu poin pada bagian tujuan dalam Decision 552.

"To institutionalize national and subregional programs, as well as the corresponding mechanisms for action, in order to prevent, control and eradicate illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects"

Bagian ini menunjukkan keinginan dari Andean Community untuk melakukan mekanisme upaya menghentikan SAT dalam kerangka kerjasama bersama antara program domestik dengan program subregional. Langkah diatas adalah upaya untuk mensinergikan antara program yang diterapkan oleh masing-masing negara dengan program kawasan. Selain untuk meningkatkan efektifitas upaya penghentian SAT, sinergi kedua program ini juga ditujukan untuk mewujudkan integrasi Andean. Hal ini bisa dilihat dalam salah satu poin *principles* keenam:

"Complementariness: The Plan contributes to the execution of domestic policies on the subject and the Common Foreign Policy, in order to deepen the process of Andean integration."

Dalam konsep integrasi dan rezim, langkah kedua ini adalah suatu upaya untuk meningkatkan intensitas interaksi diantara negara-negara di Kawasan Andean. Dengan tingkat interaksi yang tinggi dan fokus pada permasalahan yang sama, maka kesamaan nilai dan pandangan mengenai langkah apa yang harus dilakukan dalam mengatasi persoalan SAT di kawasan dapat terbentuk. Komunikasi diantara negara-negara yang telah sepakat atas isi dari Decision 552 diarahkan kedalam suatu aksi nyata sebagaimana tertulis:

"To exchange information and cooperate on all matters relating to illicit small arms and light weapons in all their aspects."

Komunikasi yang dilakukan tidak hanya terbatas antar negara di kawasan Andean tetapi juga antara negara dengan masyarakatnya. Sebagaimana terdapat dalam *Modes of Action* keenam:

"To promote the investigation, preparation and collection of information and statistics in the subregion, as well as dialogue and cooperation between the governments and civil society."

Pada bagian kedua ini, Stohl menekankan terciptanya suatu sistem bersama yang bertujuan untuk menjejaki perpindahan senjata. Kerjasama ini penting dilakukan untuk menghindari bocornya senjata dari pengawasan karena beberapa faktor penting seperti lemahnya pengawasan perbatasan, sulitnya pengawasan senjata karena tingkat mobilisasi yang tinggi dan mudah dibawa, terlibatnya aparat pemerintah, hingga tingkat penyebaran yang tinggi karena bisa dibeli dan digunakan oleh individu. Untuk menghindari terjadinya hal ini, Andean Community menerapkan langkah membangun kerjasama baik secara

bilateral maupun multilateral dengan negara-negara sekitar untuk bersama-sama melakukan pengawasan baik di dalam negeri maupun di wilayah perbatasan. Kerjasama ini penting untuk mewujudkan suatu sistem bersama dalam hal pengawasan dan pencatatan senjata yang keluar masuk melewati perbatasan sebagaimana tersebut sebagai berikut:

"Promote the signing and entry into effect of binding bilateral or multilateral agreement: with neighboring or third countries or accession to such agreements, in order to establish a common system of effective control, including the registration and confiscation of illicit small arms and light weapons in border regions."

Penetapan standar bersama mengenai mekanisme pengawasan dan penindakan juga menjadi perhatian penting dalam kerjasama diantara negara-negara di kawasan Andean agar tidak terjadi bentrok dengan undang-undang yang sudah dianut oleh setiap negara. Hal ini menjadi perhatian dalam kerjasama di kawasan Andean sebagaimana disebutkan dalam decision 552:

"Promote the coding and harmonizing of legislations that regulate illicit manufacture, import, export, transfer, sale, brokerage, transport, possession, carrying and use of small arms and light weapons, in keeping with each Member Country's national Constitution. The common minimum standards defined by the Member Countries should include, but not be limited to, the application of markings on arms and weapons manufactured in the subregion, their registration and the control of imports, exports and legal trade of those items."

Pada bagian ketiga, Rachel Stohl menekankan perlunya mengadopsi perjanjian internasional untuk mengakhiri kekebalan hukum dari para pelaku kejahatan SAT. Dalam konsep integrasi dan rezim, disamping untuk meningkatkan intensitas komunikasi, langkah ini juga merupakan suatu upaya untuk meningkatkan derajat otonomi institusi yang berpengaruh pada tingkat otoritas Andean Community. Upaya ini adalah bentuk reaksi dari meluasnya keterlibatan oknum pemerintah dalam praktek SAT pada beberapa negara seperti Kolombia.

Dalam Decision 552, hal yang sama juga cukup menjadi perhatian dibentuknya perjanjian ini. Salah satunya adalah pernyataan sikap yang tertera pada bagian pembukaan yang menunjukkan bahwa negara-negara anggota Andean Community memiliki komitmen untuk mengimplementasikan perjanjian

internasional khususnya perjanjian yang dikeluarkan oleh PBB. Hal ini tertera dalam Decision 552 yang berbunyi:

"That the Andean Community Member Countries agreed to implement the United Nations Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All its aspects, adopted in New York in July 2001"

Pada bagian ketiga ini Stohl menekankan dibentuknya suatu ketetapan bersama terkait dengan perpindahan senjata dan hal ini sudah direalisasikan dengan munculnya decision 552 sebagai langkah nyata Andean Community dalam mengatasi persoalan SAT di Kawasan Andean pada umumnya dan Kolombia pada Khususnya.

"Make certain that illegal manufacturers, sellers, brokers of and traffickers in small arms and light weapons, as well as those who transfer these types of armaments to individuals or groups operating outside the law in violation of domestic, subregional or hemispheric regulations on the matter, are duly sanctioned."

Pada bagian keempat, Stohl menekankan pada perihal ekspor senjata. Kriteria ekspor internasional dibutuhkan untuk mencegah jatuhnya senjata ekspor ke tangan para pelanggar HAM bersenjata. Kriteria ini diharapkan mampu mencegah senjata-senjata ekspor masuk ke pasar gelap. Terkait dengan konsep rezim dan integrasi saran Stohl yang keempat ini bertujuan untuk meningkatkan komunikasi diantara sesama anggota Andean Community sekaligus meningkatkan otoritas dari Andean Community dalam menghentikan SAT melalui jalur ekspor senjata.

Dalam Decision 552, perhatian mengenai pentingnya pengawasan terhadap proses ekspor senjata sudah baik, hal ini terbukti dalam banyaknya pernyataan yang mengarah kepada hal tersebut. pada bagian pembukaan tertulis bahwa salah satu upaya untuk menyelesaikan persoalan SAT adalah dengan menguatkan kemampuan untuk mengatur ekspor senjata.

"That the problem of proliferation of illicit arms may only be resolved extensively, broadly and in an integrated manner by reinforcing the capacity to regulate and comply with all aspects that govern the lawful manufacture, import, export,..."

Pada bagian tujuan dari dibentuknya Decision 552 disebutkan bahwa kesepakatan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas negara dalam melaksanakan segala

Universitas Indonesia

ketetapan dalam melawan SAT yang salah satunya adalah mengawasi ekspor senjata.

"To strengthen the capacity of Member Countries to implement measures against the illicit manufacture, import, export, transfer, sale, brokerage, transport, possession, concealment, usurpation, carrying and use of small arms and light weapons and to identify, confiscate and, when appropriate, destroy these types of weapons and arms;"

Di tingkat domestik, pengawasan ekspor senjata dimungkinkan mengadopsi undang-undang yang telah diterapkan untuk bisa menjegal para pelaku ekspor senjata ilegal dan menjadikannya sebagai tersangka dibawah payung hukum nasional.

"Recommend the adoption, as promptly as possible and whenever appropriate, of the legislative and other measures that are needed to classify as a criminal offense under national law the illicit manufacture, import, export, transfer, sale, brokerage, transport, possession, concealment, usurpation, carrying and use of small arms and light weapons."

Dalam keterangan lain juga disebutkan mengenai masuknya pengawasan ekspor senjata dibawah undang-undang nasional.

"3.1. To recommend the incorporation into domestic legislation, when necessary and as a priority, of regulatory provisions on the following matters:

3.1.2. Manufacture, import, export, transfer, sale, brokerage, transport, marking, registration and control of small arms and light weapons.

3.2. To establish as criminal offenses under their domestic law, the illicit manufacture, import, export, transfer, sale, brokerage, transport, possession, concealment, usurpation, carrying and use of small arms and light weapons, including ones that are homemade."

Komitmen dari masing-masing negara anggota Andean Community untuk segera menyertakan undang-undang negaranya dalam mengawasi dan mengatur berbagai hal terkait dengan perpindahan senjata yang termasuk di dalamnya adalah kegiatan ekspor impor bisa dilihat dalam Decision 552 sebagai berikut:

"The Member Countries commit themselves to send the General Secretariat, within a maximum period of one month after the signing of the Coordinated Agenda of Action, copies of national legislation that is in force with regard to the illicit manufacture, import, export, transfer, sale, brokerage, transport, possession, concealment, usurpation, carrying and use of small arms and light weapons in all their aspects."

Sementara itu komitmen Sekretariat Jenderal bekerjasama dengan koordinasi nasional terlihat dalam pernyataan berikut:

"The General Secretariat, in coordination with the National Coordinating Committees - National Focal Points-, will convene, within a maximum period of nine months after the signing of the Coordinated Agenda of Action, a meeting of officials who are competent on the subject to identify and implement viable alternatives for ensuring the strict rendering of accounts to the competent national agency and effective control over all arms and weapons belonging to, carried by and in the possession of manufacturers, importers, sellers, brokers, and users, individuals and legal entities through, inter alia, the registration and/or inventorying, collection, safe storage, destruction or responsible elimination of small arms and light weapons."

Dari semua bukti ini menunjukkan bahwa Decision 552 sudah memenuhi Kriteria keempat dari sepuluh hal yang harus dilakukan untuk mengatasi SAT menurut Rachel Stohl.

Pada bagian kelima, Rachel Stohl menekankan pada aspek pengawasan terhadap *arms end-user*. Pengawasan ini lebih dititikberatkan pada negara-negara pengekspor senjata. Proses ini penting untuk mencegah kehilangan jejak dari keberadaan senjata dan mencegah jatuhnya senjata ke pasar gelap. Menurut Stohl, pengawas pengguna terakhir harus bisa memastikan bahwa senjata tidak jatuh ke tangan orang yang salah. Karena rata-rata setiap negara tidak memiliki kontrol yang baik atas pengguna terakhir, organisasi regional atau internasional harus membuat suatu standar pengawasan pengguna akhir senjata yang lebih sistematis dan lengkap pada saat sebelum dan sesudah dikapalkan. Pengawasan Pengguna Senjata terakhir sangat dianjurkan setelah terbongkarnya skandal pembiayaan kartel-kartel narkoba oleh Israel dan Antigua.³⁷

Dalam decision 552, hal ini bisa ditelusuri pada beberapa bagian. Salah satunya adalah pernyataan berikut:

"Strengthen or establish mechanisms for national coordination with the corresponding institutional infrastructure that will be responsible for guiding policy, research and monitoring all aspects of the proliferation, control of and illicit trade in small arms and light weapons."

³⁷ Geoffrey Robertson, QC, *Crimes Against humanity: The Struggle for Global Justice*, (London: The Penguin Press, 1999) Hlm 182

Bagian ini menunjukkan bahwa Andean Community berupaya untuk menjalin kerjasama dengan badan koordinasi pemerintah yang siap melakukan pengawasan terhadap proses perpindahan senjata. Pada saat yang sama, Andean Community juga membentuk pengelolaan database dan sistem komunikasi yang dilengkapi dengan alat-alat yang terspesialisasi untuk melakukan pengawasan perpindahan senjata.

"To set up or develop national databases and communications systems, including specialized equipment, to monitor and control the illicit manufacture, import, export, transfer, sale, brokerage, transport, possession, concealment, usurpation, carrying and use of small arms and light weapons in the national territory and across borders, in keeping with the Operational Plan for Implementing this Agenda."

Mekanisme pengawasan yang dilakukan dalam mengatasi persoalan perpindahan senjata telah direncanakan dengan baik dalam Decision 552.

Pada bagian keenam, Stohl menekankan pada pembentukan infrastruktur penyimpanan senjata yang sistematis dan terlindungi dengan baik. Disamping itu, Stohl menekankan perlunya pemberian pelatihan penegakkan hukum bagi aparat kepolisian dan militer untuk menghadapi pelaku pencuri senjata dan menghindari keterlibatan kedua kelompok oknum ini dalam aksi penyelundupan senjata tajam. Program pemeliharaan dan pengamanan cadangan senjata yang telah dilakukan dalam konteks bilateral dan multilateral harus bisa diimplementasikan pada level internasional ketimbang pada tingkat lokal.

Terkait dengan konsep rezim dan integrasi, saran Stohl yang keenam ini merupakan langkah untuk membentuk kesamaan persepsi mengenai penyelesaian persoalan dalam SAT di negaranya.

Dalam Decision 552, hal-hal yang telah disebutkan oleh Stohl dalam saran keenamnya telah tertera. Salah satunya menyangkut persoalan kerjasama antar institusi dalam mengawasi tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban untuk mengimplementasikan agenda yang telah dikoordinasi terkait dengan identifikasi dan penghancuran cadangan senjata ilegal

"To encourage a joint effort between the institutions that are responsible for ensuring compliance with and the full implementation of this Coordinated Agenda of Action and local communities to identify and eradicate illegal stockpiles of arms and weapons."

Universitas Indonesia

Langkah Andean Community untuk melakukan pencerdasan kepada pihak-pihak penegak hukum agar pelaksanaan agenda bisa berjalan dengan baik, disamping itu juga menghindari keterlibatan para oknum dalam aksi kejahatan SAT juga terlihat dalam pernyataan berikut.

"To carry out or improve national training programs to build up the institutions that are responsible for ensuring compliance with and the full implementation of this Coordinated Agenda for Action."

Pada bagian ketujuh, Rachel Stohl mendorong perlunya ditetapkan mekanisme penghancuran senjata-senjata berlebih khususnya di daerah konflik untuk memastikan bahwa senjata tersebut tidak jatuh ke pasar gelap. Banyak negara telah membuat program untuk menyediakan bantuan teknis dan keuangan untuk menghancurkan senjata. Namun program ini perlu diperluas dan perlu juga memberikan bantuan kepada negara yang membutuhkan bantuan baik teknis maupun financial.

Terkait dengan konsep rezim dan integrasi, langkah ketujuh ini masih merupakan upaya untuk menseragamkan langkah negara untuk menghasilkan *impact* yang besar dalam rangka menghentikan SAT di kawasan Andean. Dalam Decision 552, upaya untuk menerapkan mekanisme penghancuran senjata bisa dilihat dalam pernyataan berikut:

"To ensure the destruction of illicit arms and weapons that have been collected or seized or, if deemed pertinent, their transfer to the State."

Mengenai aktor yang melakukan penghancuran senjata, dalam hal ini Andean Community mengandalkan badan resmi pemerintah setempat untuk menghancurkan semua senjata kecuali untuk senjata yang telah terdaftar.

"The identification and destruction by competent national officials of illicit small arms and light weapons and of the surplus inventory of arms and weapons that are obsolete or have been confiscated and are being held by the State, unless they have another officially authorized use, provided that these arms and/or weapons have been duly marked and registered;"

Dalam pasal lain diatur mengenai pengelolaan data dan pelaksanaan pelatihan terkait dengan upaya untuk menyelesaikan persoalan perpindahan senjata.

"Each National Coordinating Committee -National Focal Point- will have a database that will contain, but not be limited to, information about: the illicit manufacture, import, export, transfer, sale, brokerage, transport, possession, concealment, usurpation, carrying and use of in all their aspects; also about the small arms and light weapons that have been stolen, lost, seized and recovered, as well as those destroyed and planned for destruction. Each National Coordinating Committee -National Focal Point- will inform the General Secretariat about the actions it plans to undertake in order to start up its training programs and put its national database into place"

Andean Community dalam hal ini diwakili oleh Sekretariat Jenderal berkerjasama dengan Badan Koordinasi Nasional dalam waktu 9 bulan harus sudah menetapkan acuan untuk proses penghancuran senjata tersisa.

"The General Secretariat, in coordination with the National Coordinating Committees - National Focal Points- , will organize, within a maximum period of nine months after the signing of the Coordinated Agenda of Action, a meeting of public and private experts to define the policy guidelines for guaranteeing effective control, oversight, safe stockpiling and responsible destruction or elimination of small arms or light weapons belonging to or in the possession of the State. Guidelines and procedures should also be established to ensure that surplus inventories of those arms and weapons are safely stored, destroyed or eliminated in a responsible way."

Selain para ahli, Sekretariat Jenderal juga mengundang para pejabat yang kompeten dan relevan dalam penyelesaian persoalan SAT untuk mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin akan dihadapi dalam melakukan penghancuran senjata.

"The General Secretariat, in coordination with the National Coordinating Committees - National Focal Points-, will convene, within a maximum period of nine months after the signing of the Coordinated Agenda of Action, a meeting of officials who are competent on the subject to identify and implement viable alternatives for ensuring the strict rendering of accounts to the competent national agency and effective control over all arms and weapons belonging to, carried by and in the possession of manufacturers, importers, sellers, brokers, and users, individuals and legal entities through, inter alia, the registration and/or inventorying, collection, safe storage, destruction or responsible elimination of small arms and light weapons."

Universitas Indonesia

Disamping itu, Andean Community melalui Decision 552 menghimbau kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap negara untuk menuntaskan agenda yang telah ditetapkan oleh Andean Community.

"The Member Countries should guarantee the destruction or transfer to the State of small arms and light weapons that have been seized or confiscated. They should also make certain that national authorities responsible for ensuring compliance with and the full implementation of this Andean Plan work with local communities to facilitate the removal and destruction of small arms and light weapons that have been voluntarily surrendered and the detection of illegal stockpiles of such arms and weapons."

Pada bagian kedelapan, Stohl menekankan pada pentingnya kerjasama antar setiap unsur baik ditingkat nasional, regional maupun internasional lebih ditingkatkan unsur-unsur yang disebut meliputi penegak hukum, penjaga keamanan perbatasan, dan petugas beacukai. Keseluruhan unsur ini harus menggunakan ketelitiannya untuk menggagalkan setiap aksi penyelundupan senjata pada titik masuk dan segera melakukan identifikasi kepemilikan senjata.

Dalam Decision 552, indikasi ini bisa dilihat pada beberapa bagian. Bagian pertama bisa dilihat pada hal berikut.

"Create an Operating Committee that will be responsible for coordinating and harmonizing efforts to prevent, combat and eradicate illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects."

Pernyataan tersebut menunjukkan pentingnya harmonisasi dilakukan antar setiap elemen dalam rangka mencegah dan memerangi perdagangan senjata gelap. Pernyataan lain menunjukkan bahwa badan koordinasi pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan penegakan hukum yang berkaitan penyelesaian persoalan SAT di kawasan Andean.

"To promote cooperation and the exchange of information among the National Coordinating Committees -National Focal Points- , the institutions responsible for ensuring compliance with and the full implementation of the law and of this Plan, and pertinent international organizations concerned with the issue, in order to coordinately address the problem of the illicit proliferation of small arms and light weapons in all its aspects."

Kerjasama dilakukan tidak hanya dengan aparat pemerintah tetapi juga berupaya melibatkan para ahli yang bidangnya relevan dengan penanganan persoalan SAT.

"To cooperate with interested experts and representatives of civil society in preventing, combating and eradicating the problem of the illicit proliferation of and trafficking in small arms and light weapons in all its aspects."

Pada bagian kesembilan, Stohl menekankan kepada perlunya memperluas wawasan tentang senjata kepada individu baik militer maupun sipil untuk menghindari upaya penjualan senjata ke pasar gelap. Pemerintah harus secara teratur menghitung jumlah stok senjata militer dan cadangannya dan pemilik senjata resmi harus segera melaporkan apabila senjata mereka hilang atau dicuri kepada pihak yang berwenang. Bila dikaitkan dengan konsep integrasi dan rezi, upaya pemerintah dalam melakukan proses pencerdasan masyarakat sipil dan militer ini bertujuan untuk menyamakan persepsi negara dan unsur-unsur yang berada di dalamnya.

Dalam Decision 552, pencerdasan masyarakat sipil dan militer juga menjadi isi dari kesepakatan tersebut. Pada bagian tujuan hal ini disebutkan mengenai pentingnya memberikan kesadaran kepada masyarakat mengenai dampak negative dari SAT.

"To advance public awareness campaigns on the dangers and negative effects of the indiscriminate use of and illicit trade in small arms and light weapons"

Pada bagian lain, Decision 552 juga menjelaskan mengenai peningkatan kesadaran masyarakat sipil dalam memerangi SAT.

"The creation of citizen consciousness of the proliferation of and illicit trade in small arms and light weapons;"

Keterlibatan masyarakat sipil secara aktif dalam memformulasikan dan mengimplementasikan program nasional melawan aksi SAT kembali disebutkan dalam Decision 552 dalam pasal lain:

"The active involvement of civil society in formulating and implementing a national program of action to address the problem in a comprehensive and sustainable way;"

Pada bagian penguatan operasional dan institusional, pesan untuk memncerdaskan unsur-unsur pemerintah dalam menghadapi SAT kembali disebutkan dalam Decision 552:

"To support and promote training and exchange programs between the General Secretariat, the National Coordinating Committees -National Focal Points- and community leaders or representatives of civil society to enhance their capacity and ensure the existence of a constructive dialogue that will lead to concrete action."

Pada bagian kesepuluh, Stohl mengingatkan pentingnya peran negara dalam menghentikan produksi senjata rakitan. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah jatuhnya senjata-senjata tersebut ke pasar gelap. Pemerintah tidak boleh meremehkan persoalan tersebut karena senjata-senjata rakitan ini memiliki potensi menimbulkan dan memperluas konflik bersenjata. Pengawasan secara efektif atas pembuatan, penjualan, percaloan, hingga ke pendaftaran harus dilakukan sebagaimana dikatakan dalam Decision 552:

"Effective control of manufacturers, sellers, brokers, financiers and transporters of small arms and light weapons."

Decision 552 menganjurkan pemerintah untuk melakukan penyitaan senjata-senjata yang dibuat atau dipindahkan secara ilegal, hal ini bisa dilihat sebagai berikut:

"Seizure and confiscation by the State of all small arms and light weapons that are manufactured, transported or in transit without or in violation of the corresponding licenses, permits or written authorizations, as well as the application of the sanctions provided for in domestic law."

Kesepuluh saran Stohl ini bisa ditemukan relevansinya dalam Decision 552 Andean Community. Hal ini menunjukkan bahwa secara teoritis, decision 552 memiliki potensi untuk menjadi suatu kebijakan yang efektif dalam menghentikan SAT di kawasan Andean.

3.2. Realitas Implementasi Decision 552

3.2.1. Kekerasan Bersenjata Pasca Decision 552

Sebagaimana suatu kebijakan, Decision 552 sudah sesuai dengan konsep yang terkait dengan upaya penghentian SAT dengan menggunakan parameter 10 saran menurut Rachel Stohl. Hal ini menunjukkan bahwa Decision 552 telah lulus uji secara teori dan konsep. Namun ada satu aspek penting yang harus diamati dalam mengatasi SAT. Aspek tersebut adalah aspek implementasi. Subbab ini akan melihat bagaimana implementasi dari decision 552 yang dilakukan oleh Kolombia dan bagaimana dampaknya juga terhadap Kolombia.

Dalam mengatasi SAT, kolombia tidak hanya negara yang memiliki peran paling aktif dalam merealisasikan terbentuknya decision 552, tetapi juga menjadikan Decision 552 sebagai salah satu regulasi di tingkat internasional yang dijadikan acuan dalam melakukan aksi-aksi pemberantasan penyelundupan senjata di Kolombia. Untuk memperluas cakupan regulasinya pemerintah Kolombia juga menyertakan regulasi-regulasi lain di luar Decision 552 ditingkat internasional. Tabel dibawah ini menunjukkan regulasi-regulasi yang menjadi parameter pemerintah Kolombia dalam menghentikan SAT di Kolombia.

Tabel 3.2
Peraturan Penandaan Senjata di Kolombia

Peraturan Yang Mengatur dan Mendefinisikan Penandaan Senjata, Amunisi, dan Bahan Peledak		
Peraturan Internasional	Peraturan Domestik	Prosedur Internal
1. Konvensi menentang produksi dan penyelundupan senjata, amunisi dan bahan peledak dan hal terkait lainnya yang terkandung di dalam negeri sesuai dengan hukum 737 tahun 2002. 2. Konvensi larangan pembuatan dan keluar masuk barang berupa bahan peledak sesuai dengan hukum 381 tahun 2003 3. Decision 552 Andean Community	1. Ketetapan 2535 tahun 1993, artikel 52, 53 y 54 2. Ketetapan peraturan 2535 tahun 1993, article 18 3. Dekrit 334 tahun 2002 dimana peraturan tentang bahan peledak kembali dimunculkan.	1. Prosedur internal industry militer yang dibentuk oleh NTC ISO 9000 dan 9001 sistem pengawasan kualitas.

Sumber: UN Office on Drugs and Crime "Violence, Crime, and Illegal Arms Trafficking in Kolombia" Diakses dari www.unodc.org/pdf/Colombia_Dec06_en.pdf

Tabel di atas menunjukkan bahwa Decision 552 melengkapi regulasi-regulasi sebelumnya yang dijadikan acuan untuk mengatasi SAT di Kolombia khususnya dalam melakukan pendataan senjata. Pendataan senjata adalah proses yang disarankan oleh Stohl untuk menjejaki keberadaan senjata agar tidak jatuh ke pasar gelap. Proses ini menjadi sangat penting karena tingkat mobilitas dari senjata kecil sangat tinggi. Tingkat mobilitas yang tinggi ini disebabkan oleh sifat dari senjata kecil yang mudah digunakan, mudah untuk dibawa, tahan lama dan mematikan.³⁸

Proses SAT selalu memiliki korelasi dengan kekerasan bersenjata. Tingginya angka transaksi senjata atau senjata yang melewati perbatasan akan menyebabkan tingginya jumlah senjata yang beredar di suatu negara. Hal ini memudahkan akses seseorang didalam negara tersebut dalam mendapatkan senjata kecil. Senjata-senjata ini kemudian menjadi penyebab terjadinya kekerasan bersenjata di Kolombia. Untuk itu indikasi mengenai naik turunnya jumlah korban kekerasan bersenjata ini menjadi perhatian penting dalam mengamati perubahan dinamika penyelundupan senjata pasca dikeluarkannya decision 552.

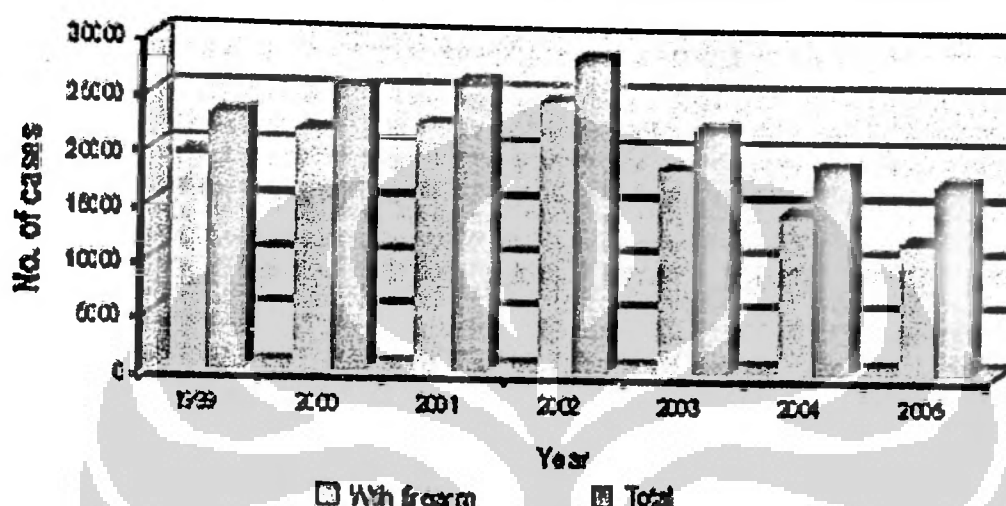
Sesuai dengan data yang didapat dari badan forensik Kolombia yang diambil dari pelaporan UNODC didapat bahwa sampai tahun 2005 setelah dua tahun dicetuskannya Decision 552, jumlah korban yang disebabkan oleh kekerasan bersenjata di Kolombia mengalami penurunan bila dibandingkan dengan perkembangan dari tahun 1999-2003 yang terus menerus mengalami peningkatan.

Komisi hukum Kolombia melaporkan bahwa jumlah orang yang terbunuh karena kekerasan senjata menurun sebanyak 40% dari sebanyak 1.756 orang setiap tahunnya dari tahun 1996-2002, menjadi 1.060 setiap tahunnya dari tahun 2002-2006. Selain itu, menurut *Free Country Foundation*, sebuah LSM di Kolombia melaporkan bahwa terjadi penurunan angka penculikan dari rata-rata

³⁸ Loc Cit., Rachel Stohl. *Fighting the Illicit Trafficking of Small Arms*

2.843 pada tahun 1996-2002 menjadi 1.061 pada tahun 2002-2006. Penyerangan terhadap infrastruktur negara juga berkurang dan pemilihan umum pada bulan Oktober 2007 merupakan pemilihan paling aman sepanjang 10 tahun terakhir.³⁹

Grafik 3.1
Penggunaan Senjata Kecil Dalam Kasus Pembunuhan 1999-2005



Sumber: UN Office on Drugs and Crime "Violence, Crime, and Illegal Arms Trafficking in Kolombia" Diakses dari www.unodc.org/pdf/Colombia_Dec06_en.pdf

Tabel di atas menunjukkan bahwa keterlibatan senjata dalam aksi-aksi kekerasan dan pembunuhan sangat tinggi. Lebih dari 80% korban kekerasan ini dibunuh dengan menggunakan senjata api. Selebihnya korban dibunuh dengan menggunakan senjata tumpul.

Tabel 3.3
Angka Pembunuhan dan Kematian Terkait Dengan Konflik Senjata 1999-2005

Year	Total homicides	Deaths related to the armed conflict	Participation M. C. A / H
1999	23,209	1,740	7,50%
2000	25,681	1,865	7,26%
2001	26,311	2,212	8,41%
2002	28,534	3,291	11,53%
2003	22,199	3,878	17,47%
2004	18,888	3,334	17,65%
2005	17,331	3,321	19,16%
Total	162,153	19,641	12,11%

³⁹ Michael Bustamante and Sebastian Chaskel, Colombia's Precarious Security, *Current History Journal of Contemporary World Affairs*, Vol 107, 2008 Hlm 78.

Sumber: UN Office on Drugs and Crime "Violence, Crime, and Illegal Arms Trafficking in Kolombia" Diakses dari www.unodc.org/pdf/Colombia/Dec06_en.pdf

Faktor kemudahan untuk digunakan, dibawa, dan mematikan dari senjata kecil membuat senjata ini menjadi senjata pembunuh paling efektif. Karena itu tidak jarang senjata jenis ini banyak ditemukan di daerah konflik seperti di Kolombia. Tabel berikut menunjukkan jumlah dan jenis senjata yang digunakan dalam berbagai aksi kekerasan bersenjata selama Bulan Januari sampai Bulan April 2005. Senjata jenis revolver menduduki posisi tertinggi karena ukurannya yang kecil dan mudah didapatkan karena institusi kepolisian dan militer juga menjadi pengguna senjata ini. Dari tabel dibawah ini juga kita bisa melihat bahwa pada posisi tiga urutan tertinggi, senjata yang mendominasi masih merupakan senjata kecil.

Tabel 3.4
Senjata Yang Digunakan Dalam Aksi Kriminal Januari-April 2005

Kategori	Kuantitas
Revolver	4.317
Hand gun	2.243
Pistol	1.243
Senjata Serbu	78
Karabiner	33
Senapan mesin ringan	19
Jenis senapan api lainnya	9
Mortir	4
Senapan mesin	2
Bazoka	2
Roket	3
Peluncur Granat	2
Total	7.955

Sumber: Small Arms Survey diakses dari

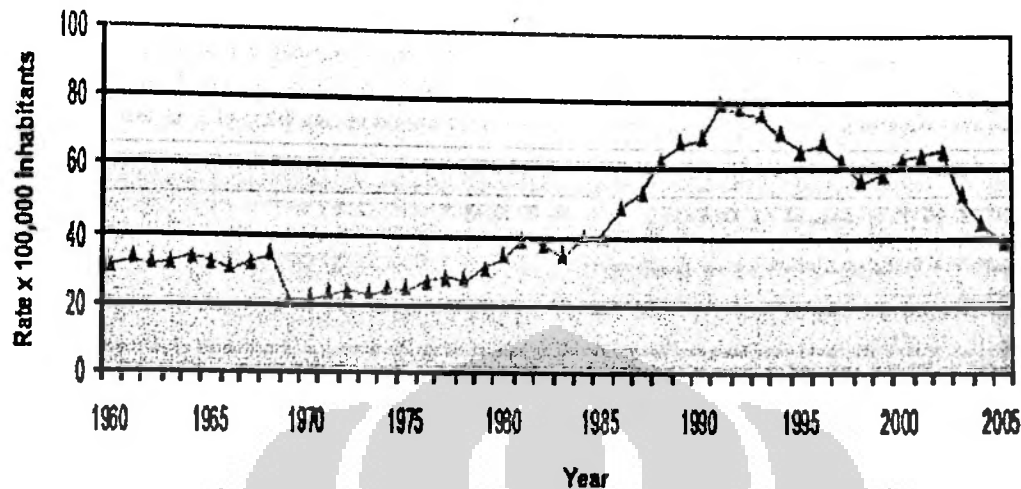
http://hei.unige.ch/sas/files/sas/publications/year_b_pdf/2006/French%202006/CH9%20Colombia_FR.pdf

Total korban yang diakibatkan oleh kekerasan bersenjata sejak tahun 1960 menciptakan pola yang terus meningkat. Namun dari kenaikan tersebut, Kolombia mengalami tiga fase penurunan jumlah korban kekerasan bersenjata. Pada fase pertama yaitu antara tahun 1968-1970. Penurunan pada fase ini disebabkan oleh dibentuknya kesepakatan antara kelompok-kelompok kekuatan dominan dengan front nasional.

Fase kedua yaitu antara tahun 1990-1998, penurunan pada fase ini tidak hanya terjadi di level nasional tetapi juga di level internasional. Keadaan ini disebabkan oleh deklarasi “perang” terhadap narkoba yang dilakukan oleh AS dan Kolombia. Kedua negara ini menargetkan kartel-kartel narkoba sebagai sasaran utama. Antara tahun 1999-2002, program pemberantasan kartel-kartel narkoba yang dilakukan oleh AS dan Kolombia direstrukturisasi. Hal ini memberikan celah kepada kartel untuk kembali merebut pasar narkoba. Setelah sejumlah kartel dihancurkan, banyak anggota dari kartel yang berpindah ke pinggiran kota dan mulai bergabung dengan kelompok paramiliter. Pada masa ini banyak kelompok-kelompok bersenjata yang menjaga ladang kokain. Hal ini mengakibatkan kembali meningkatnya korban kekerasan bersenjata. Pada masa ini juga bermunculan kelompok-kelompok yang memegang organisasi kriminal penting seperti Cacique Nutibara Block di Medellin, The Centaurus Block di Bogota, dan The Catatumbo Block di Cucuta.

Fase ketiga yaitu pada tahun 2003-2005, masa ini ditandai dengan konsolidasi struktur pada tingkat regional dan lokal sehingga kelompok-kelompok ini lebih berhati-hati dan lebih selektif dalam memilih target. Pada fase ini juga ditandai dengan dibentuknya kesepakatan-kesepakatan yang terkait dengan permasalahan kekerasan bersenjata ditingkat bilateral maupun regional yang mendorong berkurangnya korban jiwa akibat kekerasan bersenjata.

Grafik 3.2
Evolusi Tingkat Kematian di Kolombia 1960-2005



Sumber: UN Office on Drugs and Crime "Violence, Crime, and Illegal Arms Trafficking in Kolombia" Diakses dari www.unodc.org/pdf/Colombia/Dec06_en.pdf

3.2.2. *Small Arms Trafficking Pasca Decision 552.*

Permasalahan tingginya angka peredaran senjata ilegal di Kolombia disebabkan oleh akses senjata yang permanen dan berkelanjutan. Besarnya permintaan senjata ini didorong oleh tingginya kebutuhan senjata untuk mendukung aktivitas gerakan perlawanan bersenjata. Menurut data pemerintah, sekitar 80% jumlah senjata ilegal yang masuk ke Kolombia jatuh ke kelompok-kelompok perlawanan bersenjata.⁴⁰ Untuk itu kelompok-kelompok ini menjadi simpul atas persoalan SAT yang begitu kompleks di Kolombia karena selain sebagai pengguna kelompok-kelompok ini juga kerap menjadi pengedar senjata kecil ilegal. Untuk itulah pemerintah memfokuskan upaya penghentian SAT dengan melakukan serangkaian aksi penyitaan senjata yang dimiliki oleh kelompok-kelompok perlawanan yang ada di Kolombia seperti FARC, ELN, dan kelompok paramiliter AUC.

⁴⁰ *Op Cit.*, UNODC

Tabel 3.5
Operasi Utama Menumpas SAT 1997-2003

Operation	Year	Type of weapon confiscated	Group bound for	Place of origin	Place of confiscation/entry of armament
Baboa Operation	1997	Rifles Hand grenades Grenades 40mm	Not specified	Not specified	Not specified
Siberia Operation	1999	7,460 AK-47 rifles, model M1A1, caliber 5,56x45mm	FARC	Not specified	Not specified
Bulgarian Rifles	2000	200 machine guns 2 million machine gun cartridges 40 Grenade launchers 2 sniper rifles	Not specified	Bulgaria	Not specified
Arms for the AU Case	2000	200 PKM machine guns caliber 7,62x54R 2 million cartridges 40 RPG7 missile launchers 2 sniper rifles	AU (Autodefensas Unidas Ilegales)(Illegal United Self- Defense groups)	Romania	Not specified
Otterloo Ship	2001	5,000 AK-47 rifles 6000 bayonets 5 million cartridges	AU (Autodefensas Unidas Ilegales)	Nicaragua	Turbo Antioquia
Nadya Jay Ship Arms Case	2002	1,800 weapons	FARC	Bulgaria	Santa Marta
Confiscation by the National Navy	2003	81 AK-47 rifles 1 revolver 963 cartridges	Not specified	Not specified	Chocó
Jupiler Operation	2003	285,210 cartridges 2,000 450 gram charges of pentolyte 1 shotgun 2 pistols 1 revolver	Not specified	Not specified	Solano, Caquetá

Sumber: UN Office on Drugs and Crime "Violence, Crime, and Illegal Arms Trafficking in Kolombia" Diakses dari www.unodc.org/pdf/Colombia_Dec06_en.pdf

Setiap tahunnya, Militer Kolombia bekerjasama dengan kepolisian nasional dan unit DAS melakukan operasi penyitaan senjata yang dimiliki oleh kelompok ilegal. Menurut informasi yang berhasil dihimpun oleh tentara Kolombia sejak tahun 2004-2005, institusi keamanan pemerintah ini telah berhasil mencatat kemajuan berarti dari segi kuantitas senjata yang berhasil disita dalam setiap operasi yang digelar. Tercatat pada tahun 2004, lebih dari 3000 senjata berhasil disita. 48,4% dari total senjata tersebut merupakan kepemilikan kelompok pertahanan ilegal. 43,7% dari total senjata adalah milik FARC dan sisanya 7,7% adalah milik ELN.

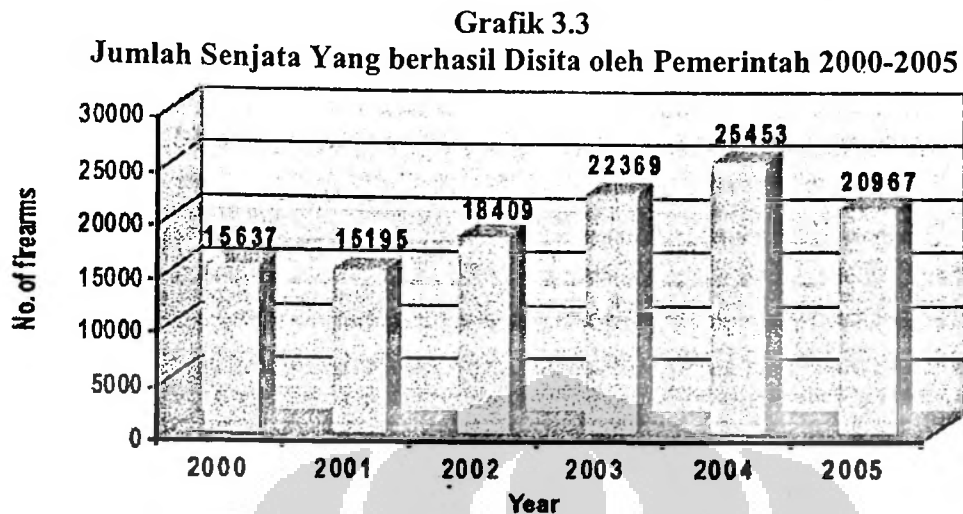
Pada tahun 2005, jumlah senjata yang berhasil disita menurun hal ini karena pasokan senjata kelompok itu sendiri berkurang akibat aksi penyitaan yang dilakukan pada tahun 2004. Pada tahun ini 2004 jumlah senjata yang disita sebanyak 1.475 pucuk sementara pada tahun 2005, senjata yang disita hanya berjumlah 526 pucuk senjata. Dari total 1.982 senjata yang berhasil disita pada tahun 2005, 63,4% merupakan milik FARC. Tabel dibawah ini menunjukkan kuantitas dan jenis senjata yang berhasil disita oleh pemerintah Kolombia pada periode 2004-2005.

Tabel 3.6
Tipe dan Jumlah Senjata Yang Disita dari Kelompok Pemberontak 2004-2005

TYPE OF WEAPON	2004				2005				2004-2005
	Self-Defense	ELN	FARC	Total	Self-Defense	ELN	FARC	Total	Total
Machine guns	25	2	0	34	7	1	27	35	69
AVN	8	1	7	16	3	1	20	24	40
Rifles	1,475	237	1,332	3,044	526	198	1,258	1,982	5,026
Carbines	47	11	170	228	20	5	86	111	339
Submachine guns(D)	65	17	34	116	29	15	77	121	237
Pistols	414	118	626	1,158	202	115	616	933	2,091
Revolvers	441	119	488	1,048	229	128	505	862	1,910
Shotguns	260	74	439	773	134	74	403	611	1384
Grenade launchers	54	8	21	83	19	3	22	44	127
Mortars	103	11	132	246	26	18	246	290	536
Grenades	2,106	363	8,638	11,107	1,107	413	9,804	11,324	22,431
Missile launchers	16	1	18	35	13	4	12	29	64
Telescopic sight	4	3	13	20	4	1	12	17	37
Ammunition (D)	598,650	46,582	1'007,015	1'652,247	309,762	41,658	1'150,946	1'502,366	3'154,613
Magazines	5,433	975	5,823	12,331	2,606	784	4,438	7,828	20,159
Night vision equipment	2		982	984	3	1	51	55	1,039

Sumber: UN Office on Drugs and Crime "Violence, Crime, and Illegal Arms Trafficking in Kolombia" Diakses dari www.unodc.org/pdf/Colombia_Dec06_en.pdf

Grafik berikut menunjukkan jumlah senjata yang berhasil disita oleh pemerintah Kolombia sejak tahun 2000-2005.



Sumber: UN Office on Drugs and Crime "Violence, Crime, and Illegal Arms Trafficking in Kolombia" Diakses dari www.unodc.org/pdf/Kolombia_Dec06_en.pdf

Dari data diatas maka dapat dilihat bahwa pasca 2003, terjadi perubahan yang signifikan dari segi jumlah senjata yang beredar di Kolombia.

3.2.3. Manajemen Kontrol Senjata Di Kolombia

Aspek lain yang perlu diperhatikan terkait dengan upaya Kolombia dalam menghentikan SAT sebagai bagian dari implementasi Decision 552 adalah manajemen pengawasan senjata di Kolombia. Aspek ini dilihat dari unsur-unsur birokrasi yang terlibat dalam rangkaian *Production, Control, Confiscation, Sanctioning, Distribution, Collection and Destruction*. Sebagai negara dengan tingkat kompleksitas persoalan SAT yang tinggi, Kolombia menerapkan pengawasan berlapis dalam pengawasan senjata di negaranya. secara umum, pengawasan senjata dibagi dalam dua bagian yaitu pengawasan yang dilakukan oleh unsur militer yang dikepalai oleh *Army general command* dan pengawasan yang dilakukan oleh unsur sipil pemerintah yang dikepalai oleh kepala DCCA (*Department of Control of Arms, Ammunition and Explosive Trade*). Selain itu, DCCA juga bertugas untuk mengawasi dan menyusun semua informasi yang terkait dengan prosedur, memferivikasi semua dokumen mengenai senjata yang akan digunakan oleh warga sipil. Tabel dibawah ini merupakan unsur-unsur

pemerintah Kolombia memiliki tanggung jawab dalam proses pengawasan senjata di Kolombia.⁴¹

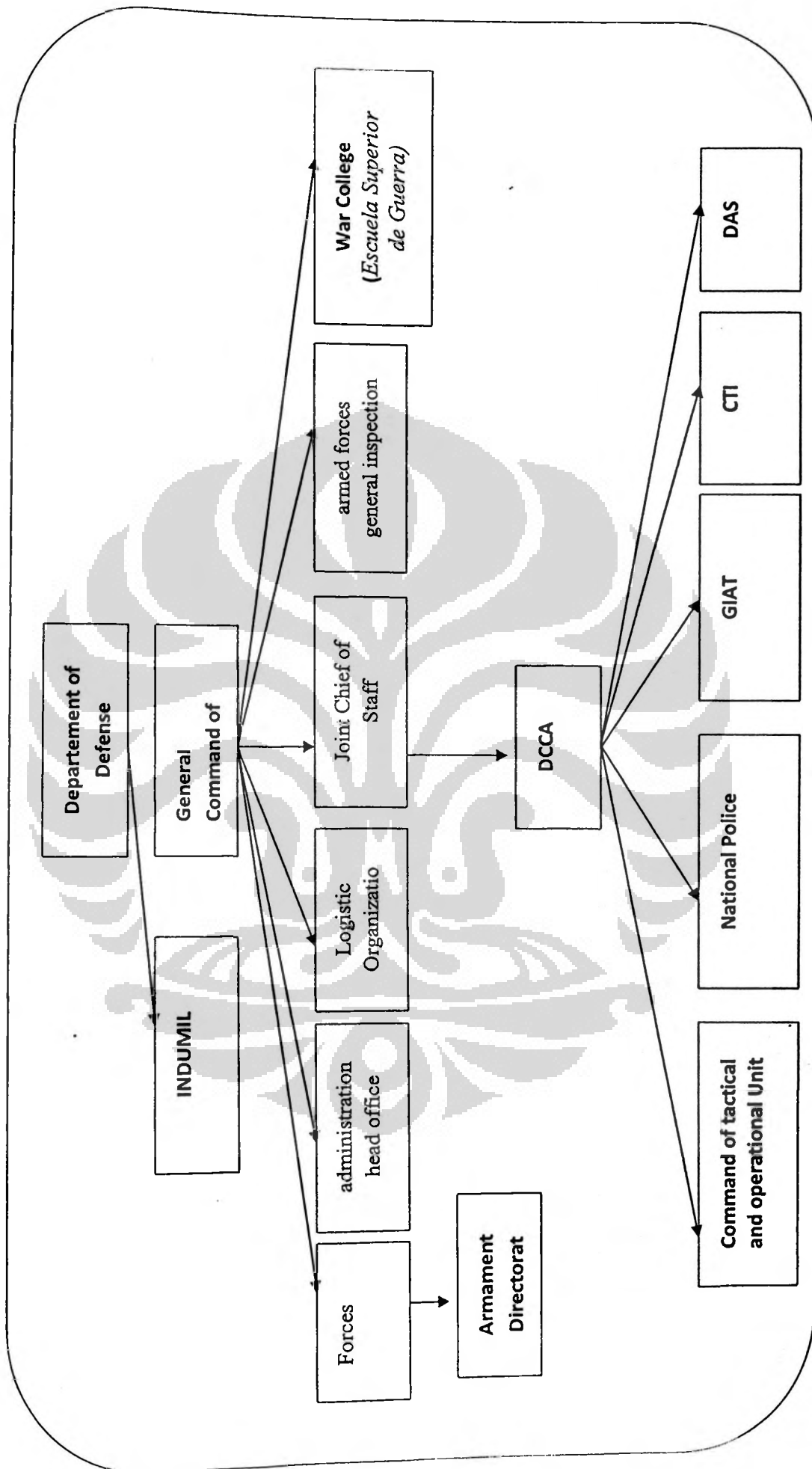
Tabel 3.7
Institusi Pemerintah Kolombia Dalam Menghentikan SAT di Kolombia

No.	Lembaga Pengawasan Unsur Militer	Lembaga Pengawasan Unsur Sipil
1.	<i>General Command</i>	<i>Departement of defense</i>
2.	<i>Joint Chief of Staff</i>	<i>DCCA</i>
3.	<i>Armed Force General Inspection</i>	<i>DAS (administrative department of security)</i>
4.	<i>Administrative head office</i>	<i>GIAT (interinstitution anti-terrorist Analysis Group)</i>
5.	<i>Logistic Organization</i>	<i>War College (Escuela Superior de Guerra)</i>
6.	<i>Armament directorate (each Force)</i>	<i>CTI (technical investigation unit for prosecutor)</i>
7.	<i>Command of tactical or Operational unit</i>	<i>National Police</i>

Sumber: Diolah dari UN Office on Drugs and Crime "Violence, Crime, and Illegal Arms Trafficking in Kolombia" Diakses dari www.unodc.org/pdf/Colombia_Dec06_en.pdf hlm 49-54.

⁴¹ *Ibid.*, Unodc hlm 49-54

Gambar 3.4
Struktur Organisasi Otorisasi Pengawasan Senjata di Kolombia



Secara struktural, pengawasan senjata yang dilakukan oleh institusi militer maupun sipil berakhir di meja *General Command* Karena DCCA sebagai kordinator pengawasan senjata di kalangan sipil dan institusi pemerintah bertanggung jawab kepada *Joint Chief of Staff*, sehingga bisa dilihat sistem pengawasan senjata di Kolombia bermuara pada satu titik yaitu *General Command*.

Disamping kedua unsur tersebut, pemerintah Kolombia juga memiliki GIAT. Dengan berkantor dan menggunakan fasilitas milik DAS, lembaga ini berfokus pada SAT di Kolombia. Didalamnya terdiri dari anggota yang berasal dari DAS, intelijen negara, militer, dan kepolisian. Tugas dari badan ini adalah mengumpulkan senjata-senjata yang disita untuk dianalisa untuk keperluan investigasi dan analisa intelijen untuk menemukan jalur peredaran dan penyelundupan senjata yang keluar masuk Kolombia. Lebih jauh lagi lembaga ini juga bertugas menjalin kerjasama dengan lembaga serupa di level regional maupun internasional dalam rangka memerangi kasus penyelundupan senjata illegal seperti CICAD, CICTE, dan OAS.⁴²

Meskipun perannya cukup sentral, namun lembaga ini memiliki kekurangan yang sangat disayangkan oleh penulis karena sangat menghambat proses pengehentian SAT di Kolombia. Kekurangan pertama adalah karena GIAT tidak memiliki *operational force* yang sering menghasilkan perbedaan persepsi mengenai urgensi ancaman. Kekurangan kedua adalah tidak adanya wewenang kepada GIAT untuk membuat suatu *operational planning and capacity*. Sehingga hanya menjadikan lembaga ini sebagai lembaga analisa untuk kepentingan investigasi. Bagan dibawah ini merupakan struktur institusi yang berwenang dalam mengatasi persoalan SAT di Kolombia.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa Kolombia telah menerapkan sistem dan mekanisme pengawasan hingga ke proses penghancuran dengan membentuk beberapa lembaga yang memiliki tugasnya masing-masing dalam mengelola peredaran senjata di Kolombia.

Stohl juga menyebutkan soal pembelajaran bagi masyarakat sipil mengenai senjata dan bahayanya. Menurut Stohl pemerintah harus memperluas

⁴²*Ibid.*, Unodc, hlm. 70

wawasan tentang senjata baik kepada warga sipil maupun militer. Dalam Decision 552, perihal ini juga tercantum didalamnya. Dalam implementasinya, Kolombia melakukan proses pembelajaran kepada masyarakat sipil. Sejumlah 45 pembelajaran mengenai pelucutan senjata telah dilaksanakan di tingkat lokal. Dengan menggunakan instrumen kewaspadaan yang berbeda. Pemerintah Kolombia melibatkan 550.000 orang dengan sekitar 75% pesertanya adalah remaja dan anak-anak. Sebanyak 111.083 senjata telah dihancurkan. Namun yang perlu disayangkan tidak semua senjata ini berasal dari penduduk, sebagian besar berasal dari cadangan senjata milik angkatan bersenjata untuk menghindari jatuhnya senjata tersebut ke pasar gelap.⁴³

Dari beberapa fakta di lapangan maka dapat disimpulkan bahwa Decision 552 telah diimplementasikan di Kolombia dan berpengaruh terhadap beberapa hal yaitu: menurunnya jumlah korban akibat kekerasan bersenjata, menurunnya jumlah senjata yang beredar secara ilegal karena upaya pemerintah Kolombia yang gencar melakukan operasi penyitaan senjata, sistem dan struktur pengawasan senjata yang berlapis, dan terealisasinya proses pembelajaran kepada masyarakat sipil tentang senjata. Secara Regional, Amerika Latin menunjukkan perkembangan yang baik selama beberapa tahun terakhir (2008) dalam hal ekonomi dan demokrasi. Pada sisi keamanan juga tidak menunjukkan adanya ancaman yang signifikan.⁴⁴

3.3. Kategorisasi

Setelah meneliti Decision 552 sebagai instrumen kebijakan yang dimiliki oleh Andean Community dalam mengatasi persoalan penyebaran senjata ilegal di kawasan dan mencari relevansinya dengan sepuluh saran Rachel Stohl dalam mengatasi SAT dan melihat bagaimana kebijakan tersebut bisa diimplementasikan dan membawa perubahan di tingkat negara yang dalam hal ini menggunakan kasus Kolombia yang memiliki intensitas kompleksitas persoalan SAT yang tinggi, maka penulis melihat bahwa ada tiga hal penting yang harus diperhatikan

⁴³ *Ibid.*, Unodc hlm. 90

⁴⁴ Jorge Castaneda and Patricio Navia, "New Priorities for Latin America" *Current History Journal of Contemporary World Affairs*, Vol 107, 2008, Hlm 213

dalam mengatasi persoalan SAT dalam suatu kawasan dimana integrasi kawasan tersebut menjadi satu hal yang harus dipertimbangkan dan menjadi tujuan akhir dari kebijakan. Ketiga hal tersebut yaitu (1). peningkatan interaksi dan komunikasi antar negara dalam kawasan, (2). Penyeragaman pengetahuan, persepsi mengenai persoalan senjata di setiap negara melalui proses pembelajaran, (3). Peningkatan otoritas institusi yang bergerak dalam upaya penghentian SAT baik di level regional maupun internasional. Ketiga hal ini merupakan inti dari aksi-aksi yang harus dilakukan dalam menghentikan SAT dalam kerangka regional. Untuk itu, maka Singkronisasi antara 10 saran Rachel Stohl dengan konsep integrasi, rezim dan *non-traditional security* bisa disederhanakan lagi menjadi:

Tabel 3.8
Kategorisasi I

Konsep Rezim dan Integrasi	Small Arms Trafficking	Action 2,5,8	Action 6,7,9,10	Action 1,3,4
V1: Kesamaan nilai dan Intensitas interaksi				
V2: pembentukan persepsi negara dan Kelompok internal				
V3: peningkatan otoritas institusi				

Tabel diatas menunjukkan bahwa sepuluh aksi yang disarankan oleh Rachel Stohl bisa dikategorisasikan dalam tiga klasifikasi. Ketiga klasifikasi ini merupakan proses yang berjalan, diterapkan oleh Andean Community dan hasilnya bisa dilihat dalam studi kasus di Kolombia. Untuk itu penulis menilai bahwa ketiga klasifikasi yang merupakan kombinasi antara konsep rezim dan integrasi bisa dilihat sebagai suatu strategi dalam mengatasi SAT dengan menggunakan kerangka regional namun tetap banyak melibatkan institusi

nasional, sementara aksi 1-10 merupakan taktik atau aksi nyata yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Strategi dan aksi ini bisa dikategorisasikan menurut wilayah implementasi kebijakan. Wilayah ini dibagi menjadi dua, domestik dan regional. Jika dibagi kategorisasikan berdasarkan wilayah implementasi, maka bisa dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.9
Kategorisasi 2

Konsep Rezim dan Integrasi	Small Arms Trafficking	Domestik	Regional
V1: Kesamaan nilai dan Intensitas interaksi		Action 5	Action 2 Action 8
V2: pembentukan persepsi negara dan Kelompok internal		Action 6 Action 7 Action 9 Action 10	
V3: peningkatan otoritas institusi			Action 1 Action 3 Action 4

Tabel ini menunjukkan bahwa cakupan saran Stohl meliputi dua wilayah yaitu domestik dan regional, disamping itu kesepuluh saran ini juga relevan dengan Decision 552 Andean Community yang merupakan langkah dari upaya Andean Community dalam menghentikan SAT namun tetap mempertahankan integrasi antar negara-negara di Kawasan Andean.

BAB 4

Penutup

4.1. Kesimpulan

Sejak disahkannya Decision 552 pada tahun 2003, Andean Community sebagai organisasi regional yang dibentuk oleh empat negara utama di kawasan Andean, Kolombia, Bolivia, Ekuador dan Peru, telah melakukan suatu langkah besar dalam mengatasi SAT di Kawasan Andean. Dengan menggunakan sepuluh langkah yang dikeluarkan Oleh Rachel Stohl sebagai parameter langkah Konkrit dan Konsep Integrasi, Rezim dan SAT sebagai parameter aksi normatif penulis meneliti bagaimana peran Decision 552 sebagai salah satu instrumen kebijakan Andean Community dalam menghentikan SAT di kawasan Andean dengan melihat bagaimana Decision 552 ini diterapkan dan bagaimana hasilnya di Kolombia.

Skripsi ini didorong oleh dua hipotesis, hipotesis pertama menyatakan bahwa Peran Andean Community dalam mengatasi penyelundupan senjata sangat relevan dengan formasi konsep dimana pada tataran normatif ada nilai-nilai kerjasama yang ingin dibentuk yang mengarah kepada penyelesaian bersama atas persoalan keamanan negara-negara Andean. Untuk membuktikan hal ini penulis terlebih dahulu mencari korelasi antara sepuluh saran Rachel Stohl dengan konsep integrasi dan Rezim. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa Sepuluh saran Rachel Stohl ini searah dengan Konsep rezim dan integrasi sebagaimana formasi konsep dibawah ini.

Small Arms Trafficking	Act 1	Act 2	Act 3	Act 4	Act 5	Act 6	Act 7	Act 8	Act 9	Act 10
Konsep Rezim dan Integrasi										
V1: Kesamaan Nilai & Komunikasi										
V2: Intensitas Interaksi										
V3: Persepsi negara dan Kelompok internal										
V4: Derajat otonomi Institusi										

Proses mencari Korelasi ini penting untuk memastikan bahwa sepuluh saran Rachel Stohl ini bisa menjadi acuan upaya menghentikan SAT dengan menggunakan kerangka kerjasama regional yang mengarah pada suatu integrasi. Dengan adanya korelasi ini, maka Sepuluh saran Rachel Stohl bisa dijadikan sebagai parameter untuk menilai apakah Decision 552 bisa menjadi suatu kebijakan yang tepat untuk mengatasi SAT di Kawasan Andean dengan tetap mengedepankan integrasi dalam Andean Community. Untuk mencapai hal ini penulis mencai relevansi antara Decision 552 dengan sepuluh saran Rachel Stohl. Hasil dari penelitian tersebut bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

No.	Sepuluh Langkah menurut Rachel Stohl	Bagian dalam Decision 552
1.	<i>Action 1</i>	<i>Opening, principles, mechanism (annex I), guidelines in domestic sphere, objectives (annex I).</i>
2.	<i>Action 2</i>	<i>objectives (annex I). guidelines in the subregional Andean sphere,</i>
3.	<i>Action 3</i>	<i>Opening, guidelines in the subregional Andean sphere,</i>
4.	<i>Action 4</i>	<i>Opening, objectives, guidelines in domestic sphere, legislative measures (annex II), operational Plan (legislative measures-execution), Control, Confiscation, Sanctioning, Distribution, Collection and Destruction (execution),</i>
5.	<i>Action 5</i>	<i>guidelines in domestic sphere, Operational and Institutional Strengthening Measures(annex II)</i>
6.	<i>Action 6</i>	<i>Control, Confiscation, Sanctioning, Distribution, Collection and Destruction (execution), Operational and Institutional Strengthening Measures(annex II)</i>
7.	<i>Action 7</i>	<i>Control, Confiscation, Sanctioning, Distribution, Collection and Destruction (execution), guidelines in domestic sphere, Operational and Institutional Strengthening Measures(annex III)</i>
8.	<i>Action 8</i>	<i>guidelines in the subregional Andean sphere, coordinated agenda for action in the subregional cooperation and coordination.</i>
9.	<i>Action 9</i>	<i>modes of action (annex I), guidelines in domestic sphere, Operational and Institutional Strengthening Measures(annex</i>

Universitas Indonesia

10.	<i>Action 10</i>	<i>II), legislative measure (annex III), legislative measure (annex III)</i>
-----	------------------	--

Tabel ini menunjukkan bahwa antara Decision 552 dan sepuluh saran Rachel Stohl memiliki relevansi, hal ini ditunjukkan dengan keterwakilan setiap saran didalam Decision 552. Tabel ini juga sekaligus menjawab hipotesis pertama dari skripsi ini dengan pernyataan bahwa Decision 552 relevan dengan formasi konsep yang merupakan gabungan antara Sepuluh saran Rachel Stohl dengan Konsep integrasi, Rezim dan SAT.

Hipotesis yang kedua menyatakan bahwa pada tataran praktis, upaya yang dilakukan tidak lagi menggunakan pendekatan negara sebagai *unitary actor* melainkan lebih mengedepankan keterlibatan aktor-aktor lain baik negara, maupun institusi regional dan internasional.

Decision 552 secara garis besar menunjukkan bahwa upaya yang harus dilakukan dalam menghentikan SAT di Kawasan Andean Community harus melibatkan dua pihak, Andean Community dalam hal ini diwakilkan oleh *Secretariat General* dan negara yang diwakilkan oleh institusi yang bertugas mengatasi persoalan SAT. Untuk mencari jawaban atas hipotesa ini juga penulis mengamati hubungan antara konsep integrasi, rezim dan SAT dengan sepuluh saran Rachel Stohl. Hasil yang didapat adalah sebagai berikut.

Konsep Rezim dan Integrasi	Small Arms Trafficking	Domestik	Regional
V1: Intensitas interaksi dan komunikasi		Action 5	Action 2 Action 8
V3: pembentukan persepsi negara dan Kelompok internal		Action 6 Action 7 Action 9 Action 10	
V4: peningkatan otoritas institusi			Action 1 Action 3 Action 4

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang kedua ini dapat dibuktikan. Decision 552 menunjukkan bahwa dalam mengatasi SAT, negara tidak bisa melakukannya sendiri, melainkan harus ada aktor lain diluar negara karena persoalan SAT bersifat lintas batas negara.

Penerapan Decision 552 di Kolombia menunjukkan beberapa kemajuan signifikan dalam perkembangan penghentian SAT di Kolombia, hal ini ditunjukkan dalam data-data statistik yang dipaparkan dalam bab 3. Kemajuan ini menjadi bukti bahwa upaya penghentian SAT yang dilakukan oleh Andean Community dengan menggunakan instrumen kebijakan Decision 552 bisa berhasil mengurangi tingginya angka dan dampak yang dihasilkan dari persoalan SAT.

4.2 Saran

Dengan menggunakan pengalaman Kolombia, maka ada beberapa hal yang penulis hendak sampaikan terkait dengan upaya mengatasi SAT.

1. Decision 552 dapat digunakan sebagai *role model* bagi kawasan-kawasan yang memiliki persoalan SAT dan hendak menyelesaikannya dalam kerangka kerjasama regional. Skripsi ini membuktikan bahwa Decision 552 cukup baik tidak hanya dari segi teoritis tetapi juga dari segi implementasi.
2. Belajar dari Kondisi SAT di kawasan Andean, SAT adalah persoalan yang tidak bisa diselesaikan secara tunggal. SAT adalah persoalan yang tidak mengenal adanya *unitary actor*, sifatnya yang *borderless* membuat persoalan ini harus diselesaikan bersama.
3. keseimbangan antara penguatan institusi dan pemberian wewenang menjadi suatu hal yang harus diperhatikan karena penguatan institusi tanpa pemberian wewenang yang cukup hanya akan menghambat efektifitas kinerja dari institusi tersebut dalam menghentikan SAT. Di Kolombia, kasus ini terjadi pada GIAT. Kurangnya wewenang GIAT membuat kinerjanya sangat terhambat padahal institusi ini memiliki peran yang penting dalam proses penghentian SAT di Kolombia.

DAFTAR REFERENSI

I. Buku

- Chalk, Peter. (1997). *Grey Area Phenomena in Southeast Asia*. Australia: Australian National University.
- Creswell, John W. (1994). *Research Design Qualitative and Quantitative Approach*. London: Sage Production.
- Deutsch, Karl. (1957). *Political Community and the North Atlantic Area*. Princeton: Princeton University Press. In Cobb, Roger W./ Elder, Charles. *International Community: A Regional and Global Study*. New York: Holt, Rinehart, and Winston, Inc.
- Feld, Werner J. (1980). *Comparative Regional System*. New York: Pergamon Press.
- Hurrell, Andrew. (1998). *An Emerging Security Community in South America*. In Adler, Emanuel., & Barnett, Michael. *Security Communities*. London: Cambridge University Press.
- Johnson, Derek., & Valencia, Mark. *Piracy in Southeast Asia, Status Issues and Responses*. Singapore: ISEAS Publication.
- Lake, David A. (1997). *Regional Order: Building Security in a New World*. USA: The Pennsylvania University Press.
- Mares, David R. *Regional Conflict Management in Latin America: Power Complemented by Diplomacy*. In Lake, David A. *Regional Orders Building Security in a new World*. Pennsylvania: The Pennsylvania University Press,
- QC, Geoffrey Robertson. (1999). *Crimes Against humanity: The Struggle for Global Justice*, London: The Penguin Press.
- Widjajanto, Andi. *Analisa Data Menurut Pendekatan Kualitatif*. Modul MPS FISIP UI

II. Publikasi Umum

- Bustamante, Michael., & Chaskel, Sebastian. (2008). Colombia's Precarious Security. *Current History Journal of Contemporary World Affairs*. (Vol. 107).
- Castaneda, Jorge., & and Navia, Patricio. (2008). New Priorities for Latin America. *Current History Journal of Contemporary World Affairs*. (Vol. 107).
- Shifter, Michael. (2007). Latin America's Drug Problem. *Current History Journal of Contemporary World Affairs*. (Vol. 106).
- Tickner, Arlene B. (2003). From Counternarcotics to Counterterrorism in Colombia. *Current History Journal of Contemporary World Affairs*. (Vol. 102).

III. Publikasi Elektronik

- Cragin, Kim., & Hoffman, Bruce. *Arms Trafficking and Kolombia*. April 18, 2009. http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/2005/MR1468.pdf
- De Carvalho, Ilona Szabo. *SALW Epidemics in Latin America- A Challenge to human Security*. September 6, 2008. <http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd57/szabo2.pdf>
- Diez, Thomas., & Wiener, Antje. *Introducing the Mosaic of Integration Theory: Its Past, Present ans Future*. Februari 20,2009. <http://www.uni-muenster.de/Politikwissenschaft/Doppeldiplom/docs/IntT.pdf>
- Garcia, Daniel., & Jaramillo, Pena. *War, Peace and Light Weapons in Colombia*. http://www.geneva-forum.org/Reports/salw_vol1/19991129.pdf
- Goehsing, Julia. *A Multi-Pronged Approach to Transnational Criminal Networks: The Case of Latin America and The Carribean*. April 10, 2009. http://interamericanos.itam.mx/working_papers/11GOEHSING.pdf

Reese Erlich. *Blood, Drugs, and Guns Arms Trafficking Fuels Chaos*. Maret 3, 2009.

http://vps.stanleyfoundation.org/initiatives/un21/resources/securitycheck/legal_arms.php

Samhat, Nayef H. *International Regime s and the Prospect to Global Democracy*. Februari 22, 2009.

http://diplomacy.shu.edu/journal/new/pdf/VolVINo1/14_Samhat.pdf

Stohl, Rachel. *Fighting the Illicit Trafficking of Small Arms*. Februari 9, 2009.

<http://www.cdi.org/program/document.cfm?DocumentID=2996>

Stohl, Rachel. *Small Arms in Latin America*. April 18, 2009.

www.cdi.org/pdfs/Small_Arms_Latin_america.pdf

UN Office on Drugs and Crime. *Violence, Crime, and Illegal Arms Trafficking in Kolombia*. Desember 17, 2008.

www.unodc.org/pdf/Colombia_Dec06_en.pdf

Yoshimatsu, Hidetaka. *International Regime, International Society, and Theoretical Relation*. Februari 22, 2009.

<http://www.icsead.or.jp/7publication/workingpp/wp1998/98-10.pdf>

Lampiran 1

DECISION 552

Andean Plan to Prevent, Combat and Eradicate Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in all its Aspects

THE ANDEAN COUNCIL OF FOREIGN MINISTERS,

HAVING SEEN: Articles 1 and 16 of the text of the Cartagena Agreement, codified through Decision 406; the Chapter on Foreign Affairs incorporated into the Cartagena Agreement through Article 4 of the Sucre Protocol; and Decision 458, which approves the Common Foreign Policy Guidelines;

TAKING INTO ACCOUNT: That the Ministers of Foreign Affairs and Defense of the Andean Community Member Countries, meeting in Lima on June 17, 2002, signed the "Lima Commitment: Andean Charter for Peace and Security and the Limitation and Control of the Expenditure on Foreign Defense," through which they agreed to adopt, inter alia, urgent measures to combat illicit trade in weapons, ammunition, explosives and other related materials, due to their connection with the worldwide drug problem, terrorism, transnational organized crime, mercenary activities and other criminal behavior;

That based on the Ministerial mandates, the Andean Community High-Level Group on Security and Confidence-Building, created by the above-cited Lima Commitment, agreed at its first meeting, held in Bogotá on February 28, 2003, to expedite the designing and implementation of an Andean Plan to Prevent, Combat and Eradicate Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in all its aspects, a decision that was subsequently endorsed by the Andean Council of Foreign Ministers on March 11, 2003;

That illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects constitutes a serious threat to the peace, security, governance, stability and democratic and institutional order of Andean Community Member Countries and conspires against the aspiration of our societies to attain higher levels of political, economic, social and cultural development that are sustainable in the long term;

That illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects is a global problem closely tied in with terrorism and other forms of political violence, the worldwide drug problem, transnational organized crime, mercenary activities and other criminal behavior, all of them scourges that the Andean Community Member Countries are determined to fight;

That the Member Countries are committed to observe international law and the principles enshrined in the Charter of the United Nations, particularly respect for national sovereignty, non-intervention in the internal affairs of the Member States, the legitimate right to individual and collective defense established in Article 51 of that Charter, the right of all nations to self-determination and the

right of Member States to develop their own defense systems to guarantee their national security;

That the Andean Community Member Countries agreed to implement the United Nations Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All its aspects, adopted in New York in July 2001;

That the Andean Community Member Countries have ratified the Inter-American Convention against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Ammunition, Explosives and Other Related Materials, signed in Washington, D.C. in November 1997;

That the Andean Community Member Countries backed the recommendations of the Regional Seminar for Latin America and the Caribbean to evaluate and follow-up on the United Nations Conference on the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects, held in Santiago in November 2001;

That the Andean Community Member Countries approved the Model Regulations of the Inter-American Drug Abuse Control Commission (CICAD), in order to establish a series of harmonized measures and procedures to supervise and control international trade in firearms, their parts and ammunition, with a view to avoiding illicit trade in those items and their diversion for illegal uses and purposes;

That the problem of proliferation of illicit arms may only be resolved extensively, broadly and in an integrated manner by reinforcing the capacity to regulate and comply with all aspects that govern the lawful manufacture, import, export, transfer, sale, brokerage, transport, possession, concealment, usurpation, carrying and use of arms of this kind, as well as establishing cooperative Community mechanisms for this purpose; and,

That the General Secretariat has put forward Proposal 102/Rev. 1 on the Andean Plan to Prevent, Combat and Eradicate Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in all its aspects;

DECIDES:

Sole Article.- To establish the Andean Plan to Prevent, Combat and Eradicate Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in all its aspects, set out in the document annexed to this Decision.

Signed in the Quirama Recinto, Department of Antioquia of the Republic of Colombia, on the twenty-fifth of June of two thousand three.

ANNEX I

THE ANDEAN PLAN TO PREVENT, COMBAT AND ERADICATE ILLICIT TRADE IN SMALL ARMS AND LIGHT WEAPONS IN ALL ITS ASPECTS

DEFINITIONS

For purposes of the implementation of this Plan, the following definitions shall apply:

- a) **Private actors:** private enterprises and/or institutions, as well as natural persons, that manufacture, import, export, transfer, sell, broker, transport, hold, conceal, usurp, carry or require the use of small arms and light weapons for their normal activities.*
- b) **Public actors:** public institutions involved in designing or implementing the policies, strategies or action connected with this Plan, including, inter alia, the armed forces, police, national security agencies, ministries of foreign affairs, defense, the interior or government, and justice, the judiciary, and customs and immigration officials.*
- c) **Small arms and light weapons:** small arms are those that are intended for personal use, while light weapons are used by several people organized as a crew. The small arms category includes: revolvers and automatic and semi-automatic pistols, shotguns, rifles and carbines, submachine guns, assault rifles, and light machine-guns, as well as informally manufactured arms of the same kind. The light weapons category includes: heavy machine-guns, hand-driven and mounted rifle-driven grenade launchers, hand-held antiaircraft guns, hand-held antitank guns, recoilless guns, hand-held antitank rocket and missile launcher systems, hand-held antiaircraft missile launcher systems and mortars with a caliber of less than 100 millimeters, as well as informally manufactured weapons of the same kind. Ammunition and explosives are part of the small arms and light weapons that are used in fighting and include: cartridges (bullets) for small arms, projectiles and missiles for light weapons, hand-driven antipersonnel and antitank grenades, land mines, explosives and movable containers holding antiaircraft and antitank missiles or projectiles for a single action.*
- d) **Institutions responsible for ensuring compliance with and full implementation of the laws:** national agencies competent in the control, surveillance and application of Andean Community and domestic legislation associated with this Plan, including, inter alia, the ministries of foreign affairs, defense, the interior or government and justice, the public ministry, the judiciary, and the armed forces and police, and customs and immigration officials, according to their spheres of competence.*
- e) **National Coordinating Committee - National Focal Point-:** the mechanism that is responsible for boosting the implementation of this Plan in each Member Country. It may have a Chair and a Technical Secretariat to facilitate the accomplishment of its aims and may be made up of representatives of the following bodies, inter alia: the ministries of foreign affairs, defense, the interior*

or government, and justice, the judiciary, the armed forces, the police, customs and immigration officials and civil society.

f) Security: from the Andean perspective, security is understood to be the situation in which the state and society are protected against threats or risks that are capable of affecting the overall development and well-being of their citizens, as well as the full exercise of their rights and freedoms within an unhampered democratic environment. In this sense, security is multidimensional and comprehensive in nature, encompassing across-the-board political, economic, social and cultural matters, and is reflected in the policies that are implemented in spheres as diverse as, inter alia, the bolstering of democratic institutions and the state of law, defense, health, the environment, the economy, economic development and the prevention of natural disasters.

g) Civil society: the collective social entity within which citizens interrelate among themselves and with the state. From this perspective, it comprises a large array of organizations, including, inter alia, social movements, professional or voluntary associations, grass-roots organizations, non-governmental organizations, trade unions, cooperatives, academic and philanthropic institutions, local communities, gender-based and youth organizations, as well as religious organizations. In some cases, independent communications media and the informal sector are also considered a part of civil society. Among the roles assigned to civil society are participating in the Andean Community decision-making process and expediting the rendering of accounts by state bodies, in an effort to achieve effective governance. For purposes of this instrument, civil society includes a broad range of organizations that have a mandate to contribute to training, theoretical and applied research, the facilitating of public policy, social and development assistance, and the monitoring and evaluation of security issues.

OBJETIVES:

1. To draw up, implement and support a comprehensive strategy to prevent, combat and eradicate illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects, which should take into account the links between the illicit trade in and proliferation of those arms and weapons and security, terrorism, corruption and the worldwide drug problem, as well as the long-term objective of achieving peace, development and stability in the Subregion;

2. To strengthen the capacity of Member Countries to implement measures against the illicit manufacture, import, export, transfer, sale, brokerage, transport, possession, concealment, usurpation, carrying and use of small arms and light weapons and to identify, confiscate and, when appropriate, destroy these types of weapons and arms;

3. To promote a culture of peace by carrying out education and public awareness programs on the problems of the proliferation and movement of and illicit trade in small arms and light weapons, involving all sectors of society;

4. To institutionalize national and subregional programs, as well as the corresponding mechanisms for action, in order to prevent, control and eradicate illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects; and,

5. To implement this Plan in a context of full respect for human rights and international humanitarian law.

PRINCIPLES:

In order to accomplish the objectives of this Plan, the following principles shall be borne in mind:

1. Comprehensiveness: The Plan is comprehensive because it encompasses all aspects relating to the problem of the proliferation of and illicit trade in small arms and light weapons.

2. Shared Responsibility: The Plan rests on the shared responsibility of all actors connected with this problem and the joint search for solutions in the subregional, regional, hemispheric and world spheres.

3. Respect for international law: The Plan fully respects the principles and rules of international law.

4. Respect for the domestic jurisdiction of the States: The Plan fully respects territorial sovereignty and integrity, as well as the principle of non-intervention in domestic affairs.

5. Solidarity: The Plan is implemented through the cooperation and solidarity of the nations.

6. Complementariness: The Plan contributes to the execution of domestic policies on the subject and the Common Foreign Policy, in order to deepen the process of Andean integration.

MECHANISMS:

1. The Andean Council of Foreign Ministers is responsible for defining, coordinating and following up on the Andean Community Security Policy and, within this context, the Andean Plan to Prevent, Combat and Eradicate Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in all its Aspects. The Andean Council of Foreign Ministers shall, accordingly, meet for this purpose with its counterparts from the ministries of defense, whenever it considers this advisable.

2. As established in the "Lima Commitment," the High-Level Group on Security and Confidence-Building shall be the executor of Andean Community Security Policy and, in that context, of this Plan.

3. An Operating Committee shall be created to coordinate, harmonize and carry out efforts to prevent, combat and eradicate illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects. Member Countries shall appoint three representatives to that Committee.

The Committee shall set up the specialized working groups it considers advisable. These working groups shall be comprised of competent authorities on the subject from two or more Member Countries. Countries that are not participants may request their incorporation at any time.

4. The General Secretariat of the Andean Community, particularly the responsible unit, shall act as the Technical Secretariat for this Plan.

MODES OF ACTION:

1. To address comprehensively the problem of the illicit proliferation of small arms and light weapons in all its aspects.

2. To exchange information and cooperate on all matters relating to illicit small arms and light weapons in all their aspects.

3. To promote the investigation, preparation and collection of information and statistics in the subregion, as well as dialogue and cooperation between the governments and civil society.

4. To expedite the development of a concrete and integrated Coordinated Agenda of Action on security in the Andean subregion.

5. To exchange experiences and organize courses to enhance the capabilities of officials in the Andean Community Member Countries.

6. To advance public awareness campaigns on the dangers and negative effects of the indiscriminate use of and illicit trade in small arms and light weapons.

GUIDELINES FOR ACTION:

A. In the domestic sphere:

Pursuant to the Coordinated Agenda of Action and its Operational Plan, attached, at the domestic level, the Member Countries shall, based on their national legislation and on administrative and operational provisions, regulations and procedures, control the illegal manufacture, import, export, transfer, sale, brokering, transport, possession, concealment, usurpation, carrying and use of small arms and light weapons and shall take the following measures, inter alia, that are within their possibilities:

1. Strengthen or establish mechanisms for national coordination with the corresponding institutional infrastructure that will be responsible for guiding

policy, research and monitoring all aspects of the proliferation, control of and illicit trade in small arms and light weapons.

2. Enhance the capacity of the institutions and officials who are responsible for preventing, combating and eradicating the illicit proliferation of small arms and light weapons and improve their equipment and resources in order to obtain concrete results in the medium and long terms.

3. Recommend the adoption, as promptly as possible and whenever appropriate, of the legislative and other measures that are needed to classify as a criminal offense under national law the illicit manufacture, import, export, transfer, sale, brokerage, transport, possession, concealment, usurpation, carrying and use of small arms and light weapons.

4. Prepare and implement, as appropriate, domestic programs for:

- a) The responsible handling of legal small arms and light weapons;*
- b) The voluntary surrender of illicit small arms and light weapons;*
- c) The identification and destruction by competent national officials of illicit small arms and light weapons and of the surplus inventory of arms and weapons that are obsolete or have been confiscated and are being held by the State, unless they have another officially authorized use, provided that these arms and/or weapons have been duly marked and registered;*
- d) The creation of citizen consciousness of the proliferation of and illicit trade in small arms and light weapons;*
- e) The adoption of appropriate national rules or regulations for improving and reinforcing laws that regulate the legal possession by civilians of firearms, ammunition, explosives and other related materials;*
- f) The transparent control of transfers of small arms and light weapons by producers, sellers, brokers and other agents, together with their embarkation and transit;*
- g) The active involvement of civil society in formulating and implementing a national program of action to address the problem in a comprehensive and sustainable way; and*
- h) The consciousness-raising, education and training of public and private actors connected with the implementation of the necessary measures to prevent, combat and eradicate illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects.*

5. Promote the signing and entry into effect of binding bilateral or multilateral agreements with neighboring or third countries or accession to such agreements, in order to establish a common system of effective control, including the

registration and confiscation of illicit small arms and light weapons in border regions.

6. Design and implement proactive policies and measures to create the necessary political, economic, social and cultural conditions for reducing the demand for and illicit use of small arms and light weapons by individuals, groups of individuals or communities.

B. In the subregional Andean sphere:

1. Create an Operating Committee that will be responsible for coordinating and harmonizing efforts to prevent, combat and eradicate illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects.

2. Set up an information exchange mechanism to harmonize the current training standards and domestic legislation on the subject of competent authorities in the Member Countries. International organizations specialized in the subject could provide technical assistance for that mechanism.

3. Promote the coding and harmonizing of legislations that regulate illicit manufacture, import, export, transfer, sale, brokerage, transport, possession, carrying and use of small arms and light weapons, in keeping with each Member Country's national Constitution. The common minimum standards defined by the Member Countries should include, but not be limited to, the application of markings on arms and weapons manufactured in the subregion, their registration and the control of imports, exports and legal trade of those items.

4. Enhance subregional and hemispheric cooperation among competent national authorities who are responsible for ensuring compliance with and the full implementation of all laws connected with small arms and light weapons in all their aspects. Those efforts should include, but not be limited to, training and the exchange of information to support common and coordinated efforts to control and reduce illicit cross-border trade in small arms and light weapons, and the signing of agreements for those purposes.

5. Make certain that illegal manufacturers, sellers, brokers of and traffickers in small arms and light weapons, as well as those who transfer these types of armaments to individuals or groups operating outside the law in violation of domestic, subregional or hemispheric regulations on the matter, are duly sanctioned.

6. Commit themselves to an ongoing dialogue with civil society in the Andean Community Member Countries encompassing the most diverse actors and agents, both public and private, that would result in cooperative efforts to help prevent, combat and eradicate illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects.

7. Seek to ensure that all programs to prevent, combat and eradicate illicit trade in small arms and light weapons be complemented by wide-ranging development programs so as to reduce local demand for these arms and weapons.

C. In the international sphere:

1. To coordinate, within the context of Andean Common Foreign Policy, joint positions for the various international forums concerned with the subject and boost strategies to universalize cooperation mechanisms on the matter; and,

2. Present and disseminate this Andean Plan, together with its accomplishments and advances, at the Biennial Meetings of States on the Implementation of the United Nations Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All its aspects.

IMPLEMENTATION:

For purposes of the execution of this Plan, the Member Countries agree also to implement the Coordinated Agenda of Action and the Operational Plan that are attached hereto.

ANNEX II

COORDINATED AGENDA OF ACTION

In order to promote the comprehensive treatment of the problem created by illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects and to define and implement a Coordinated Agenda of Action for the subregion that will contribute to the security of the Andean Community and its citizens and ensure that all Member Countries have in place the administrative provisions, regulations and procedures needed to exercise effective control over illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects;

We agree:

1. Institutional context

1.1. To promote the joint search for sustainable solutions to the problem created by illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects, through the sustained implementation of concerted and coordinated action in the medium and long terms.

1.2. To set up and put into operation in each Member Country a National Coordinating Committee -National Focal Point- that will be responsible for designing and taking the necessary measures to confront that problem and ensure the full implementation of this Coordinated Agenda of Action at the national level.

1.3. To instruct the responsible unit of the General Secretariat of the Andean Community, in accordance with the mandates established in the Lima Commitment, to coordinate the Coordinated Agenda of Action at the subregional level.

2. Subregional Cooperation and Coordination

2.1. To ensure the sustainability, in the medium and long terms, of their commitment to attain the objectives set out in the Andean Plan to Prevent, Combat and Eradicate Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in all its aspects, through the responsible unit of the General Secretariat.

2.2. To prepare, implement and support a comprehensive strategy to combat the illicit proliferation of and trafficking in small arms and light weapons, which should take into account the links between the illicit trade in and proliferation of those arms and weapons and security, terrorism, corruption and the worldwide drug problem, as well as the medium and long-term objective of attaining peace, stability and development in the subregion.

2.3. To promote cooperation and the exchange of information among the National Coordinating Committees -National Focal Points-, the institutions responsible for ensuring compliance with and the full implementation of the law and of this Plan, and pertinent international organizations concerned with the issue, in order to coordinately address the problem of the illicit proliferation of small arms and light weapons in all its aspects.

2.4. To cooperate with interested experts and representatives of civil society in preventing, combating and eradicating the problem of the illicit proliferation of and trafficking in small arms and light weapons in all its aspects.

2.5. To promote the joint search for international support to implement the Coordinated Agenda of Action.

3. Legislative Measures

3.1. To recommend the incorporation into domestic legislation, when necessary and as a priority, of regulatory provisions on the following matters:

3.1.1. Possession, concealment, usurpation, carrying and use of small arms and light weapons.

3.1.2. Manufacture, import, export, transfer, sale, brokerage, transport, marking, registration and control of small arms and light weapons.

3.1.3. Effective control of manufacturers, sellers, brokers, financiers and transporters of small arms and light weapons.

3.1.4. Seizure and confiscation by the State of all small arms and light weapons that are manufactured, transported or in transit without or in violation of the corresponding licenses, permits or written authorizations, as well as the application of the sanctions provided for in domestic law.

3.1.5. Asset laundering connected with illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects.

3.2. To establish as criminal offenses under their domestic law, the illicit manufacture, import, export, transfer, sale, brokerage, transport, possession, concealment, usurpation, carrying and use of small arms and light weapons, including ones that are homemade.

3.3. To promote the harmonizing of legislation and establishment of minimum standards to regulate the illicit manufacture, import, export, transfer, sale, brokerage, transport, possession, concealment, usurpation, carrying and use of small arms and light weapons.

3.4. To expedite the adoption of legislative or other measures needed to combat crimes relating to terrorism, the worldwide drug problem and corruption that are linked to illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects.

4. Operational and Institutional Strengthening Measures

4.1. To recommend the design and implementation of a National Plan on the subject by each National Coordinating Committee -National Focal Point-.

4.2. To set up or develop national databases and communications systems, including specialized equipment, to monitor and control the illicit manufacture, import, export, transfer, sale, brokerage, transport, possession, concealment, usurpation, carrying and use of small arms and light weapons in the national territory and across borders, in keeping with the Operational Plan for Implementing this Agenda.

4.3. To carry out or improve national training programs to build up the institutions that are responsible for ensuring compliance with and the full implementation of this Coordinated Agenda for Action.

4.4. If deemed necessary, to form specialized working groups made up of national authorities responsible for ensuring compliance with and the full implementation of this Coordinated Agenda of Action.

4.5. To reinforce the capacity of the General Secretariat of the Andean Community to coordinate the implementation of the Coordinated Agenda of Action, through its responsible unit.

4.6. To support and promote training and exchange programs between the General Secretariat, the National Coordinating Committees -National Focal

Points- and community leaders or representatives of civil society to enhance their capacity and ensure the existence of a constructive dialogue that will lead to concrete action.

4.7. To contribute to the effective utilization of the accumulated knowledge and experience, including those of civil society, to tackle the problem of illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects.

4.8. To encourage subregional cooperation among national institutions responsible for compliance with and the full implementation of this Coordinated Agenda of Action, as well as with other pertinent international agencies and institutions, in order to combat transnational crime, increase security and promote mutual understanding among communities living in national border regions. Such cooperation could include, among others, reinforcing confidence-building measures in the Andean subregion.

4.9. To foster the development of a subregional research capacity to back up the National Coordinating Committees -National Focal Points- by launching medium and long-term research programs on the subject.

5. Control, Confiscation, Sanctioning, Distribution, Collection and Destruction

5.1. To strengthen the capacity of competent national institutions to control and report the quantity of arms and weapons in the hands of the State, by, among other things, verifying and updating their registries and/or inventories of small arms and light weapons.

5.2. To ensure the strict rendering of accounts by the competent national agency and the effective follow-up of all distributed arms and weapons that belong to the State.

5.3. To guarantee the safe storage of arms in the possession of the State.

5.4. To establish an effective mechanism for stockpiling illicit small arms and light weapons that have been confiscated or recovered by the State, while awaiting the result of investigations that will release them to be destroyed or, if deemed pertinent, to be transferred to the State.

5.5. To identify and destroy surplus or obsolete inventories of small arms and light weapons in the possession of the State.

5.6. To guarantee and keep up to date the registry of importers, sellers, brokers and manufacturers of small arms and light weapons that will make it possible to oversee those agents and their commercial operations in the Subregion, as well as private security, mining and other companies that need small arms and light weapons for their normal operations, and private individuals.

5.7. To guarantee the strict rendering of accounts to the competent national agency and the effective control of all arms and weapons owned, carried and held by manufacturers, importers, sellers, brokers, and users, including private security, mining and other companies that need small arms and light weapons for their normal operations, and private individuals.

5.8. To encourage a joint effort between institutions that are responsible for ensuring compliance with and the full implementation of this Coordinated Agenda of Action and local communities to identify and eradicate illegal stockpiles of arms and weapons.

5.9. To promote programs for the voluntary surrender and collection of arms and weapons.

5.10. To ensure the destruction of illicit arms and weapons that have been collected or seized or, if deemed pertinent, their transfer to the State.

5.11. To promote programs to legalize small arms and light weapons, with a view to increasing and updating domestic databases.

6. Exchange, Filing and Updating of Information

6.1. To disseminate the policies, regulations and legislation dealing with small arms and light weapons in all their aspects.

6.2. To promote the exchange of information between the National Coordinating Committees -National Focal Points- and the responsible unit in the General Secretariat as well as the uniformity of national databases.

6.3. If deemed necessary, to foster the exchange of information between the National Coordinating Committees -National Focal Points- and national institutions responsible for ensuring compliance with and the full implementation of the laws on, inter alia, individuals, criminal organizations and their members, types of small arms and light weapons, sources, distribution routes, destinations, means of transport, and the financial support of those organizations or individuals. The exchange of information could also focus on criminal activities like terrorism and drug trafficking related with the cited arms and weapons.

7. Public Awareness

7.1. To encourage the development of a culture of peace.

7.2. To design and implement citizen education and public awareness programs encompassing all sectors of society that deal with the problem of illicit small arms and light weapons in all its aspects.

7.3. To design and implement citizen education and public awareness programs about the responsible handling, storage and use of firearms.

7.4. *To foster the inclusion of, as well as cooperation with, all sectors of society, including the business sector, to prevent and eradicate the problem of illicit small arms and light weapons in all its aspects.*

ANNEX III

OPERATIONAL PLAN TO IMPLEMENT THE ANDEAN COMMUNITY'S COORDINATED AGENDA OF ACTION

Introduction

This Operational Plan, in keeping with the objectives set out in the Andean Plan to Prevent, Combat and Eradicate Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in all its aspects and its Coordinated Agenda of Action adopted in June 2003, establishes the action to be taken by the Community to develop the technical and institutional capacity of our societies to cope comprehensively with the problem of small arms and light weapons in all its aspects, as well as to promote and facilitate cooperation and the exchange of information and experience within the subregion, in order to guarantee the growing and sustained commitment of the Andean Community Member Countries to the attainment of those objectives.

OPERATIONAL PLAN

1. Institutional Framework

The Member Countries agreed:

1.1 "To promote the joint search for sustainable solutions to the problem created by illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects, through the sustained implementation of concerted and coordinated action in the medium and long terms."

1.2 "To set up and put into operation in each Member Country a National Coordinating Committee -National Focal Point- that will be responsible for designing and taking the necessary measures to confront that problem and ensure the full implementation of this Coordinated Agenda of Action at the national level."

Execution:

The Member Countries commit themselves to each establish a National Coordinating Committee -National Focal Point- within a period of four months after the signing of the Coordinated Agenda of Action.

Each Member Country shall, accordingly and within a period of no more than three months after the signing of the Coordinated Agenda of Action, hold a

seminar/workshop or inter-institutional meetings to set up and strengthen the National Coordinating Committee -National Focal Point- on small arms and light weapons in all their aspects. That Committee shall have the following functions:

- a) To coordinate with the General Secretariat the implementation of the Coordinated Agenda of Action;*
- b) To coordinate and work together with the other National Coordinating Committees -National Focal Points-;*
- c) To coordinate and work jointly with civil society;*
- d) To facilitate the exchange and dissemination of information;*
- e) To conduct and facilitate the investigation of matters previously decided by the Committee;*
- f) To identify and take advantage of the experience acquired;*
- g) To enhance the capacity to address the problem of small arms and light weapons in a sustained way; and,*
- h) All other functions deemed to be relevant.*

1.3 "To instruct the responsible unit of the General Secretariat of the Andean Community, in accordance with the mandates established in the Lima Commitment, to coordinate the Coordinated Agenda of Action at the subregional level."

Execution:

The General Secretariat of the Andean Community, particularly its responsible unit, shall act as the Technical Secretariat and have the following functions:

- a) To promote, in coordination with the Operating Committee, the implementation of the Coordinated Agenda of Action, including the annual programming of meetings and of joint endeavors;*
- b) To coordinate and work jointly with the National Coordinating Committees - National Focal Points-;*
- c) To work with the pertinent regional and international organizations;*
- d) To prepare an inventory of the existing lines of cooperation on the subject and to channel that information to the Member Countries through the Operating Committee and the National Coordinating Committees -National Focal Points-;*
- e) To support the coordination and joint efforts with civil society;*

- f) To support the exchange and dissemination of information;*
- g) To promote and facilitate research in keeping with the requirements of the Operating Committee;*
- h) To identify and take advantage of the experience acquired; and*
- i) To reinforce the capacity to comprehensively tackle the problem of small arms and light weapons in all its aspects.*

2. Subregional Cooperation and Coordination

The Member Countries agreed:

2.1 "To ensure the sustainability, in the medium and long terms, of their commitment to attain the objectives set out in the Andean Plan to Prevent, Combat and Eradicate Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in all its Aspects, through the responsible unit of the General Secretariat."

Execution:

The Member Countries, with the assistance of the General Secretariat, shall hold an annual Ministerial Conference, preferably in the country exercising the chairmanship of the Andean Community, to evaluate the progress made in implementing the Andean Plan to Prevent, Combat and Eradicate Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in all its Aspects and to draw up the guidelines for advancing its execution.

2.2 "To prepare, implement and support a comprehensive strategy to combat the illicit proliferation of and trafficking in small arms and light weapons, which should take into account the links between the illicit trade in and proliferation of those arms and weapons and security, terrorism, corruption and the worldwide drug problem, as well as the medium and long-term objective of attaining peace, stability and development in the subregion."

Execution:

The following activities, inter alia, will be carried out:

a) The General Secretariat, with the assistance of the National Coordinating Committees -National Focal Points- will draw up annual plans to implement the Coordinated Agenda of Action.

b) An annual forum for reflection on and discussion of weaknesses and strengths will be held with a view to implementing the Coordinated Agenda of Action. That forum will be held in each of the Member Countries in succession and will gather participants from the National Coordinating Committees -National Focal Points-,

the General Secretariat and other pertinent international organizations, together with experts and representatives of civil society.

c) The Ministerial Conference cited under the implementation of number 2.1, will also evaluate the results of the Community strategy and prepare guidelines to continue furthering that strategy.

d) Support will be given to public awareness research and education programs so that society as a whole can understand the links between the proliferation of small arms and light weapons and conflicts, as well as between the control of those arms and weapons and subregional peace, stability and well-being.

e) Support will be given to development projects at all levels that are capable of reducing the local demand for small arms and light weapons and providing the inhabitants of border regions with viable alternatives for progress.

2.3 "To promote cooperation and the exchange of information among the National Coordinating Committees -National Focal Points-, the institutions responsible for ensuring compliance with and the full implementation of the law and of this Plan, and pertinent international organizations concerned with the issue, in order to coordinately address the problem of the illicit proliferation of small arms and light weapons in all its aspects."

Execution:

To promote cooperation and the exchange of information by, among other things:

a) Holding an annual seminar/workshop for persons serving on the National Coordinating Committees -National Focal Points- and the General Secretariat of the Andean Community, to promote joint endeavors and evaluate the common strategy prescribed in this Plan.

b) Having the General Secretariat publish a Bi-annual Bulletin -which could even be a virtual bulletin- to serve as a vehicle for the exchange of information and ideas between the National Coordinating Committees -National Focal Points-, the national authorities responsible for ensuring compliance with and the full implementation of this Andean Plan in the subregion, pertinent international organizations and civil society.

c) Promoting personnel exchange programs between the National Coordinating Committees -National Focal Points- and other agencies and organizations, including those of civil society, with a view to exchanging information and experience.

d) Actively expediting joint studies and the exchange of information between National Coordinating Committees -National Focal Points- and academic centers, specialized institutes, research centers, the business sector, leaders and

experts from local communities, and other sources of knowledge about the subject.

e) Creating a mechanism for dialogue on the part of National Coordinating Committees -National Focal Points- with civil society, through which interested institutions, organizations and representatives of civil society may interact in order to enhance cooperation and the exchange of information.

2.4 "To cooperate with interested experts and representatives of civil society in preventing, combating and eradicating the problem of illicit proliferation of and trafficking in small arms and light weapons in all its aspects."

Execution:

To foster cooperation by, among other things:

a) Recommending to civil society the incorporation into the agendas of pertinent subregional meetings of issues relating to small arms and light weapons that would address the following aspects of security, inter alia: socioeconomic development, governance and corruption, political instability and terrorism, conflict resolution, the struggle against organized crime, the war on the world drug problem; and refugees and migrations, etc.

b) Fostering the exchange of acquired information and experience between experts, representatives of civil society and other subregional institutions concerned with the subject.

c) Supporting initiatives of the business sector, local communities and other actors involved that are aimed at slowing the proliferation of small arms and light weapons and minimizing their effects on society.

d) Holding an annual consultative meeting of the General Secretariat with experts, representatives of civil society, the business sector and local communities to exchange experience with issues and activities related to the problem of small arms and light weapons in all its aspects, in order to prepare for the Ministerial Conference that will evaluate the subject.

2.5 "To promote the joint search for international support to implement the Coordinated Agenda of Action."

Execution:

The General Secretariat of the Andean Community will take the necessary steps with friendly countries and cooperating international organizations to secure the required technical and financial resources for developing the institutional framework and implementing the Coordinated Agenda of Action, in keeping with the guidelines established in Annex IV to this Operational Plan.

Member Countries will, as their means permit, contribute to the funding of the activities of their National Coordinating Committees -National Focal Points- and build up the institutional budget of the General Secretariat of the Andean Community as pertinent.

3. Legislative Measures

The Member Countries agreed:

3.1. "To recommend the incorporation into domestic legislation, when necessary and as a priority, of regulatory provisions on the following matters:

3.1.1. Possession, concealment, usurpation, carrying and use of small arms and light weapons.

3.1.2. Manufacture, import, export, transfer, sale, brokerage, transport, marking, registration and control of small arms and light weapons.

3.1.3. Effective control of manufacturers, sellers, brokers, financiers and transporters of small arms and light weapons.

3.1.4. Seizure and confiscation by the State of all small arms and light weapons that are manufactured, transported or in transit without or in violation of the corresponding licenses, permits or written authorizations, as well as the application of the sanctions provided for in domestic law.

3.1.5. Asset laundering connected with illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects."

3.2. "To establish as criminal offenses under their domestic law, the illicit manufacture, import, export, transfer, sale, brokerage, transport, possession, concealment, usurpation, carrying and use of small arms and light weapons, including ones that are homemade."

3.3. "To promote the harmonizing of legislation and the establishment of minimum standards to regulate the illicit manufacture, import, export, transfer, sale, brokerage, transport, possession, concealment, usurpation, carrying and use of small arms and light weapons."

3.4. "To expedite the adoption of legislative or other measures needed to combat crimes relating to terrorism, the worldwide drug problem and corruption that are linked to illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects."

Execution:

a) The Member Countries commit themselves to send the General Secretariat, within a maximum period of one month after the signing of the Coordinated Agenda of Action, copies of national legislation that is in force with regard to the

illicit manufacture, import, export, transfer, sale, brokerage, transport, possession, concealment, usurpation, carrying and use of small arms and light weapons in all their aspects.

b) The General Secretariat will, within a maximum period of three months after the signing of the Coordinated Agenda of Action, conduct a comparative study of the cited national legislation and draw up a proposal to establish minimum subregional standards.

c) The General Secretariat, in collaboration with the National Coordinating Committees -National Focal Points- and within a maximum of six months after the signing of the Coordinated Agenda of Action, will hold a subregional seminar/workshop to establish the minimum standards required by national legislation and design a program to review the legislation and monitor advances and deadlines for taking the steps provided for in numbers 3.2, 3.3 and 3.4 of the Coordinated Agenda of Action. This seminar/workshop is also intended to evaluate the establishment of a subregional mechanism to control the problem of small arms and light weapons as well as a program to combat corruption, within a maximum period of nine months after the signing of the Coordinated Agenda of Action. The conclusions and recommendations of the seminar/workshop should be submitted for the consideration of the Ministerial Conference.

d) The Member Countries also commit themselves, within a maximum period of sixteen months after the signing of the Coordinated Agenda of Action, to review their pertinent national legislation in order to verify the incorporation into those laws of all of the provisions recommended in numbers 3.2, 3.3 and 3.4 of the cited Agenda, bearing in mind the minimum standards established pursuant to number 3.1, in accordance with the legal and constitutional mechanisms in force in each country.

4. Operational and Institutional Strengthening Measures

The Member Countries agreed:

4.1 "To recommend the design and implementation of a National Plan on the subject by each National Coordinating Committee -National Focal Point-."

Execution:

If they deem it necessary, Member Countries will design and implement a national plan on the subject through their National Coordinating Committees -National Focal Points- and will request technical and financial assistance from the international community for that purpose.

4.2 "To set up or develop national databases and communications systems, including specialized equipment, to monitor and control the illicit manufacture, import, export, transfer, sale, brokerage, transport, possession, concealment, usurpation, carrying and use of small arms and light weapons in the national

territory and across borders, in keeping with the Operational Plan for Implementing this Agenda."

4.3. "To carry out or improve national training programs to build up the institutions that are responsible for ensuring compliance with and the full implementation of this Coordinated Agenda for Action."

4.4. "If deemed necessary, to form specialized working groups made up of national authorities responsible for ensuring compliance with and the full application of this Coordinated Agenda of Action."

Execution:

Within a maximum period of four months after its establishment, each National Coordinating Committee -National Focal Point- will hold three inter-institutional meetings to identify training requirements and possible programs on the subject; set up the national database; and reinforce or develop the communications systems.

Each National Coordinating Committee -National Focal Point- will have a database that will contain, but not be limited to, information about: the illicit manufacture, import, export, transfer, sale, brokerage, transport, possession, concealment, usurpation, carrying and use of in all their aspects; also about the small arms and light weapons that have been stolen, lost, seized and recovered, as well as those destroyed and planned for destruction. Each National Coordinating Committee -National Focal Point- will inform the General Secretariat about the actions it plans to undertake in order to start up its training programs and put its national database into place.

4.5 "To reinforce the capacity of the General Secretariat of the Andean Community to coordinate the implementation of the Coordinated Agenda of Action through its responsible unit."

4.6. "To support and promote exchange and training programs between the General Secretariat, the National Coordinating Committees -National Focal Points- and community leaders or representatives of civil society to enhance their capacity and ensure the existence of a constructive dialogue that will lead to concrete action."

4.7. "To contribute to the effective utilization of the accumulated knowledge and experience, including those of civil society, to tackle the problem of illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects."

Execution:

For these purposes, the Member Countries commit themselves to:

a) Hold an annual subregional seminar/workshop to reinforce the capacity of all actors involved in implementing the Coordinated Agenda of Action, in order to exchange ideas and review the chosen methodologies. These seminars/workshops will be held in each Member Country in succession and will bring together participants from the National Focal Points -National Coordinating Committees- and the General Secretariat.

b) Effectively put to use the knowledge and experience acquired in building up the capacity of the National Focal Points -National Coordinating Committee- and of the General Secretariat.

4.8 "To encourage subregional cooperation among national institutions responsible for compliance with and the full implementation of this Coordinated Agenda of Action, as well as with other pertinent international agencies and institutions, in order to combat transnational crime, increase security and promote mutual understanding among communities living in national border regions. Such cooperation could include, among others, reinforcing confidence-building measures in the Andean subregion."

Execution:

The General Secretariat, in coordination with the National Coordinating Committees -National Focal Points- and within a maximum period of six months after the signing of the Coordinated Agenda of Action, will hold a subregional seminar/workshop to identify:

a) Training requirements in the subregion, which could lead to offering training courses in the priority spheres of action for national officials responsible of ensuring compliance with and the full implementation of this Andean Plan and other pertinent international organizations.

b) Border regions where national and international institutions operate, in order to promote cooperation and the coordination of efforts to improve security.

National Coordinating Committees -National Focal Points- will implement the agreements reached at the seminar/workshop, with the support of the General Secretariat.

4.9 "To foster the development of a subregional research capacity to back up the National Coordinating Committees -National Focal Points- by launching medium and long-term research programs on the subject."

Execution:

In this context, the Member Countries commit themselves to:

a) Promote and further long-term research programs on the dynamics of the proliferation of small arms and light weapons and its effect on security.

b) Foster cooperation in the area of research among the National Coordinating Committees -National Focal Points-, experts, the academic sector, specialized institutes, research centers as well as other specialists in the subregion, including the business sector and the community in general.

5. Control, Confiscation, Sanctioning, Distribution, Collection and Destruction

The Member Countries agreed:

5.1 "To strengthen the capacity of competent national institutions to control and report the quantity of arms and weapons in the hands of the State, by, among other things, verifying and updating their registries and/or inventories of small arms and light weapons."

5.2. "To ensure the strict rendering of accounts by the competent national agency and the effective follow-up of all distributed arms and weapons that belong to the State."

5.3. "To guarantee the safe storage of arms in the possession of the State."

5.4. "To establish an effective mechanism for stockpiling illicit small arms and light weapons that have been confiscated or recovered by the State, while awaiting the result of investigations that will release them to be destroyed or, if deemed pertinent, to be transferred to the State."

5.5. "To identify and destroy surplus or obsolete inventories of small arms and light weapons in the possession of the State."

Execution:

The General Secretariat, in coordination with the National Coordinating Committees -National Focal Points-, will organize, within a maximum period of nine months after the signing of the Coordinated Agenda of Action, a meeting of public and private experts to define the policy guidelines for guaranteeing effective control, oversight, safe stockpiling and responsible destruction or elimination of small arms or light weapons belonging to or in the possession of the State. Guidelines and procedures should also be established to ensure that surplus inventories of those arms and weapons are safely stored, destroyed or eliminated in a responsible way.

Member Countries will, in keeping with the agreements reached at the cited meeting, set up a verification mechanism to ensure full compliance with those guidelines.

The National Coordinating Committees -National Focal Points- and the General Secretariat should coordinate with the competent national officials, the implementation of capacity-building programs, the hiring of experts and the joint

search for international cooperation with which to accomplish the above cited objectives.

5.6 "To guarantee and keep up to date the registry of importers, sellers, brokers and manufacturers of small arms and light weapons that will make it possible to oversee those agents and their commercial operations in the subregion, as well as the private security, mining and other companies that need small arms and light weapons for their normal operations, and private individuals."

5.7. "To guarantee the strict rendering of accounts to the competent national agency and the effective control of all arms and weapons owned, carried and held by manufacturers, importers, sellers, brokers, and users, including private security, mining and other companies that need small arms and light weapons for their normal operations, and private individuals."

5.8. "To encourage a joint effort between the institutions that are responsible for ensuring compliance with and the full implementation of this Coordinated Agenda of Action and local communities to identify and eradicate illegal stockpiles of arms and weapons."

5.9. "To promote programs for the voluntary surrender and collection of arms and weapons."

5.10. "To ensure the destruction of illicit arms and weapons that have been collected or seized or, if deemed pertinent, their transfer to the State."

5.11. "To promote programs to legalize small arms and light weapons, with a view to increasing and updating national databases."

Execution:

The General Secretariat, in coordination with the National Coordinating Committees -National Focal Points-, will convene, within a maximum period of nine months after the signing of the Coordinated Agenda of Action, a meeting of officials who are competent on the subject to identify and implement viable alternatives for ensuring the strict rendering of accounts to the competent national agency and effective control over all arms and weapons belonging to, carried by and in the possession of manufacturers, importers, sellers, brokers, and users, individuals and legal entities through, inter alia, the registration and/or inventorying, collection, safe storage, destruction or responsible elimination of small arms and light weapons.

In keeping with the agreement reached at the cited meeting, the Member Countries will establish a verification mechanism to ensure full compliance with those guidelines.

The Member Countries should guarantee the destruction or transfer to the State of small arms and light weapons that have been seized or confiscated. They should

also make certain that national authorities responsible for ensuring compliance with and the full implementation of this Andean Plan work with local communities to facilitate the removal and destruction of small arms and light weapons that have been voluntarily surrendered and the detection of illegal stockpiles of such arms and weapons.

The National Coordinating Committees -National Focal Points- and the General Secretariat should coordinate with the competent national officials in carrying out capacity-building programs, hiring experts and jointly searching out international cooperation in order to contribute to the collection, confiscation, seizure and destruction or transfer to the State of illicit small arms and light weapons.

6. Exchange, Filing and Updating of Information

The Member Countries agreed:

6.1. "To disseminate the policies, regulations and legislation dealing with small arms and light weapons in all their aspects."

6.2. "To promote the exchange of information between the National Coordinating Committees -National Focal Points- and the responsible unit in the General Secretariat as well as the uniformity of national databases."

Execution:

The National Coordinating Committees -National Focal Points- should ensure that the pertinent policies, legislation and regulations are made known and accessible to the public; to this end, they will, in turn, send a copy of them to the General Secretariat. The latter, for its part, will publish and disseminate a subregional compendium of those policies, legislation and regulations.

The National Coordinating Committees -National Focal Points- will be responsible for controlling access to the information in the national databases. They will, accordingly, establish a subregional mechanism to guarantee the exchange, updating and transmission of information between the National Coordinating Committees -National Focal Points-, the General Secretariat and the representative of civil society, as applicable.

6.3. "If deemed necessary, to foster the exchange of information between the National Coordinating Committees -National Focal Points- and the national institutions responsible for ensuring compliance with and the full enforcement of laws on, inter alia, individuals, criminal organizations and their members, types of small arms and light weapons, sources, distribution routes, destinations, means of transport, and the financial support of those organizations or individuals. The exchange of information could also focus on criminal activities like terrorism and drug trafficking related with the cited arms and weapons."

Execution:

The General Secretariat, in coordination with the National Coordinating Committees -National Focal Points- that deem it necessary, will hold a subregional seminar/workshop to decide upon mechanisms for exchanging confidential information about, inter alia, individuals, criminal organizations and their members, types of small arms and light weapons, sources, distribution routes, destinations, means of transport, and the financial assistance of those organizations or individuals and the dissemination of that information. The seminar/workshop may also be aimed at designing and proposing a system to report information about criminal activities, particularly those relating to terrorism and drug trafficking related with the small arms and light weapons in question.

7. Public Awareness

The Member Countries agreed:

7.1. "To encourage the development of a culture of peace."

7.2. "To design and implement citizen education and public awareness programs encompassing all sectors of society that deal with the problem of illicit small arms and light weapons in all its aspects."

7.3. "To design and implement citizen education and public awareness programs about the responsible handling, storage and use of firearms."

7.4. "To foster the inclusion of, as well as cooperation with, all sectors of society, including the business sector, to prevent and eradicate the problem of illicit small arms and light weapons in all its aspects."

Execution:

The Member Countries commit themselves to promote national education programs to reduce the demand of society for arms and weapons, contribute to their responsible handling and condemn violence. Those programs should include, but not be limited to, the launching of public awareness campaigns through the audiovisual and written communications media.

Member Countries should accord priority to supporting local government and non-government public awareness programs that share the same purposes and involve the private sector in national and subregional education activities and programs to prevent and reject the crime and corruption associated with this problem.

The National Coordinating Committees -National Focal Points- will hold an annual national consultative forum involving all sectors of society through a free and open debate about the proliferation of small arms and light weapons and its effects on society, as well as the need to combat terrorism, corruption and the worldwide drug problem and the offenses connected with this problem.

ANNEX IV

INTERNATIONAL COOPERATION AND THE IMPLEMENTATION OF THE ANDEAN PLAN TO PREVENT, COMBAT AND ERADICATE ILLICIT TRADE IN SMALL ARMS AND LIGHT WEAPONS IN ALL ITS ASPECTS

General Assistance

The Andean Community Member Countries, after approving their Coordinated Agenda of Action and their Operational Plan to prevent, combat and eradicate illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects, call upon the international community to:

- 1. Accord due respect to the subregional and regional agendas, their priorities, processes and initiatives.*
- 2. Actively support the subregional initiatives and processes.*
- 3. Ensure the existence of transparent policies and strict controls over the illicit manufacture, import, transfer, sale, brokerage, transport, possession, carrying and use of small arms and light weapons in all its aspects.*
- 4. Help to maintain over the long term the commitment to control and reduce the worldwide proliferation of small arms and light weapons and combat terrorism, corruption and the worldwide drug program and related offenses.*
- 5. Support the execution of programs led by the business sector and civil society in general to reduce the social impact of small arms and light weapons.*
- 6. Contribute to and foster peace initiatives and encourage conflict prevention, management and resolution efforts, as well as promote economic and social development with the long-term objective of achieving peace, stability and sustainable development.*
- 7. Encourage the effective implementation of socioeconomic programs to combat poverty and to bring about persistent improvement in the quality of life and sustainable development.*
- 8. Promote democratic principles, values and practices.*

Technical and Financial Assistance

- 1. The General Secretariat will coordinate the joint search for international sources of cooperation and assistance to ensure the implementation of the Coordinated Agenda of Action.*

2. Agreements will be signed between the General Secretariat or Member Countries and the international cooperation sources for the purpose of carrying out projects and initiatives on the subject.

3. The international community may back the Coordinated Agenda of Action by providing the necessary technical and financial assistance for:

3.1 Seminars/workshops, round tables, meetings and ministerial meetings.

3.2 National and subregional training programs.

3.3 Joint operations.

3.4 Setting up national databases, communications systems, including specialized equipment, and advancing their harmonization for Member Countries that deem it pertinent.

3.5 Promote and maintain long term research programs in the subregion.

3.6 Support programs for the destruction of seized or confiscated small arms and light weapons in the possession of the State as well as of surplus inventories that are considered obsolete.

3.7 Implement programs to increase the knowledge and foster public awareness at the local, national and subregional spheres about the problem of small arms and light weapons; national and subregional forums for reflection and discussion; and voluntary arms and weapons surrender programs and community-led initiatives.

3.8 Enhance the capacity for response of competent national authorities, the National Coordinating Committees -National Focal Points- and the General Secretariat.

3.9 Conduct programs to combat terrorism, corruption and the worldwide drug problem and associated offenses, as well as to reduce the demand for and curb the violence and proliferation of illicit small arms and light weapons in all its aspects.

Note

The following national institutions, inter alia, could participate in the inter-institutional activities of the National Coordinating Committees -National Focal Points-: the ministries of foreign affairs, defense, the interior or government, and justice, the public ministry, the judiciary, the armed forces, the police, customs and immigration officials and representatives of civil society.

Lampiran 2

Comparative Legislative Guide and Colombian Regulation

DEFINITIONS	
LEGISLATIVE GUIDE	COLOMBIAN REGULATIONS
Firearm: A portable, barreled weapon from which a projectile can be discharged using an explosive charge. Parts and components: Specific elements of a firearm; a specific accessory for a firearm: the silencer. Ammunition: The complete cartridge and its components.	Article 6 of Decree 2535 defines firearms and Article 7 establishes their classification. Firearms are weapons that fire a projectile propelled by the expansion of gases produced by the combustion of a chemical substance. Although the Decree does not provide a specific definition for parts and components, in Chapter II it refers to those arms and accessories that are banned, and in Article 15, it mentions silencers. The Decree does not specifically define ammunition either, but the regulations established by said Decree, as stated in Chapter III apply to arms and ammunition, so that ammunition is also regulated by the Decree.

CONTROL MEASURES	
LEGISLATIVE GUIDE	COLOMBIAN REGULATIONS
Any transaction or transfer that does not adjust to the requirements of the Protocol must be typified as a crime. Three types of offenses must be specified: - Illicit manufacturing. - Trafficking. - Deletion or alteration of the series number or other marks.	Book II, Section V, Chapter II of the Colombian Penal Code, titled <i>Crimes Against Public Security</i>, contains two articles that refer to the penalization of arms trafficking and manufacturing, and one that refers to explosives: Art. 197. – Possession, manufacturing, and trafficking in dangerous substances or objects. Whoever illegally holds, manufactures, acquires, keeps, or supplies explosive, flammable, asphyxiating, toxic, corrosive, or infectious substances or objects shall be sentenced to one (1) to five (5) years of prison. Art. 201. – Manufacturing of and trafficking in firearms or ammunition. Modified Decree 2266 of 1991, Art. 1. Whoever without permission from the competent authority imports, manufactures, transports, stores, distributes, sells, supplies, repairs or carries personal defense firearms, ammunition, or explosives shall be sentenced to one (1) to four (4) years of prison and to the confiscation of the element in question. The sentence mentioned above shall be doubled whenever the facts occur in the following circumstances: - When using a motorized vehicle. - When the arm was obtained in an illicit act. - When requests by the authorities meet violent resistance. - When face masks or other similar elements are used to disguise or hinder identity. Art. 202. – Manufacturing of and trafficking in arms and ammunition meant for the exclusive use of the armed forces. Modified Decree 2266 of 1991, Art. 1. Whoever without permission from the competent authority imports, manufactures, repairs, stores, keeps, acquires, supplies or carries arms or ammunition intended for the exclusive use of the armed forces shall be sentenced to three (3) to ten (10) years of prison and to the confiscation of the corresponding materials. Similarly, Heading XIV, Chapter III, Article 351 states that the punishment for theft shall be increased by one sixth of half the sentence if the act is committed with respect to property and arms used to safeguard national security and guarantee national defense.

CONTROL MEASURES	
LEGISLATIVE GUIDE	COLOMBIAN REGULATIONS
Firearms must bear a distinctive mark that allows their identification and location. * Arms should be marked in five situations.	Imported Arms: The Military Industry requires that arms manufacturers establish a specific identification for Colombia. Consequently, all arms entering the country are marked with the following information when they are imported: name of manufacturer, date of manufacture, model and caliber of the weapon, year imported, and number of contract. Arms, ammunition, and explosives manufactured by INDUMIL: All of the arms manufactured by the Military Industry are marked with the acronym INDUMIL (IM), as well as with the caliber and the serial number of the weapon. All ammunition and explosives are marked at the moment of manufacturing. Personal defense and hunting ammunition is marked with the acronym INDUMIL and the caliber on the butt of the cartridge; the corresponding box is also marked with an 8-digit serial number, whose first two digits indicate the year of manufacture. Explosives are marked with the date of manufacture and a serial number or a box number, depending on the type of explosive, and when they are marketed, at the moment of sale, the following information is recorded: dispatch number, date of sale, name of client, and client's personal information, in case the explosives sold are lost or diverted.

CONTROL MEASURES	
LEGISLATIVE GUIDE	COLOMBIAN REGULATIONS
Export and Import license systems must be established. * Authorizations are required in four cases: Import, export, transit, and manufacture of firearms.	In order to control cross-frontier movements, Article 3 of Decree 2535 of 1993 establishes that private citizens may only exceptionally possess or carry arms, their components and parts, ammunition, explosives, and accessories with a permit issued on the basis of the discretionary power of the competent authority. Likewise, Section V establishes regulations for the importing and exporting of arms, ammunition, and explosives. In these cases, it is necessary to obtain a license issued by the Ministry of Trade, Industry and Tourism, after complying with the requirements established by the international and domestic customs authorities. Said licenses must be issued in conformity with the requirements for contracting established in Law 80.
Records must be kept that allow the subsequent location of the firearms on the basis of the information provided by the marks on the weapons and the issuance of authorizations.	Records of firearm marking are kept by INDUMIL. INDUMIL also has a systematized directory of licenses issued to suppliers, which is updated annually and includes the manufacturer, the representative or intermediary, and the legal, financial, and technical documents related to each one.
Regulations governing the seizure, confiscation, and disposal of firearms must be established.	Decree 2535 of 1993 establishes regulations for the confiscation and seizure of arms: Section X: Arms Seizure Section XI: Penalties and Confiscation of Arms, Ammunition, explosives, and their Accessories. Section XI: Confiscated material, remission, relation to a criminal process.
Regulations for the destruction of firearms.	The General Command of the Military Forces authorizes the destruction of the confiscated material that is unusable and cannot be reconverted or used by the Armed Forces.
It is possible to establish measures that regulate intermediation operations.	There are none.

RECORD KEEPING	
LEGISLATIVE GUIDE	COLOMBIAN REGULATIONS
Firearms records must be kept for no less than 10 years.	Records are kept of arms markings. In the case of the INDUMIL Llama revolver, marking records have been kept since March of 1991, and in that of the Galil caliber 5.56 mm rifle, they have been kept since 1996. Likewise, the Department for the Control of the Arms Trade keeps a record of all legal arms, with their respective history and detailed information.
Records of firearm marking and all information related to international firearm transfers.	INDUMIL keeps records of all arms manufactured, as well as of those that enter the country legally, for a period of 5 years.
Records of information concerning parts and components.	These records are kept. For example, in Colombia, ammunition and grenades are marked individually.
Records of crimes committed.	The records are not kept continuously. However, the following information is available: Number of persons sentenced for the offenses of illicit arms possession, trafficking, and manufacturing: 2002: 169; 2003: 179.

